

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024/
As of and For the Year Ended December 31, 2024
dan/*and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS**

Halaman/
Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

STATEMENT OF DIRECTOR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

*As of And For the Year Ended
December 31, 2024*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7 - 8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 129	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Faizal Rochmad Djoemadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Jl. Terusan Sutami I No. 6 RT/RW 005/003, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat	:	Domicile Address
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Utama/ President Director	:	Position
Nama	:	Endy P.R. Abdurrahman	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Jl. Durian Barat III No. 3 RT/RW 006/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan	:	Domicile Address
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ Finance and Risk Management Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya;
 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya.
1. We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;
 2. The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 - 3.a. All information in the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - b. The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; and
 4. We are responsible for PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries internal control system.

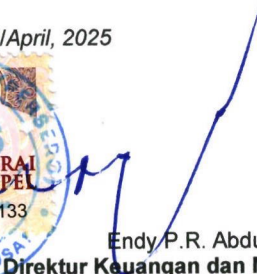
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 8 April/April, 2025


Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama/ President Director




Endy P.R. Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

PT Pos Indonesia (Persero)

Graha Pos Indonesia

Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115
Telp. 022-4213640, 4213641, 4213646
Faks. 022-4267725, 022-4267744
<http://www.posindonesia.co.id>



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT POS INDONESIA (PERSERO)**PT POS INDONESIA (PERSERO)****Opini****Opinion**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its subsidiaries "the Group", which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini**Basis for Opinion**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat piutang usaha sebesar Rp531.593.829.126, yang mencakup 3,23% dari total aset Grup, dengan total cadangan KKE sebesar Rp194.662.553.192.

Sesuai dengan PSAK 109, "Instrumen Keuangan", Grup menentukan KKE dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan KKE sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat KKE adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki risiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan penyisihan KKE atas piutang.

Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model KKE dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.

Kami mengevaluasi kewajaran dari model KKE yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan KKE.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for Expected Credit Losses ("ECL") on Trade Receivables

As at December 31, 2024, the Group has trade receivables amounted to Rp531,593,829,126, which accounted for approximately 3.23% of the Group total assets, with total corresponding allowance for ECL of Rp194,662,553,192.

In accordance with SFAS 109, "Financial Instruments", the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis. The ECL rates are based on historical defaults rates from groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Group disclosures on the trade receivables are set out in Note 7 to the consolidated financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group relevant controls in respect of the allowance for ECL on the receivables.

We evaluated accuracy and completeness of data used in the ECL model and checked mathematical accuracy of the calculation.

We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward-looking information) used by management to estimate the allowance for ECL.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Penilaian Properti Investasi Pada Nilai Wajar**Valuation Of Investment Properties at Fair Value**

Grup mencatat properti investasinya dengan model nilai wajar. Properti investasi yang terdiri dari tanah dan bangunan, dilaporkan sebesar Rp6.785.059.730.800 yang mencakup 41,21% dari total aset Grup. Penilaian aset ini memerlukan bantuan penilai eksternal yang perhitungannya dilakukan dengan pendekatan biaya dan pendekatan pasar. Hal ini penting bagi audit kami karena melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan.

The Group accounts for its investment properties using fair value model. Investment properties consist of land and building are reported at Rp6,785,059,730,800 which represents 41.21% of the Group's total assets. The valuation of these assets requires assistance of external appraisers whose assessment is carried out using cost approach and market approach. This matter is significant to our audit because it involves significant judgment and estimates.

Pengungkapan yang berkaitan dengan jumlah nilai wajar disajikan dalam Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian.

The disclosures relating to fair value amounts are included in Note 12 to the consolidated financial statements.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama**How Our Audit Addressed the Key Audit Matter**

Kami menelaah ruang lingkup, dasar, metodologi, dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penilai eksternal yang kualifikasi profesional dan objektivitasnya juga dipertimbangkan. Kami membandingkan informasi relevan yang mendukung harga pasar properti serupa dan penyesuaian yang dilakukan terhadap harga pasar. Kami juga meninjau pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar aset tersebut.

We reviewed the scope, bases, methodology, and results of the work done by external appraisers whose professional qualifications and objectivity were also taken into consideration. We compared the relevant information supporting to the market price of similar properties and the adjustments made to the market price. We also reviewed disclosures with respect to the fair value of these assets.

Hal Lain**Other Matter**

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 26 Maret 2024.

The consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on March 26, 2024.

Informasi Lain**Other Information**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materiality misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan Keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian – Lanjutan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements – Continued

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggungjawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian – Lanjutan**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements – Continued**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO

**Desman P.L. Tobing, CPA**

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0127

License of Public Accountant No. AP. 0127

8 April 2025 / April 8, 2025



(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3,6,30	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank				
yang Dibatasi Penggunaannya		33.073.529.725	-	Restricted Bank
Piutang Usaha - Bersih	3,7,30	336.931.275.934	385.402.397.127	Trade Receivables - Net
Persediaan	3,8	34.743.695.888	43.640.166.880	Inventories
Pendapatan yang Masih				
Harus Diterima	9,3	1.016.837.478.050	930.909.600.985	Accrued Revenues
Pajak dibayar dimuka	3,16a	1.506.984.961	592.283.336	Prepaid Taxes
Aset lancar lainnya:				Other Current Assets:
Piutang Layanan				Receivable from
Jasa Keuangan	10a,30	2.011.539.275.002	880.739.688.637	Financial Services
Lainnya	10b	2.338.569.956.643	477.498.955.501	Others
Jumlah Aset Lancar		7.836.565.423.345	5.372.701.514.209	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Penyertaan saham		774.306.716	-	Investment
Taksiran Tagihan				Estimated Claim
Pajak Penghasilan	16f	84.292.629.255	52.552.484.634	for Tax Refund
Aset Tetap - Bersih	3,11	1.162.999.687.246	1.035.327.898.488	Fixed Assets - Net
Properti Investasi	3,12	6.785.059.730.800	6.586.760.726.000	Investment Properties
Aset Takberwujud - Bersih	3,13	121.774.971.326	111.965.551.053	Intangible Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan	3,16d	370.705.541.962	388.117.276.057	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	103.665.446.567	111.413.796.667	Other Non-current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.629.272.313.872	8.286.137.732.899	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		16.465.837.737.217	13.658.839.247.108	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	3,15,30	651.416.992.385	474.354.916.682	Trade Payables
Utang Pajak	3,16b	76.892.446.168	60.569.447.017	Taxes Payable
Utang Lain-lain	17	722.423.584.092	753.828.360.808	Other Payables
Pinjaman Bank Jangka Pendek	3,18,30	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	Short-term Bank Loans
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu				Current Maturities of
Satu Tahun:				Long-term Loans
MTN	19b,30	-	323.361.458.333	MTN
Obligasi	3,19b,30	99.469.166.668	-	Bonds
Liabilitas Sewa	3,19a,30	42.139.256.365	7.734.098.789	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6.013.474.815.542	3.905.452.281.629	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang-setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Long-Term Loans-Net of Current Maturities:
Obligasi	3,19b,30	398.080.833.339	495.100.000.000	Bonds
Liabilitas Sewa	3,19a,30	88.782.484.359	15.194.867.976	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	3,20	1.011.325.062.209	1.108.026.778.901	Employee Benefits Liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.498.188.379.907	1.618.321.646.877	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		7.511.663.195.449	5.523.773.928.506	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham -				Share Capital -
Nilai Nominal Rp1.000.000				par value Rp1,000,000
per Lembar Saham				per Share
Modal dasar 1.500.000				Authorized Capital
Lembar Saham				1,500,000 Shares
Modal Ditempatkan dan				Capital Issued and
Disetor Penuh Sebesar				Fully Paid
455.023 Lembar Saham	3,21a	455.023.000.000	455.023.000.000	455,023 Shares
Tambahan Modal Disetor	21b	2.344.427.566	2.344.427.566	Additional Paid-In Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah Ditentukan				
Penggunaannya		4.019.922.826.530	3.264.314.544.470	Appropriated
Belum Ditentukan				
Penggunaannya		726.936.851.666	755.630.126.731	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya	21c	3.794.785.432.195	3.702.780.917.128	Other Equity Component
Jumlah Ekuitas yang				
Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable
kepada Pemilik Entitas Induk		8.999.012.537.957	8.180.093.015.895	to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	21d	(44.837.996.189)	(45.027.697.293)	Non-Controlling Interest
TOTAL EKUITAS		8.954.174.541.768	8.135.065.318.602	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS		16.465.837.737.217	13.658.839.247.108	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN	3,22	5.017.861.008.697	5.479.121.136.675	REVENUES
BEBAN POKOK LAYANAN	3,23	(3.030.806.140.057)	(3.680.789.445.438)	COST OF SERVICES
LABA KOTOR		1.987.054.868.640	1.798.331.691.237	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	3,24	(35.211.233.641)	(70.260.445.072)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	3,24	(1.159.917.022.630)	(1.110.990.406.688)	General Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya	3,25	618.118.287.330	628.728.086.809	Other Income
Beban Lainnya	3,25	(261.185.716.080)	(325.829.958.948)	Other Expenses
LABA USAHA		1.148.859.183.619	919.978.967.338	PROFIT FROM OPERATIONS
Pendapatan Keuangan	3,26	31.530.854.114	43.561.402.355	Finance Income
Beban Keuangan	3,26	(439.234.217.673)	(261.648.866.909)	Finance Costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		741.155.820.060	701.891.502.784	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Pajak Kini	3,16c	(2.551.203.481)	(1.395.271.987)	Current Income Tax
Pajak Tangguhan	3,16d	8.529.860.855	27.718.412.803	Deferred Tax
LABA TAHUN BERJALAN		747.134.477.434	728.214.643.600	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Liabilitas				Remeasurement of Employee
Imbalan Kerja	3,20,21c	117.931.585.665	57.572.938.850	Benefits Obligation
Revaluasi Aset	3,21c	-	412.370.729.903	Asset Revaluation
Pajak Penghasilan Terkait	3,16d	(25.956.839.934)	(12.666.046.547)	Related Income Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		839.109.223.165	1.185.492.265.806	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LABA TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT				
DIATRIBUSIKAN				PROFIT FOR THE YEAR
KEPADA:				ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		746.936.851.666	748.699.105.099	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		197.625.768	(20.484.461.499)	Non-Controlling Interest
		747.134.477.434	728.214.643.600	
JUMLAH LABA				
KOMPREHENSIF				
TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT				TOTAL COMPREHENSIVE
DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR
KEPADA:				ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		838.941.366.733	1.205.988.688.940	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		167.856.432	(20.496.423.134)	Non-Controlling Interest
		839.109.223.165	1.185.492.265.806	
LABA PER SAHAM DASAR		1,64	1,60	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity											
	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/Retained Earning Sudah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/Total	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja/ Remeasurement of Benefit Obligation	Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation of Fixed Assets	Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya/ Total Other Equity Component	Jumlah/ Total	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	455.023.000.000	2.344.427.566	2.613.945.107.772	650.369.436.698	3.264.314.544.470	(120.026.621.099)	3.365.475.909.885	3.245.449.288.786	6.967.131.260.822	(17.558.208.026)	6.949.573.052.796	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
Saldo Laba Sudah Ditentukan												
Penggunaannya			650.369.436.698	(650.369.436.698)	-			-	-		-	Appropriated Retained Earnings
Laba Periode Berjalan				748.699.105.099	748.699.105.099			-	748.699.105.099	(20.484.461.499)	728.214.643.600	Profit for the Period
Penyesuaian				6.931.021.632	6.931.021.632	65.967.771		65.967.771	6.996.989.403	(6.996.989.403)	-	
Penghasilan Komprehensif Lain												Other Comprehensive Income
Tahun Berjalan					-	44.894.930.668	412.370.729.903	457.265.660.571	457.265.660.571	11.961.635	457.277.622.206	for the Year
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	455.023.000.000	2.344.427.566	3.264.314.544.470	755.630.126.731	4.019.944.671.201	(75.065.722.660)	3.777.846.639.788	3.702.780.917.128	8.180.093.015.895	(45.027.697.293)	8.135.065.318.602	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023
Saldo Laba Sudah Ditentukan												
Penggunaannya	-	-	755.630.126.731	(755.630.126.731)	-	-	-	-	-	-	-	Appropriated Retained Earnings
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	746.936.851.666	746.936.851.666			-	746.936.851.666	197.625.769	747.134.477.435	Profit for the Year
Dividen	-	-	-	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)			-	(20.000.000.000)		(20.000.000.000)	
Penyesuaian	-	-	(21.844.671)	-	(21.844.671)			-	(21.844.671)	21.844.671		Adjustment
Penghasilan Komprehensif Lain												Other Comprehensive Income
Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	92.004.515.067	-	92.004.515.067	92.004.515.067	(29.769.336)	91.974.745.731	for the Year
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	455.023.000.000	2.344.427.566	4.019.922.826.530	726.936.851.666	4.746.859.678.196	16.938.792.407	3.777.846.639.788	3.794.785.432.195	8.999.012.537.957	(44.837.996.189)	8.954.174.541.768	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5.135.768.429.416	5.098.572.466.567	Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(2.285.727.332.109)	(2.443.222.218.208)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(4.045.634.540.049)	(2.525.387.089.876)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Biaya Pemasaran		-	(67.290.010.927)	Payment of Marketing Cost
Pembayaran Pajak		(8.619.025.061)	(11.655.877.865)	Payment of Tax
Penerimaan Restitusi Pajak		(351.810.448)	15.773.122.481	Receipt from Tax Restitution
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(1.204.564.278.251)	66.790.392.172	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(60.348.487.012)	(239.519.595.872)	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets
Pelepasan Aset Tetap		-	10.890.179.193	Disposal of Fixed Assets
Pelepasan Aset Lain-lain		6.136.800.000	-	Disposal of Other Assets
Pembayaran Dividen		(20.000.000.000)	-	Dividend Payment
Penempatan Bank Garansi		(4.046.482.399)	(95.719.129.156)	Placement Bank Guarantee
Pencairan Bank Garansi		-	100.460.056.756	Withdrawal Bank Guarantee
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		(78.258.169.411)	(223.888.489.079)	Net Cash Flows Provided by Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (CONTINUED)

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan Pinjaman				Drawdown of
Bank Jangka Pendek		15.503.800.000.000	10.024.000.000.000	Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman				Payment of
Bank Jangka Pendek		(13.709.587.821.338)	(8.529.000.000.000)	Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman				Payment of
Bank Jangka Panjang		-	(87.500.000.000)	Long-Term Bank Loans
Pembayaran Bunga Pinjaman		(405.754.936.393)	(251.090.088.514)	Payment of Interest
Pembayaran				Payment of Consumer
Liabilitas Sewa		(10.719.707.191)	(26.249.201.993)	Lease Liabilities
Pembayaran				Payment of
Utang Lain-lain		(81.454.761)	-	Other Payables
Pendanaan Entitas Anak		21.503.552.284	-	Subsidiary Funding
Pembayaran Pemegang Saham		(26.063.111.120)	-	Shareholder Payments
Layanan Jasa Keuangan		(301.202.074.981)	(621.824.422.566)	Financial Services
Pendanaan Lainnya		(388.585.650.488)	-	Other Financing
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		683.308.796.012	508.336.286.927	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(599.513.651.650)	351.238.190.020	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak dari Perubahan				Exchange Rates
Kurs Terhadap Kas				Fluctuation Effects
dan Setara Kas		8.958.457.049	876.920.800	on Cash and Cash Equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron, pada tanggal 26 Agustus 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995, bahwa Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan:

- 1) Usaha jasa pos dan giro
- 2) Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") ditetapkan dengan Akta Notaris Achmad Abid, S.H., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8182 HT.01.01 tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 Tambahan No. 7039 tanggal 22 Agustus 1995.

Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan Akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Desember 2008.

Perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Agustus 2024 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., di Jakarta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham terkait Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0019573.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

The first post office in Indonesia was established in Batavia by Governor General GW Baron on August 26, 1746. Which was then was called Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the Young Generation PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as Postel Service Day (Hari Bakti Postel). Based on Government Regulation No. 240 of 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was divided into two part, namely PN Post and Giro based on Government Regulation No. 29 of 1965, and PN Telecommunications based on Government Regulation No. 30 of 1965. Government Regulation No. 9 of 1978 changed the status of PN Post and Giro into Perum (Public Company) Post and Giro. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Perum Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984 was changed its form to Limited Company as defined in Law No. 9 of 1969 regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association were prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting:

- 1) Post and giro services
- 2) Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.

The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) ("the Company") were stipulated based on Notarial Deed No. 117 of Achmad Abid, S.H., in lieu of Notary Sutjipto, S.H., dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on in his Decree No. C2-8182 HT.01.01 of 1995 dated June 29, 1995 and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995.

The Company Articles of Association have been amended several times. Amendments to the Company's articles of associations in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies have been made in accordance with deed No. 164 dated August 15, 2008 before notary Sutjipto, S.H., and was approved by Ministry of Law and Human Rights through his degree No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 dated December 24, 2008.

The latest amendment was in year 2024 by Notarial Deed No. 5 of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., a notary in Bogor, dated August 5, 2024, regarding the Statement of Shareholders Decision related to the Amendment of the Article of Association of the Company. The amendments include among others, the amendment of Nomenclature Position, Transfer of Tasks, and Appointment of Board of Commissioners of the Company. The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision No. AHU-0019573.ah.01.11. Year 2024 dated August 5, 2024.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Entitas (Lanjutan)

PT Pos Indonesia (Persero) tidak memiliki entitas induk atau merupakan entitas induk terakhir. Perseroan memiliki tiga entitas anak, yaitu PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, dan PT Pos Properti Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Bandung dengan kantor pusat di Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

c. Merk dan Logo

Perusahaan telah melakukan perubahan merek dan logo baru yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor Surat: S-532/MBU/10/2023 perihal Persetujuan Perubahan Merek dan Logo PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2023.

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1) Usaha jasa pos dan giro

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan memiliki wilayah kerja dan lokasi regional sebagai berikut:

- i. Regional 1 Medan 20004 meliputi wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.
- ii. Regional 2 Jakarta 10004 meliputi wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta dan Banten, kota Bogor, Bekasi dan Depok.
- iii. Regional 3 Bandung 40004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat.
- iv. Regional 4 Semarang 50004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- v. Regional 5 Surabaya 60004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- vi. Regional 6 Makassar 90004 meliputi wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

1. GENERAL (Continued)

a. The Entity's Establishment (Continued)

PT Pos Indonesia (Persero) does not have a parent or ultimate parent. The Company has three subsidiaries, PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, and PT Pos Properti Indonesia.

The Company is domiciled in Bandung with its headquarter at Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

b. Purposes and Objectives of the Company

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's scope of business activities includes postal and giro services which include financial services of cash-based or giro-based accounts, business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation and utilization and development of its resources to support the Company's business activities.

c. Brand and Logo

The Company has made changes to its brand and new Company logo which have been approved by the Minister of State-Owned Enterprises with Letter No.: S-532/MBU/10/2023 regarding Approval of Changes to the Brand and Logo of PT Pos Indonesia (Persero) dated October 23, 2023.

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees

1) Post and giro services

In conducting its activities, the Company has regional working territories as follows:

- i. Regional 1 in Medan 20004 consists of working area Province of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Riau Islands, South Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu and Bangka Belitung Islands.
- ii. Regional 2 in Jakarta 10004 consists of working area Province of DKI Jakarta and Banten, City of Serang, Bogor, Bekasi and Depok.
- iii. Regional 3 in Bandung 40004 consists of working area Province of West Java.
- iv. Regional 4 in Semarang 50004 consists of working area Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta.
- v. Regional 5 in Surabaya 60004 consists of working area Province of East Java, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.
- vi. Regional 6 in Makassar 90004 consists of working area Province of West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

2) Dewan Komisaris dan Direksi

2) Board of Commissioners and Director

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-261/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 24 Januari 2024, dan yang terakhir Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 5 Agustus 2024, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-261/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, Statement of Shareholders' Decision No. 11 dated January 24, 2024, and last Statement of Shareholders' Decision No. 5 dated August 5, 2024, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	5 Agustus - 31 Desember/ August 5 - December 31, 2024	24 Januari - 4 Agustus/ January 24 - August 4, 2024	1 Januari - 23 Januari/ January 1 - January 23, 2024	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	President Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Budi Djatmiko	-	Condro Kirono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Fauzi Baadilla	-	-	Independent Commissioner
Komisaris	I Gde Made Kartikajaya	I Gde Made Kartikajaya	Robben Rico	Commissioner
Komisaris	Robben Rico	Robben Rico	Guntur Iman Nefianto	Commissioner
Komisaris	-	Guntur Iman Nefianto	Gunawan Hutagalung	Commissioner
Komisaris	Gunawan Hutagalung	Gunawan Hutagalung	-	Commissioner
2023				
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama		Rhenald Kasali		President Commissioner
Komisaris Independen		Condro Kirono		Independent Commissioner
Komisaris		Robben Rico		Commissioner
Komisaris		Guntur Iman Nefianto		Commissioner
Komisaris		Gunawan Hutagalung		Commissioner

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-154/MBU/07/2022 dan yang terakhir SK-260/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK 154/MBU/07/2022 and most recently SK-260/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	5 Agustus - 31 Desember/ August 5 - December 31, 2024	24 Januari - 4 Agustus/ January 24 - August 4, 2024	1 Januari - 23 Januari/ January 1 - January 23, 2024	
Dewan Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Director of Finance and Risk Management
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Tonggo Marbun	Tonggo Marbun	Siti Choiriana	Director of Courier and Logistic Business
Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Haris	Haris	Haris	Director of Finance Services Business
Direktur Human Capital Management	Asih Kurniasari Komar	Asih Kurniasari Komar	Tonggo Marbun	Director of Human Capital Management
Direktur Business Development dan Portofolio Management	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Director of Business Development and Portofolio Management
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Hariadi	Hariadi	Hariadi	Director of Operation and Information Technology

1. UMUM (Lanjutan)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 tanggal 27 September 2023, dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-56/DEKOM/0424 tanggal 28 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua komite audit PT Pos Indonesia (Persero), memberhentikan dengan hormat Sdr. Robben Rico dan mengangkat Sdr. Muhammad Budi Djatmiko sebagai ketua merangkap anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Muhammad Budi Djatmiko
Anggota	Prasojo
Anggota	Venoneta Monetera
Anggota	Robben Rico

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 90/DEKOM/0724 tanggal 15 Juli 2024 memberhentikan dengan hormat Sdr. Ahmad Syarif Munawi dan mengangkat Sdri. Dewi Hanggraeni sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024
<u>Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi</u>	
Ketua	Gunawan Hutagalung
Anggota	Saiful
Anggota	Dewi Hanggraeni

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan No. SK-57/DEKOM/0424 tanggal 26 April 2024 memberhentikan dengan hormat Sdr. Roben Rico dan mengangkat Sdr. I Gde Made Kartikajaya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

1. GENERAL (Continued)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 dated September 27, 2023, and the latest based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK-56/DEKOM/0424 dated August 28, 2024 concerning the dismissal and appointment of the chairman of the audit committee of PT Pos Indonesia (Persero), honorably dismiss Mr. Robben Rico and appoint Mr. Muhammad Budi Djatmiko as chairman and concurrent member of the Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2023	<u>Audit Committee</u>
Guntur Iman Nefianto		Chairman
Prasojo		Member
Venoneta Monetera		Member
-		Member

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) on the Dismissal and Appointment of Members of the Business Risk Management and Investment Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 90/DEKOM/0724 dated July 15, 2024 respectfully dismissed Mr. Ahmad Syarif Munawi and appointed Sdri. Dewi Hanggraeni as a member of the Business Risk Management and Investment Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee (KPMRUI) as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

	2023	<u>Business and Investment Risk Magement Monitoring Committee</u>
Gunawan Hutagalung		Chairman
Syaiful Siliganda		Member
Oerip Soebagyo		Member

Nomination and Remuneration Committee

The latest amendment to the Decree of the Company's Board of Commissioners regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee No. SK-57/DEKOM/0424 dated April 26, 2024 honorably dismissed Mr. Roben Rico and appointed Mr. I Gde Made Kartikajaya as a Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024
<u>Komite Nominasi dan Remunerasi</u>	
Ketua	Fauzi Baadilla
Anggota	I Gde Made Kartikajaya
Anggota	Boy Bayu
Anggota	Oerip Soebagyo

	2023	<u>Nomination and Remuneration Committee</u>
	Roben Rico	Chairman
	Boy Bayu Idisondjaya	Member
	Oerip Soebagyo	Member
	-	Member

4) Karyawan & Manajemen Kunci

4) Employees & Key Personnel

Karyawan

Employees

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai karyawan masing-masing 14.190 dan 15.783 (tidak diaudit) dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the Group have 14,190 and 15,783 employees respectively (unaudited) with the following details:

Manajemen Kunci

Key Personnel

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK-214, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mempunyai key personel dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors No SK-214, as of December 31, 2024 and 2023, the Company has key personnel with the following details:

	2024
<u>Manajemen Kunci</u>	
Risk Management and Financial Policy	Endang Wahyudin
Retail Business	Wilhelmina Lily Selanno
Enterprise Business	Arifin Muchlis
Strategic Planning and Business Development	Ir. Wikandaru Mudjadi
International Post Service	Yanto Parulian Hutajulu
Human Capital Policy and Strategy	Ika Wijayanti
Portfolio Management	Riharsono Prastyantoro
Human Capital Services and Business Partner	Chandra Dewi
Government and Corporate Business	Hendra Sari
Courier and Logistic Operation	Imam Pujono
Financial Operations and Business Partner	Vivi Sofiati
Information Technology	A. Winahyo Pratomo
Fronting Management and Financial Transaction Service	Felix Heru Wibowo
Consumer Business	Zuhed Nur
Wholesale and International Business	Arlia Irishtiana
Internal Audit	Agus Trisyuwanto

	2023	<u>Key Personnel</u>
	Endang Wahyudin	Risk Management and Financial Policy
	Wilhelmina Lily Selanno	Retail Business
	Arifin Muchlis	Enterprise Business
	Ir. Wikandaru Mudjadi	Strategic Planning and Business Development
	Yanto Parulian Hutajulu	International Post Service
	Ika Wijayanti	Human Capital Policy and Strategy
	Riharsono Prastyantoro	Portfolio Management
	Chandra Dewi	Human Capital Services and Business Partner
	Hendra Sari	Government and Corporate Business
	Imam Pujono	Courier and Logistic Operation
	Vivi Sofiati	Financial Operations and Business Partner
	A. Winahyo Pratomo	Information Technology
	Felix Heru Wibowo	Fronting Management and Financial Transaction Service
	Zuhed Nur	Consumer Business
	Arlia Irishtiana	Wholesale and International Business
	Agus Trisyuwanto	Internal Audit

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

e. The Company's Bonds Public Offering

Pada bulan Desember 2022, Perusahaan menawarkan obligasi pada masyarakat (Catatan 19) yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor S-271/D.04/2022 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Desember 2022.

On December 2022, the Company offered its bonds to the public (Note 19), which became effective by Financial Services Authority (OJK) on December 20, 2022 based on Letter Number S-271/D.04/2022 on the public offering of Bond I of PT Pos Indonesia (Persero) with a principal amount of Rp500,000,000,000 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 28, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the outstanding amount of unmatured bond was Rp500,000,000,000 with the following details:

Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date
Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023					
Seri/Serie A (POST01A)	100.000.000.000	10,90%	3	28 Desember/ December 28, 2022	28 Desember/ December 28, 2025
Seri/Serie B (POST01B)	400.000.000.000	11,75%	5	28 Desember/ December 28, 2022	28 Desember/ December 28, 2027

f. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan

f. Subsidiaries Information

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 persentase kepemilikan Perusahaan dan jumlah aset Entitas Anak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023 the percentage of ownership of the Company and total asset of the Subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Komersial Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
					2024	2023
<u>Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company</u>						
PT Pos Finansial Indonesia ("PFI")	Indonesia	Bisnis jaringan, bisnis akses channel dan switching dan bisnis IT solution/Network business, access channel and system switching business and IT solution business.	54,76%	2019 (dahulu/previouslly PT Bhakti Wasantara Net)	245.099.473.612	123.766.890.726
PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")	Indonesia	Jasa transportasi, jasa pergudangan, jasa pengiriman kargo dan regulated agent atau agen inspeksi/Transportation services, warehousing services, cargo delivery, regulated agent or inspection agent.	99,80%	2012	382.060.133.187	459.483.236.297
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti/ Property business	99,00%	2013	323.369.373.158	259.254.093.301
<u>Dimiliki oleh PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")/Held through PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")</u>						
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Properti/ Property	1,00%	2013	323.369.373.158	259.254.093.301

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Informasi tentang Entitas Anak (Lanjutan)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia ("PFI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari notaris Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567.HT.01.01.Th.2001 tanggal 28 Juni 2001 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11 dan No. 1320 tanggal 5 Februari 2002.

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perusahaan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PFI sebesar 54,76% dari modal ditempatkan dan disetor PFI dengan jumlah investasi sebesar Rp38.578.000.000 atau 38.578 lembar saham. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019.

Data PFI telah mengalami perubahan, perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam akta No.61 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ervina Christina Sembiring, S.H., M.kn mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.09-0289928 tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.

Masih dalam proses pemenuhan administrasi kelengkapan dokumen untuk permintaan persetujuan pemegang saham (Kementerian BUMN).

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PLI sebesar 99,80% dari modal ditempatkan dan disetor PLI, dengan jumlah investasi sebesar Rp174.000.000.000 atau 174.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-08351.AH.0101 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 15392.

1. GENERAL (Continued)

f. Subsidiaries Information (Continued)

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred as "the Group".

PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia ("PFI") was established based on Notarial Deed No. 7 of notary Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notary in Jakarta dated April 2, 2001. Deed of establishment was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C02567.HT.01.01.Th.2001 dated June 28, 2001 and published in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 and No. 1320 dated February 5, 2002.

Based on Notarial Deed No. 69 of Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. the Company changed the name of PT Bhakti Wasantara Net to PT Pos Finansial Indonesia. The Company established and has an investment in PFI for 54.76% of the issued and paid-up capital of PFI, with a total investment of Rp38,578,000,000 or 38,578 shares. The Articles of Association was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter Number AHU-0022339.AH.01.02 Year 2019 dated April 24, 2019.

PFI data has undergone changes, the last change as stated in deed No.61 dated December 17, 2024 made before Notary Ervina Christina Sembiring, S.H., M.kn regarding changes to the composition of the Company's directors and board of commissioners. The deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.AHU-AH.01.09-0289928 of 2024, dated December 18, 2024.

Still in the process of fulfilling the administrative requirements for the completeness of the documents for the request for shareholder approval (Ministry of State-Owned Enterprises).

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Based on Notarial Deed No. 9 dated January 12, 2012 from Notary Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PLI for 99.80% of the issued and paid-up capital of PLI, with a total investment of Rp174,000,000,000 or 174.000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-08351.AH.0101 Year 2012, dated February 17, 2012 and has been published in the State Gazette of Republic of Indonesia supplementary No. 34 dated February 17, 2012, addition No. 15392.

1. UMUM (Lanjutan)

f. Informasi tentang Entitas Anak (Lanjutan)

PT Pos Logistik Indonesia (PLI) (Lanjutan)

Anggaran dasar PLI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 2 Agustus 2024 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PLI. Sesuai kesepakatan bersama, PLI melakukan *Debt to Equity Swap* atau konversi utang pokok (*shareholder loan*) untuk menambah saham milik Perusahaan sebanyak 69.500 lembar saham atau setara dengan Rp69.500.000.000. Dengan adanya penambahan saham tersebut, maka yang semula saham milik Perusahaan sebanyak 174.000 lembar saham naik menjadi sebanyak 243.500 lembar saham atau setara dengan Rp243.500.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0235288 tanggal 4 Agustus 2024.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 31 Desember 2013 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PPI sebesar 99,00% dari modal ditempatkan dan disetor PPI dengan jumlah investasi sebesar Rp99.000.000.000 atau 99.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14137.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, tambahan No. 22310.

Data PPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 02 tanggal 3 Juli 2023 dari Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung, mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PPI. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134292 tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

1. GENERAL (Continued)

f. Subsidiaries Information (Continued)

PT Pos Logistik Indonesia (PLI) (Continued)

PLI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 01 dated Augustus 2, 2024 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung, concerning in change of Article 4 in PLI's Article of Association. In accordance with mutual agreement, PLI carried out a Debt to Equity Swap or conversion of principal debt (*shareholder loan*) to increase the shares owned by the Company by 69,500 shares or equivalent to Rp69,500,000,000. With the addition of these shares, the original shares are owned by the Company increased from 174,000 shares to 243,500 shares or equivalent of Rp243,500,000,000. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0235288 dated Augustus 4, 2024.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Based on Notarial Deed No. 35 dated December 31, 2013 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PPI for 99.00% of the issued and paid-up capital of PPI with a total investment of Rp99,000,000,000 or 99,000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 dated April 25, 2014 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 13, 2014, addition No. 22310.

PPI data has undergone several changes, most recently with Notarial deed No. 02 dated July 3, 2023 from Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Bandung, regarding changes to the composition of PPI's Commissioners and Directors. The deed of change has been received and recorded in the legal entity administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of General Legal Administration in Letter No. AHU-AH.01.09-0134292 of 2023 dated July 5, 2023.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2024)

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatannya operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 116: Sewa. Amendemen tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik. Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik.
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan. Amendemen tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Amendemen tentang pengaturan pembiayaan pemasok. Amendemen ini memperjelas pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok..

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Amendemen tentang kekurangan ketertukaran. Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya, berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.
- PSAK 117 memperkenalkan Pendekatan *Block Building*, yang dimodifikasi untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, yang digambarkan sebagai Pendekatan Biaya Variabel. Terdapat penyederhanaan jika kriteria tertentu terpenuhi dengan menggunakan Pendekatan Alokasi Premi. PSAK 117 ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperbolehkan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2024)

In the current year, the Group has adopted all of the new and revised Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAK”) including amendment and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and affected to the consolidated financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.

New and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendment to PSAK 116: Leases. Amendments on lease liabilities in sale and leaseback. This amendment regulates subsequent measurement of sale and leaseback transactions.
- Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements. Amendments on long-term liabilities with covenants. This amendment stipulates that only covenants that an entity must comply with on or before the reporting date will affect the classification of short-term or long-term liabilities and their disclosure.
- Amendments to PSAK 207: Cash Flow Statement and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures. Amendments on supplier financing arrangements. These amendments clarify disclosures related to supplier financing arrangements.

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year

- Amendment to PSAK 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates. Amendment on lack of convertibility. This amendment clarifies the provisions related to conditions when a currency is not convertible and its disclosure, effective on or after January 1, 2025.
- PSAK 117 introduces the *Block Building Approach*, which is modified for insurance contracts with direct participation features, described as a *Variable Fee Approach*. There is simplification if certain criteria are met by using the *Premium Allocation Approach*. This PSAK 117 is effective for the annual reporting period beginning on or after January 1, 2025 with early application permitted.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (Lanjutan)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif, berlaku efektif ketika entitas pertama kali menerapkan PSAK 117.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Grup telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Informasi Kebijakan Akuntansi Material”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Grup atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (Continued)

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year (Continued)

- Amendment to PSAK 117 – Insurance Contracts – Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information, effective when the entity first applies PSAK 117.

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Group’s operation have been adopted as disclosed in the “Material Accounting Policies Information”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Group’s operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the consolidated financial statements.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (“SAK”)

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new and revised standards, amendments and annual improvements, effective on or after January 1, 2024, and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Company that effective for the financial statements that ended on or after December 31, 2012.

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies and in conformity with Financial Accounting Standard established by the Indonesian Institute of Accountants. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas

a. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**b. Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)**

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires Management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Principles of Consolidation and Equity Accounting

a. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any noncontrolling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the noncontrolling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas
(Lanjutan)**

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 239 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

b. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan nonpengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di entitas anak. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**c. Principles of Consolidation and Equity Accounting
(Continued)**

a. Subsidiaries (Continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognized in accordance with PSAK 239 (revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

b. Changes in Ownership Interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non controlling interests and any consideration paid or received is recognized in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas
(Lanjutan)**

b. Perubahan Kepemilikan

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau entitas asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**c. Principles of Consolidation and Equity Accounting
(Continued)**

b. Changes in Ownership Interests

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.

In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terhadap Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila pada periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya Manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

d. Business Combination (Continued)

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a change in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, the amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. In its financial statements, during the measurement period the acquirer adjusts, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the Management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut;
- Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali; dan
- Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>
1 Poundsterling Inggris (GBP)	20.332,61
1 Euro (EUR)	16.851,32
1 Franc Swiss (CHF)	17.920,95
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.162,00
1 Dolar Singapura (SGD)	11.919,34
1 Riyal Arab Saudi (SAR)	4.304,14
1 Yen Jepang (JPY)	102,36

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Foreign Currency Transaction and Balances

The consolidated financial statements is measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the consolidated financial statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each the reports:

- Monetary items in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date;
- Non-monetary items measured at historical cost in foreign currencies are not retranslated; and
- Non-monetary item in foreign currencies measured at fair value are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.

At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss. The exchange rates used were as follows:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
19.760,25		GB Poundsterling 1 (GBP)
17.139,52		Euro 1 (EUR)
18.374,28		Swiss Franc 1 (CHF)
15.416,00		US Dollar 1 (USD)
11.711,64		Singapore Dollar 1 (SGD)
-		Saudi Arabia Riyal 1 (SAR)
109,55		Japan Yen 1 (JPY)

f. Transaction with Related Parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- 1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a) Has control or joint control over the reporting entity;
 - b) Has significant influence over the reporting entity; or
 - c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 27).

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

f. Transaction with Related Parties (Continued)

- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied:
- a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
 - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - c) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significanty influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE'e Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements (Note 27).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

g. Aset Keuangan

a) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

b) Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

g. Financial Assets

a) Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *financial asset to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *financial asset to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

b) Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

g. Aset Keuangan (Lanjutan)

b) Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang (Lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas ditangan, kas di bank (rekening giro) dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

g. Financial Assets (Continued)

b) Measurement (Continued)

Debt instrument (Continued)

Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

h. Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

i. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position consists of cash on hand, cash in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

j. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Definisi Gagal Bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

j. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

k. Impairment of Financial Assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

Definition of Default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *When there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

m. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada beban usaha sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

n. Aset Tetap

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika kriteria pengakuan. Sebaliknya pada saat inspeksi utama dilakukan, biaya itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

k. Impairment of Financial Assets (Continued)

Write-off Policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

l. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Acquisition cost is determined by the first in first-out method. Allowance for obsolescence and/or impairment of inventory is determined to reduce the carrying value of inventories to net realizable value.

Net realizable value is the estimated sales price in the normal course of business less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

m. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operating expenses over the periods benefited.

Advances is the portion of a contract paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the consolidated statements of financial position.

n. Fixed Assets

The Group use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred if the recognition criteria are met. On the other hand when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

n. Fixed Assets (Continued)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda (*double declining method*) untuk inventaris dan kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is calculated based on the straight-line method for buildings and the double declining method for inventory and vehicles during the useful life of fixed assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Tahun/Years	Type of fixed assets
Gedung	20 Tahun/Years	Buildings
Inventaris Kelompok 1	4 Tahun/Years	Office Equipment Group 1
Inventaris Kelompok 2	8 Tahun/Years	Office Equipment Group 2
Inventaris Kelompok 3	16 Tahun/Years	Office Equipment Group 3
Kendaraan Bermotor Kelompok 1	4 Tahun/Years	Vehicles Group 1
Kendaraan Bermotor Kelompok 2	8 Tahun/Years	Vehicles Group 2

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hak dan umur ekonomis tanah.

Land is stated at cost and is not depreciated. The legal cost of land rights when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as deferred charges as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and are amortized over the shorter of the right's life and land's economic life.

Gedung dinyatakan berdasarkan biaya perolehan awal aset tersebut ditambahkan dengan biaya perbaikan selama aset tersebut dipergunakan. Grup tidak mengkapitalisasikan biaya pengecatan atas gedung ke dalam nilai perolehan aset. Umur ekonomis gedung adalah 20 tahun, terhitung pada saat gedung tersebut dan perbaikannya mulai digunakan.

Buildings are stated based on the initial cost of the asset plus the cost of repairs if the asset is in use. The Group does not capitalize the cost of painting the buildings into the acquisition value of assets. The economic life of the building is 20 years, from the time the building and its repairs to the building are used.

Inventaris dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok dengan batas minimal kapitalisasi aset minimal sebesar Rp1.000.000. Masa manfaat ekonomis untuk kategori inventaris kelompok 1 adalah 4 tahun, inventaris kelompok 2 adalah 8 tahun dan inventaris kelompok 3 adalah 16 tahun. Grup tidak memiliki barang inventaris yang memiliki umur manfaat ekonomis lebih dari 16 tahun.

Office equipment is grouped into 3 types of group with a minimum asset capitalization limit of at least Rp1,000,000. The economic useful life for office equipment category group 1 is 4 years, office equipment group 2 is 8 years and office equipment group 3 is 16 years. The Group does not have any office equipment that has an economic useful life of more than 16 years.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu secara prospektif, jika sesuai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

o. Sewa

Suatu sewa di mana porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset masih tetap berada di tangan lessor, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap di mana entitas memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum, jika nilai kini jumlahnya lebih dari nilai wajar.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, entitas akan menilai apakah perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode.

Laba (rugi) penjualan akibat transaksi *sales and leaseback* atas aset pendasar dengan metode *capital lease* ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur manfaat pendasar yang bersangkutan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

n. Fixed Assets (Continued)

At the end of each financial period, the assets' residual values, useful life and method of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate.

Assets in progress are stated at cost and disclosed as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

o. Lease

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the entity substantially has all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments.

The determination whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement at the lease commencement date and whether the fulfilment of the agreement is dependent on the use of a specific asset and the agreement conveys a right to use the asset. If an agreement contains a lease, the entity will assess whether such a lease is finance or operating lease. If an agreement contains a lease, a lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item is classified as a finance lease, otherwise it is classified as an operating lease.

Each lease payment is allocated between the liability and finance costs to achieve a constant rate of interest on the outstanding finance balance. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the lease period to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Gain (loss) on sales and leaseback transaction of underlying asset by capital lease method is deferred and amortized proportionally during the useful life of underlying assets and is calculated using straight-line method.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Sewa (Lanjutan)

Aset pendasar diakui dalam laporan dari sewa pembiayaan dimana sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Kebijakan penyusutan aset pendasar menggunakan metode garis lurus selama masa kontrak aset tersebut.

Grup sebagai Penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasanya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 3 hingga 5 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan Grup dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Grup.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya;
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa;

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Lease (Continued)

The underlying assets are recognized in a report from a finance lease where the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset.

Depreciation policy for underlying assets uses the straight-line method during the contract period.

The Group as a Lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The Group leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 3 to 5 years but may have extension.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the Group and the lease does not benefit from a guarantee from the Group.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Impairment of non-financial assets section.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments (including in substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Sewa (Lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (Lanjutan)

- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Lease (Continued)

The Group as a Lessee (Continued)

- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Sewa (Lanjutan)

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh lessor yang bersangkutan.

p. Properti Investasi

Properti investasi diukur dengan model biaya (*cost model*) dan selanjutnya model nilai wajar (*fair value model*). Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Grup merevaluasi atas aset properti investasi. Revaluasi aset properti investasi bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pelaporan komersial.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi Grup mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

Terkadang sulit untuk mengukur secara andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa dan status izin konstruksi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Lease (Continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

p. Investment Properties

Investment properties are measured on cost model and then fair value model. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties if the recognition criteria are met and excludes the daily costs on their usage.

Investment properties consist of land and building controlled by the Group which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities.

The Group have revalued its investment property. Revaluation of investment property is not for tax purposes but only for commercial reporting.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment properties that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment properties under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the Group expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.

Reliably measuring the fair value of investment properties under construction can be challenging at times. To evaluate the feasibility of accurately assessing the fair value of these properties, the Management considers several factors. These factors include provisions outlined in construction contracts, the stage of completion, whether the property is considered standard (commonly found in the market) or non-standard, the reliability of incoming cash flows after completion, specific development risks associated with the property, experience with similar construction projects and the status of construction permits.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

q. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar ditetapkan berdasarkan harga pasar aktif, dan dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan dalam karakteristik, lokasi, atau kondisi aset. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal posisi keuangan oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Perubahan nilai wajar diakui di laba rugi. Properti investasi berhenti diakui ketika dilepas.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Jika properti yang digunakan pemilik berubah menjadi properti investasi yang akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, maka entitas menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap" untuk properti yang dimiliki dan PSAK 116, "Sewa" untuk properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna sampai dengan tanggal perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan selisih pada tanggal tersebut antara jumlah tercatat properti berdasarkan PSAK 216 atau PSAK 116 dan nilai wajarnya dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan PSAK 216.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

q. Investment Properties (Continued)

The fair value is determined based on active market prices, and being adjusted with differences in the characteristics, location, or condition of the asset, if any. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as of the financial position date by professional appraiser who hold recognized and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognized in the profit or loss. Investment properties are derecognized when they have been disposed.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

Transfer to investment properties is carried out if and only if there is a change of use as indicated by the end of use by the owner, the commencement of operating leases to other parties or the completion of construction or development. Transfer from investment properties are carried out if and only if there is a change of use as indicated by the commencement of owner use or commencement of development for sale.

If an owner-occupied from investment property becomes an investment property that will carried at fair value an entity shall apply PSAK 216, "Fixed Assets" for owned property and PSAK 116, "Lease" for property held by a lease as a right-of-use asset up to the date of change in use. The entity shall treat any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with PSAK 216 or PSAK 116 and its fair value in the same way as a revaluation in accordance with PSAK 216.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dapat dianggap memiliki masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset takberwujud. Aset takberwujud Grup memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola yang diharapkan dari konsumsi manfaat ekonomi masa depan aset takberwujud tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode yang sesuai dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya sesuai dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat tidak terbatas terus mendukung. Jika tidak ada perubahan, masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset Grup juga dialokasikan ke masing masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

r. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets including capitalized development cost are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed either restricted or unrestricted. Intangible assets with restricted lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that intangible assets may be impaired. The Group intangible assets have estimated useful live of 5 years.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are recorded by changing the amortization period or method as appropriate and are treated as changes in accounting estimates. The amortization of intangible assets with definite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to definite is made on a prospective basis. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

s. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan aset tak berwujud yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun dan ketika terdapat indikasi penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

t. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

s. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset may be impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

t. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

t. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal

u. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

v. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

t. Financial Liabilities (Continued)

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

u. Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

v. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

v. Pinjaman (Lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

w. Biaya Pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dibangun. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

v. Borrowings (Continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing cost are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognized in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

w. Borrowing Cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying assets, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

y. Imbalan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Grup disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 6/2023, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai UU lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai “Pengatribusian imbalan pada periode jasa” dan oleh karena itu Grup mengubah kebijakan terkait dengan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 219 “Imbalan Kerja” mengikuti pola fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Program Iuran Pasti

Iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana iuran tersebut terkait.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

x. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) as a result if because of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits can be made to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

y. Employee Benefits

In accordance with Government Regulation No. 35 of 2021 for Law Number 11 of 2020 (Job Creation Law) promulgated in November 2020, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the Group is required to provide pension benefits at least as much as the pension benefits stipulated in Law 6/2023, which is essentially a defined benefit plan. If the pension benefits under the Law are greater than the existing pension plan, the difference is recognized as part of the pension benefit liability.

In April 2022, Financial Accounting Standard Boards – Indonesian Institute of Accountant (“FASB-IIA”) published a press release regarding “Attributing benefit to periods of service” and accordingly the Group changed the policy related to attributing benefit to periods of service in accordance with the provisions in PSAK No. 219 “Employee Benefit” following the general fact pattern of pension programs based on the Labor Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

Defined Contribution Program

Defined contributions for pension plans are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the contributions are related.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan; dikurangi
- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit yang didiskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui; dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga); dan
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laba rugi dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

Manfaat Jasa Jangka Panjang Lain

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

y. Employee Benefits (Continued)

Defined Benefit Plan

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at:

- The fair value of plan assets at the reporting date; less
- Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted to its present value using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus
- Unrecognized past service costs; less
- The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.

Remeasurements of the net defined benefit obligation are recognized directly within equity. The remeasurements include:

- Actuarial gains and losses;
- Return on plan assets (interest excluded); and
- Any asset ceiling effects (interest excluded).

Service costs are recognized in profit or loss and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

Net interest expense (income) is recognized in the profit or loss and is calculated by applying a discount rate to measure the defined liability (asset) at the beginning of the annual period to the payment of benefits during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognized in the period in which the settlement occurs.

Other Long-term Service Benefits

Other employee benefits that are expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

Other employee benefits that are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected unit credit method and then discounted using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to settlement.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

z. Distribusi Laba

Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 117 tanggal 20 Juni 1995, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk cadangan dan dividen, (persentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

aa. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui menggunakan 5 langkah:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

z. Profit Distribution

According to the Articles of Association through Deed No. 117 dated June 20, 1995, share of net profit after tax is used for reserves and dividends (the percentage is set each year in the General Meeting of Shareholders (GMS)).

aa. Revenue and Expenses Recognition

Revenue Recognition

Revenue is recognized using the 5-step assessment:

- 1) Identify contract(s) with a customer.
- 2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
- 3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
- 4) Allocate the transaction price to each performance obligation based on the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.
- 5) Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

aa. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Pendapatan Surat Pos dan Paket Pos

Pendapatan dari surat pos dan paket pos yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan surat pos dan paket pos yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan diakui pada suatu waktu pada saat surat atau paket diserahkan di *front end* untuk dilakukan pemrosesan dan pengiriman.

Pendapatan Ritel dan Properti

Pendapatan ritel dan properti yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa penjualan ritel dan jasa sewa properti yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan Logistik

Pendapatan logistik yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan kiriman jumbo dan pergudangan.

Pendapatan logistik diakui ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan Jasa Keuangan

Pendapatan jasa keuangan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan pospay dan jasa keuangan lainnya yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

ab. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui di dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak tersebut terkait dengan unsur-unsur yang terkait di dalam penghasilan komprehensif lain atau terkait langsung di dalam ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing di dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di dalam ekuitas.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

aa. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Revenue Recognition (Continued)

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Revenue from Post Mail and Parcel

Revenue from post mail and parcel is gross inflow from economic benefits which arise from post mail and parcel services which are the Group normal operation activity.

Revenue is recognized at point in time when mail and parcel is handed over to the front end for processing and delivery.

Revenue from Retail & Property

Revenue from retail and property is gross inflow from economic benefit which arise from retail sales and property lease which is the Group's, normal operation activity.

Revenue from Logistic

Revenue from logistic is gross inflow from economic benefit which arises from jumbo shipping services and warehousing.

Revenue from logistic recognized when the Group has fulfilled its performance obligations by transferring goods promised to customers.

Revenue from Financial Services

Revenue from financial services is gross inflow from economic benefit which arise from pospay and other financial services which is the Group's normal operation activity.

Expenses Recognition

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

ab. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognise in other comprehensive income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

ab. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada maupun tagihan dari fiskus terkait dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya yang belum dibayar pada akhir setiap periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal terkait berdasarkan laba kena pajak periode tersebut. Seluruh beban aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai unsur beban pajak penghasilan di dalam laba rugi.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan diakui sebagai bagian dari Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - periode berjalan, sedangkan untuk SKP selain PPh Badan diakui dalam beban lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditanggungan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode laporan posisi keuangan pada perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya didalam laporan keuangan konsolidasian. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan laba kena pajak di masa depan akan timbul dimana perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan. Liabilitas kena pajak diakui bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa depan seperti akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasi juga diakui selama realisasi manfaat tersebut kemungkinan terjadi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (1) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan (2) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba/rugi pajak.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap periode pelaporan dan dikurangkan selama tidak terdapat kemungkinan laba kena pajak yang cukup akan timbul untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dinilai ulang setiap periode pelaporan dan diakui sepanjang terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memulihkan aset pajak tangguhan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

ab. Taxation (Continued)

Current Tax

The current income tax charge is calculated based on the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period that are unpaid at the end of each reporting period date. Assets and/or liabilities are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a Tax Assessment Letter (SKP) of Corporate Income Tax are recognized as part of Income Tax Benefit (Expense) – current, while other SKP is recognized as part of other expenses of the current period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

Deferred Tax

Deferred income tax assets and liabilities are recognized using the balance sheet method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits such as the carry-forward of unused tax losses are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except for the deferred tax liability arising from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction that is: (1) not a business combination; and (2) at the time of the transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed each reporting period and reduced to the extent that it is not probable that sufficient taxable profit will arise to utilize part or all of the deferred tax assets. Unrecognized deferred tax assets are reassessed each reporting period and recognized to the extent that it is probable that future taxable income will recover the deferred tax assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

ab. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset/liabilitas pajak tangguhan diselesaikan/dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset dan liabilitas pajak penghasilan ditangguhkan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan maupun entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda dimana terdapat intensi untuk menyelesaikan saldo pada basis yang sama.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari unsur beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

ac. Persediaan Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari ruko yang siap dijual dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dalam proses konstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas, pengembangan real estat dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya pra-perolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat;
- Biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh; dan
- Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan yang dijual atau dialihkan sehubungan dengan penjualan unit.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

ab. Taxation (Continued)

Deferred Tax (Continued)

The amount of the deferred tax asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax assets/liabilities are settled/recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group have a legally enforceable right to offset current tax assets against liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes charged by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Value Added Tax

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
2. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

ac. Real Estate Assets Inventories

Real estate assets consisting of shophouse available for sale and land under development are stated at cost or net realizable values, whichever is lower.

The cost of buildings under construction includes the cost of land that has been completed plus construction costs, other costs attributable to activities, real estate development and borrowing costs as well as being transferred to buildings ready for sale when they are completed and ready for sale.

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are:

- Land pre-acquisition costs;
- Land acquisition cost;
- Costs directly related to the project;
- Cost that are attributable to real estate development activities;
- Pre-acquisition costs of land which is not successfully acquired; and
- Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities in connection with the sale of units.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

ac. Persediaan Aset Real Estat

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.

Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

ad. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori pada setiap produk, yang menyerupai informasi segmen yang dilaporkan di periode sebelumnya. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

ae. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

af. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

ac. Real Estate Assets Inventories

Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.

Expenses which are not related to the development of real estate are charged to expense when incurred.

ad. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the key operating decision-maker. The key operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

An operating segment is a component of entity which:

- that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by key operating decision-maker to make decisions regarding the resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

The information used by the key operating decision-maker for the purpose of resource allocation and performance assessment is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment reported in the prior period. All transactions between segments have been eliminated.

ae. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. However, disclosure is not required if an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when there is possibility for inflow of economic benefits.

af. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

af. Modal Saham (Lanjutan)

Ketika Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

ag. Laba per Lembar Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan.

ah. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

ai. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode pelaporan yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika material. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

af. Share Capital (Continued)

Where the Group purchases the entity's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

ag. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year attributable to the owners of the parent company with the weighted average number of the outstanding issued and fully paid shares during the period.

ah. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

ai. Events After the Reporting Period

Events that occur after the reporting period that provide additional information about the Group financial position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Events that occur after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS**

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Critical Accounting Estimates and Assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

a. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

b. Ketidakpastian Eksposur Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak yang belum diakui harus diakui.

c. Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

a. The Use of Going Concern Assumption

In the process of applying the Group's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the consolidated financial statements on the assumption that the Group will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgement that has the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain. The Group's management considers that the Group has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

b. Uncertain Tax Exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded in the underestimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized taxes should be recognized.

c. Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

c. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 20.

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Non Keuangan

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset non-keuangan adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

e. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 116, "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

c. Employee Benefits (Continued)

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 20.

d. Estimating Useful Lives of Non-Financial Assets

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of non-financial assets are based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

e. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on PSAK 116, "Lease", which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa (Lanjutan)

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, Manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

f. Pengakuan Pendapatan Penjualan Properti

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Grup

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang

Saat mengukur KKE, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

e. Leases (Continued)

Since the Group could not readily determine the implicit rate, Management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are some number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

f. Revenue Recognition on Sales of Properties

Critical Judgements In Applying The Group's Accounting Policies

a. Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Group operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables

When measuring ECL, the Group uses reasonable and supportable forward looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan
Akuntansi Grup (Lanjutan)**

**b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang
(Lanjutan)**

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur KKE. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penyisihan penurunan nilai piutang usaha Grup adalah masing-masing sebesar Rp194.662.553.192 dan Rp222.097.356.333 (Catatan 7).

c. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup.

Tidak terdapat penurunan nilai tercatat cadangan nilai persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 8).

d. Penurunan Nilai atas Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan properti investasi Grup (Catatan 11 dan 12)

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**Critical Judgements In Applying The Group's Accounting
Policies (Continued)**

**b. Estimating Allowance for Impairment Losses on
Receivables (Continued)**

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

As of December 31, 2024 and 2023, allowance for impairment on the Group's receivables amounting to Rp194,662,553,192 and Rp222,097,356,333 (Note 7).

c. Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on future estimated inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations.

There were no allowance for impairment inventory as of December 31, 2024 and 2023 (Note 8).

d. Impairment of Fixed Assets and Investment Properties

The useful life of each item of the Group's fixed assets and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

As of December 31, 2024 and 2023, there was no allowance for impairment losses recognized in the Group fixed assets and investment properties (Notes 11 and 12).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan
Akuntansi Grup (Lanjutan)**

e. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

f. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**Critical Judgements In Applying The Group's Accounting
Policies (Continued)**

e. Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f. Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters are different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

g. Realization of Deferred Tax Assets

The Group conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allow to use all or part of the deferred tax assets. The Group's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan
Akuntansi Grup (Lanjutan)**

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

h. Provisi dan Kontinjensi

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Grup tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**5. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL
(LPU)**

Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan pos atas penugasan dari pemerintah yang disebut Bantuan Operasional LPU (Layanan Pos Universal) yang sebelumnya pada tahun 2016 disebut kompensasi (subsidi) atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana LPU Pos untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun/ Year	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ The Handover of Budget Execution Document	Tanggal/ Date	Jumlah/ Total
2024	SP DIPA-999.08.1.984526/2024	29 Desember/ December 29, 2023	369.802.535.000
2023	SP DIPA-999.08.1.984526/2023	30 Desember/ December 30, 2022	378.269.521.000

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 dan PKS.352/DIRUT/1223 tanggal Desember 29, 2023 tentang Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Anggaran 2024. Pagu besaran Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU Tahun anggaran 2024 sebesar Rp369.802.535.000.

Pembayaran atas penggantian Bantuan Operasional (BO) LPU dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi secara bertahap per triwulan pada awal tahun 2023. Namun berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, diubah menjadi per bulan sejak periode April 2023. Rincian penerimaan dana LPU periode 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**Critical Judgements In Applying The Group's Accounting
Policies (Continued)**

g. Realization of Deferred Tax Assets (Continued)

The estimation is based on the achievement of the Group in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Group can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

h. Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Group has not recognized any provision as of December 31, 2024 and 2023.

**5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE
(UPS) ASSIGNMENT**

In connection with the implementation of postal services on assignments from the government called UPS Operational Assistance (Universal Postal Service) which previously in 2016 was called compensation (subsidies) for the Implementation of Postal General Service Obligations (KPU). Based on the Letter of Ratification of the Budget Implementation List (DIPA), the amount of Postal UPS funds for the 2024 and 2023 fiscal years is as follows:

Based on Cooperation Agreement with the Ministry of Communication and Information Number 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 and PKS.352/DIRUT/1223 dated December 29, 2023 concerning Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services for Fiscal Year 2024. The ceiling amount of the Operational Subsidy for the Implementation of LPU for fiscal year 2024 is Rp369,802,535,000.

Payment for the replacement of UPS Operational Assistance (OA) was made by the Ministry of Communication and Information in quarterly installments at the beginning of 2023. However, based on an agreement with the Ministry of Communication and Information, it was changed to monthly from the period of April 2023. Details of UPS fund receipts on December 31, 2024 and 2023, are as follows:

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. DANA PENGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL
(LPU) (Lanjutan)**

**5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE
(UPS) ASSIGNMENT (Continued)**

2024			
Uraian	Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt	Jumlah/ Total	Description
Periode Januari 2024	20 Maret/March 2024	24.171.690.971	Period January 2024
Periode Februari 2024	27 Maret/March 2024	24.924.147.089	Period February 2024
Periode Maret 2024	13 Mei/May 2024	56.761.498.805	Period March 2024
Periode April 2024	31 Mei/May 2024	24.606.837.712	Period April 2024
Periode Mei 2024	28 Juni/June 2024	25.416.597.775	Period May 2024
Periode Juni 2024	6 Agustus/August 2024	42.787.908.321	Period June 2024
Periode Juli 2024	27 Agustus/August 2024	25.695.795.434	Period July 2024
Periode Agustus 2024	25 September/September 2024	24.657.954.522	Period August 2024
Periode September 2024	7 November/November 2024	43.963.623.541	Period September 2024
Periode Oktober 2024	28 November/November 2024	19.297.802.427	Period October 2024
Periode November dan Desember 2024	19 Desember/December 2024	54.560.973.884	Period November and December 2024
Jumlah		366.844.830.481	Total

2023			
Uraian	Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt	Jumlah/ Total	Description
Triwulan I/ 2023	31 Mei/ May 2023	73.764.318.244	Quarter I/ 2023
Periode April 2023	27 Juni/ June 2023	31.072.527.610	Period April 2023
Periode Mei 2023	27 Juni/ June 2023	20.382.793.802	Period May 2023
Periode Juni 2023	11 Agustus/ August 2023	38.588.625.318	Period June 2023
Periode Juli 2023	29 Agustus/ August 2023	20.883.437.302	Period July 2023
Periode Agustus 2023	11 September/ September 2023	24.711.633.474	Period August 2023
Periode September 2023	16 November/ November 2023	47.396.169.464	Period September 2023
Periode Oktober 2023	8 Desember/ December 2023	27.155.485.722	Period October 2023
Periode November dan Desember 2023	19 Desember/ December 2023	82.165.593.988	Period November and December 2023
Jumlah		366.120.584.924	Total

Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana LPU tersebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil/kantor pos cabang luar kota (KPCLK).

The basis calculation for the proposal of the UPS funds receipt is by calculating and accumulating all the losses from the out-of-town branch post offices (KPCLK).

Dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal belum semua beban terakomodir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kepkominfo Nomor 442 tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal tanggal 26 September 2024.

In the implementation of Universal Postal Services, not all expenses have been accommodated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 22 of 2013 which is adjusted to the Decree of the Minister of Communication and Information Technology No. 442 of 2024 concerning Guidelines for Calculation and Supervision and Payment of Operational Subsidies for Universal Postal Services dated September 26, 2024.

Dalam perhitungan penggantian penugasan BO–LPU tahun 2024 dan 2023, formula perhitungan yaitu dengan menyelisihkan biaya operasional dengan pendapatan. Adapun komponen biaya operasional meliputi biaya sumber daya manusia, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan sedangkan pendapatan meliputi pendapatan Layanan Pos Universal, pos komersial dan layanan transaksi keuangan.

In the calculation of the replacement of OA– UPS assignments in 2024 and 2023, the calculation formula is by sorting operational cost with revenue. The components of operating costs include human resource cost, operating cost, maintenance cost, administrative and general cost, and depreciation cost while revenue includes Universal Postal Service revenue, commercial post and financial transaction services.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. DANA PENGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL
(LPU) (Lanjutan)**

Terkait dengan penggantian biaya pegawai untuk pegawai di kantor LPU hanya dihitung maksimal 2 orang, sedangkan untuk biaya operasional atas beban *switching*, beban sewa atas *software* dikeluarkan dalam perhitungan penggantian biaya operasional. Selanjutnya untuk biaya pengadaan prangko dan biaya alat tulis kantor yang sebelumnya diperhitungkan dengan biaya *joint cost* diubah menjadi biaya *at cost* berdasarkan penggunaan pemakaian di Kantor Pos LPU.

**5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE
(UPS) ASSIGNMENT (Continued)**

Regarding the replacement of employee costs for employees at the UPS office, only a maximum of 2 persons is considered, while the operational expenses related to switching and software rental costs are included in the calculation of operational cost replacement. Furthermore, the expenses for stamp procurement and office stationery previously calculated as joint costs are now changed to cost-at based on their usage at the UPS Post Office.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas - Rupiah	1.252.356.877.770	1.713.766.049.361	Cash - Rupiah
Bank - Rupiah			Banks - Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Parties (Note 27)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	173.105.253.245	45.028.912.392	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.234.069.558	525.044.625.494	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.554.869.888	36.259.405.362	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.327.366.609	23.196.151.363	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.714.267.312	8.437.571.702	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen Pos	1.278.685.910	1.296.789.387	PT Bank Mandiri Taspen Pos
Sub Jumlah	319.214.512.522	639.263.455.700	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Pembangunan Daerah	54.500.002.626	29.610.135.092	PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank CCB Indonesia Tbk	10.174.490.729	-	PT Bank CCB Indonesia Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.901.836.001	-	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.389.613.581	4.949.670.531	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.105.155.614	3.036.983.840	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah	3.025.625.174	4.050.820.081	PT Bank Panin Dubai Syariah
PT Bank KB Bukopin Tbk	2.400.597.594	3.124.817.010	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank BJB Syariah	2.187.890.226	-	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Woori Saudara Tbk	2.175.601.752	2.228.278.072	PT Bank Woori Saudara Tbk
PT Bank DKI	463.222.532	412.110.165	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk	379.605.132	382.313.143	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	321.397.090	236.383.625	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT CIMB Niaga Syariah	208.937.451	209.427.688	PT CIMB Niaga Syariah
PT Bank Permata Tbk	180.671.800	183.875.100	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	176.475.409	120.811.389	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	138.629.475	2.018.026.489	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	121.231.036	13.580.224	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	108.382.644	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
Bank Lainnya	127.097.659	114.705.301	Others Banks
Sub Jumlah	87.086.463.525	50.691.937.750	Sub Total
Jumlah Kas dan Bank Rupiah	1.658.657.853.817	2.403.721.442.811	Total Cash and Bank Rupiah
Bank - Valuta Asing			Banks - Foreign Currencies
Pihak Berelasi (Catatan 26)			Related Parties (Note 26)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY	89.743.106.400	121.333.526.650	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD	25.623.978.252	8.488.127.760	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR	9.788.400.724	3.516.858.623	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss	2.033.788.701	1.134.429.150	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SAR	16.099.248	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SAR
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD	-	659.971.175	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP	-	563.785.928	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	279.646	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	127.205.373.325	135.696.978.932	Sub Total
Sub Jumlah Bank	533.506.349.372	825.652.372.382	Sub Total Bank
Deposito			Time Deposit
Pihak Berelasi (Catatan 26)			Related Parties (Note 26)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105.000.000.000	35.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	43.000.000.000	18.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20.000.000.000	5.500.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	49.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank IBK Indonesia Tbk	75.000.000.000	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank BJB Syariah	22.000.000.000	6.500.000.000	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	7.500.000.000	-	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
Sub Jumlah Deposito	277.500.000.000	114.500.000.000	Sub Total Time Deposit
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Total Cash and Cash Equivalents

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Kas dan setara kas Grup terdiri dari:

	2024	2023
Dana Internal Perusahaan	1.884.481.398.965	1.619.652.583.480
Dana Pihak Ketiga		
Giropos	124.426.689.411	927.364.642.260
Jasa Pospay	23.001.054.970	36.042.228.624
Deposito	18.818.346.150	52.084.422.720
Wesel Pos	7.839.919.019	12.550.456.902
Jaminan Proyek	4.795.818.627	6.224.087.757
Sub Jumlah	178.881.828.177	1.034.265.838.263
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

The Group's cash and cash equivalent funds consist of:

The Company's Internal Fund
Third Parties Funds
Giropos Services
Pospay Services
Deposits
Wesel Pos
Project Guarantee
Sub Total
Total Cash and Cash Equivalents

Tingkat suku bunga efektif deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The effective interest rate for time deposits are as follows:

	2024	2023
Tingkat Suku Bunga Deposito		
Berjangka per Tahun		
PT Bank IBK Indonesia Tbk	3,98%	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,00%	4,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,25% - 5,75%	4,00% - 4,60%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,50% - 5,75%	4,5% - 5,75%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,45% - 6,00%	5,25% - 5,45%
PT Bank BJB Syariah	5,25% - 6,00%	5,25% - 6,00%
PT Bank Tabungan Negara Syariah	5,65% - 5,85%	-
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	5,50% - 5,85%	-

Interest Rates per Annum of
Time Deposit

PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BJB Syariah
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Pada akhir periode pelaporan manajemen menempatkan dana dalam bentuk *Deposit On Call* (DOC) dengan tingkat suku bunga 3,25% - 6% pertahun.

At the end of the period management placed funds in the form of *Deposit On Call* (DOC) with an interest rate of 3.25% - 6% per annum.

Grup menandatangani perjanjian kerja sama tentang jasa asuransi gedung dan barang inventaris serta asuransi kas (*Cash in Transit*, *Cash in Safe* dan *Cash in Cashier Box*) tahun 2023 dengan PT Asuransi Tri Pakarta nomor perjanjian kerjasama: PKS364/DIR1/1223 dan 128/DIR/PKS/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam perjanjian tersebut terdapat Fidelity Guarantee pada jaminan CIT, CIS, dan CICB yaitu perluasan jaminan atas kerugian atau kehilangan keuangan yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kelalaian, penipuan, ketidakjujuran, kesalahan, kecurangan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak Grup atau orang yang bekerja dibawah kekuasaan Grup dengan limit jaminan Rp60.000.000.

The Group signed a cooperation agreement on building and inventory insurance services and cash insurance (*Cash in Transit*, *Cash in Safe* and *Cash in Cashier Box*) in 2023 with PT Asuransi Tri Pakarta cooperation agreement number: PKS364/DIR1/1223 and 128/DIR/PKS/2023 dated December 27, 2023 which is valid from January 1, 2024 to December 31, 2024. In the agreement there is a Fidelity Guarantee on CIT, CIS, and CICB guarantees, namely an expansion of the guarantee for financial losses or losses that are a direct or indirect result of negligence, fraud, dishonesty, errors, fraud and embezzlement committed by the Group or people working under the authority of the Group with a guarantee limit of Rp60,000,000.

Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan bermotor maksimal Rp30.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan roda dua maksimal Rp500.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kapal motor maksimal Rp3.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang reguler maksimal Rp5.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang carter reguler maksimal Rp15.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash In Safe* di Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang (KC) maksimal Rp198.587.223.772.

Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a motorized vehicle up to Rp30,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using two-wheeled vehicles up to Rp500,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a motorboat up to Rp3,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a regular flight up to of Rp.5,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a regular charter flight is up to Rp15,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Safe* insurance at Main Branch Office (KCU) and Branch Office (KC) with maximum of Rp198,587,223,772.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Nilai pertanggungan Asuransi Cash in Safe di Loker/PKK/LE maksimal Rp31.616.461.771. Nilai pertanggungan Asuransi Cash In Cashier Box di KCU, KC dan KCP maksimal Rp1.284.540.075.

Jika nilai uang yang dikirim melebihi limit diatas maka Grup wajib memberitahukan kepada PT Asuramsi Tri Pakarta melalui sarana tercepat.

Nilai premi yang dibayarkan Grup untuk asuransi gedung dan kas ini adalah sebesar Rp3.750.000.000 dengan pembayaran dibagi menjadi 2 kali termin pembayaran/per semester.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 29.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Total sum insured Cash in Safe insurance at Counter/PKK/LE with maximum of Rp31,616,461,771. Total sum insured Cash In Cashier Box insurance at KCU, KC and KCP with maximum of Rp1,284,540,075.

If the value of money sent exceeds the above limit then the Group must notify Bumida through the fastest means.

The premium value paid by the Group for building and cash insurance is Rp3,750,000,000 with the payment divided into 2 times the payment term/per semester.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents is disclosed in Note 29.

7. PIUTANG USAHA – BERSIH

	2024	2023
Piutang Dalam Negeri	418.299.407.538	484.170.183.340
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120
Sub Jumlah	531.593.829.126	607.499.753.460
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(194.662.553.192)	(222.097.356.333)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	336.931.275.934	385.402.397.127

Domestic Trade Receivables
 Foreign Trade Receivables
 Sub Total
 Allowance for Impairment Losses
 Total Trade Receivables - Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023
Saldo Awal	(222.097.356.333)	(154.742.738.246)
Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Berjalan	32.912.796.801	11.594.071.777
Reklasifikasi Piutang Usaha		
Pencadangan Piutang Usaha	(5.477.993.660)	(78.948.689.864)
Saldo Akhir	(194.662.553.192)	(222.097.356.333)

Beginning Balance
 Recovery of Impairment Losses for the Year
 Trade Receivables Reclassification
 Allowance for Trade Receivables
 Ending Balance

Umur piutang usaha dalam negeri per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Aging of domestic trade receivables as of December 31, 2024 and 2023, are as follows

	2024	2023
Piutang Surat Paket, Ritel		
Properti dan Jasa Keuangan		
Sampai dengan 30 hari	80.152.675.578	69.227.704.379
31-60 hari	6.027.988.719	25.499.906.922
61-180 hari	25.630.727.551	12.737.608.014
181-270 hari	34.740.496.720	13.938.373.851
271-360 hari	7.130.815.342	4.305.826.125
Diatas 1 tahun	84.102.888.964	79.462.758.089
Sub Jumlah	237.785.592.874	205.172.177.380
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(127.573.974.492)	(112.404.300.528)
Jumlah Bersih	110.211.618.382	92.767.876.852
Piutang Logistik		
Sampai dengan 30 hari	38.014.555.166	100.680.647.802
31-60 hari	11.105.840.326	83.119.254.453
61-180 hari	14.884.795.308	27.795.146.443
181-270 hari	8.272.392.348	7.302.675.091
271-360 hari	55.524.368.898	13.872.812.204
Diatas 1 tahun	49.342.670.164	46.227.469.967
Sub Jumlah	177.144.622.210	278.998.005.960
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(53.015.589.929)	(50.641.553.722)
Jumlah Bersih	124.129.032.281	228.356.452.238

Trade Receivables from Mail & Parcel Retail, Property and Financial Service
 Up to 30 days
 31-60 days
 61-180 days
 181-270 days
 271-360 days
 More than 1 year
 Sub Total
 Allowance for Impairment Losses
 Net Total
 Trade Receivable from Logistics
 Up to 30 days
 31-60 days
 61-180 days
 181-270 days
 271-360 days
 More than 1 year
 Sub Total
 Allowance for Impairment Losses
 Net Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Grup membedakan umur piutang usaha logistik dan non-logistik (ritel) dikarenakan jatuh tempo pelunasan yang berbeda. Jatuh tempo piutang logistik adalah 3 bulan, dan untuk piutang usaha non-logistik jatuh tempo tagihan adalah 1 bulan.

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	76.196.780.944	43.417.781.956
2-3 tahun	8.557.213.330	8.174.071.928
3-4 tahun	5.828.275.792	14.690.230.136
Diatas 4 tahun	22.712.151.522	57.047.486.100
Sub Jumlah	113.294.421.588	123.329.570.120
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.072.988.771)	(59.051.502.083)
Jumlah Bersih	99.221.432.817	64.278.068.037

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	4.144.474,00	2.816.410,35
2-3 tahun	529.465,00	530.233,00
3-4 tahun	360.616,00	952.921,00
Diatas 4 tahun	1.975.370,85	3.700.537,50
Sub Jumlah	7.009.925,85	8.000.101,85
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(870.745,50)	(3.830.533,35)
Jumlah Bersih	13.149.106,20	12.169.670,35

Piutang usaha luar negeri merupakan piutang yang timbul dari tambahan biaya penerusan kiriman barang antar negara, dimana atas kiriman barang tersebut diatur dibawah regulasi UPU.

Lamanya umur piutang usaha luar negeri dikarena proses persetujuan (*accepted*) atas piutang yang diklaim memerlukan waktu maksimal 12 bulan.

Saldo bersih transaksi pos internasional per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120
Utang Luar Negeri	(129.321.212.720)	(137.458.761.366)
Jumlah	(16.026.791.132)	(14.129.191.246)

Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana Grup telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut.

7. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

The Group differentiates the age of logistics and non-logistics (retail) trade receivables due to different repayment maturities. The maturity of logistics trade receivables is 3 months, and for non-logistics trade receivable the maturity is 1 month.

The aging of foreign trade receivables as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	76.196.780.944	43.417.781.956
2-3 tahun	8.557.213.330	8.174.071.928
3-4 tahun	5.828.275.792	14.690.230.136
Diatas 4 tahun	22.712.151.522	57.047.486.100
Sub Total	113.294.421.588	123.329.570.120
Allowance for Impairment Losses	(14.072.988.771)	(59.051.502.083)
Net Total	99.221.432.817	64.278.068.037

Aging of overseas trade receivable as of December 31, 2024 and 2023 is based on USD currency are as follows:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	4.144.474,00	2.816.410,35
2-3 tahun	529.465,00	530.233,00
3-4 tahun	360.616,00	952.921,00
Diatas 4 tahun	1.975.370,85	3.700.537,50
Sub Total	7.009.925,85	8.000.101,85
Allowance for Impairment Losses	(870.745,50)	(3.830.533,35)
Net Total	13.149.106,20	12.169.670,35

Receivables from foreign trade represent receivables arising from additional fees for forwarding goods between countries, where the delivery of goods is regulated under UPU regulations.

The longevity of foreign trade receivables is due to the approval process (*accepted*) of the claimed receivables to take a maximum of 12 months.

Net balance of international transaction postal as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120
Utang Luar Negeri	(129.321.212.720)	(137.458.761.366)
Jumlah	(16.026.791.132)	(14.129.191.246)

As of December 31, 2024 and 2023 the Group has established a provision for impairment of trade receivables based on the level of historical decline collectively and the credit history of individual customers. The Group does not distinguish trade receivables from related parties (Government) and trade receivables from third parties in assessing the amounts due. Where the Group has examined the collection of Government receivables.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Dalam melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha khususnya untuk piutang luar negeri, Grup melakukan *offsetting* antara saldo piutang dan utang untuk negara yang sama, kemudian hasil piutang bersih tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan penyisihan atas piutang usaha. Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutang usaha dalam negeri, Grup menggunakan data historis (*roll rate*) dengan menambahkan beberapa indikator makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, REPO, *Credit Growth* dan GDP pada periode berjalan dengan mempertimbangkan industri sejenis.

Berdasarkan penelaahan terhadap kolektabilitas akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Piutang usaha Grup tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang disajikan pada Catatan 29.

7. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

In calculating the allowance of trade receivables, especially for foreign trade receivables, Group offsets between the balance of trade receivables and trade payables for the same country, then the net trade receivables are used as a basis for calculation of allowance for impairment losses of trade receivables. Meanwhile, the calculation of the allowance for the Group's domestic trade receivables uses historical data (*roll rate*) by adding several macroeconomic indicators, namely inflation rate, REPO, *Credit Growth* and GDP in the current period by considering similar industries.

Based on a review of the collectability of trade receivables at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment for receivables of Group is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables as of December 31, 2024 and 2023.

Trade receivables of the Group are not used as bank loan collateral.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of trade receivable is disclosed in Note 29.

8. PERSEDIAAN

	2024	2023
Persediaan Barang Dagangan		
Barang Dagangan	21.131.293.715	22.376.665.011
Tanah	2.448.928.603	8.205.056.500
Pengembangan Tanah	5.901.419.136	7.901.082.329
Persediaan Bahan Produksi	2.256.750.678	2.035.752.822
Sub Jumlah	31.738.392.132	40.518.556.662
Perlengkapan		
Formulir Serbaguna	2.662.612.431	2.570.460.031
Prangko	342.691.325	551.150.187
Sub Jumlah	3.005.303.756	3.121.610.218
Jumlah	34.743.695.888	43.640.166.880

Merchandise Inventories
Merchandise for Sale
Land
Land Development
Materials Inventory
Sub Total
Supplies
Multi Usage Forms
Stamps
Sub Total
Total

Barang dagangan merupakan persediaan atas prangko *definitif/tera* yang dicetak sebagai pengganti biaya kiriman surat. Jumlah tercatat berdasarkan nilai intrinsik atas keping prangko yang dicetak.

Tanah merupakan tanah milik PT Pos Properti Indonesia untuk keperluan proyek pengembangan kawasan hunian di daerah Muktiwari sebesar Rp8.205.056.500 dan Karang Bahagia sebesar Rp7.901.082.329. Dalam persediaan tanah terdapat material tanah yang dipergunakan untuk pengembangan hunian Karang Bahagia.

Pada tahun 2023, terdapat penanganan perkara perdata dengan Nomor 80/PDT.G/2023/PN.CKR sehubungan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materiil dalam pengembalian uang atas sisa lahan seluas ±5.232m2 yang belum diserahkan oleh pihak tergugat yakni PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya. Pada tanggal laporan keuangan ini, penanganan perkara masih dalam proses persidangan, dengan agenda persidangan adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak secara E-litigasi (Catatan 37).

Pengembangan tanah merupakan barang produksi dalam proses untuk proyek perumahan karang bahagia yang terdiri dari sertifikat, perijinan dan *advise*, raw material dan biaya pengurusan perijinan.

8. INVENTORIES

Merchandise is a stock of definitive stamps/marks that are printed as a substitute for the cost of sending letters. The carrying amount is based on the intrinsic value of the stamps printed.

The land is owned by PT Pos Properti Indonesia for the purposes of residential area development projects in the Muktiwari area amounting to Rp8,205,056,500 and Karang Bahagia amounting to Rp7,901,082,329. In the land inventory, there is material which is used for the development of the Karang Bahagia residence.

In 2023, there was a civil case with number 80/PDT.G/2023/PN.CKR in connection with the payment of compensation for material losses in return for the remaining land area of ± 5,232m2 that had not been submitted by the defendants, namely PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya. As of the reporting period, the case is still in the process of trial, with the agenda of the trial is submission of conclusions from the parties in E-litigation (Note 37).

Land development is a production item in process for the Karang Selamat housing project which consists of certificates, permits and *advice*, raw materials and licensing processing costs.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Tanah Hunian Karang Bahagia yang masih dalam tahap pengembangan terletak di Kp. Pulo Pisang, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Persediaan bahan produksi merupakan persediaan atas perlengkapan pos seperti kantung pos, *straping band*, helm dan jas pengantar.

Pada tahun 2024 dan 2023, Point Residence berhasil menjual hunian masing-masing sebanyak 21 dan 65 unit.

Prangko filateli merupakan stok persediaan atas prangko filateli, benda filateli dan prangko prisma. Sedangkan perlengkapan prangko definitif merupakan stok persediaan atas prangko tera yang disetarakan sebagai penggantian biaya kirim.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

8. INVENTORIES (Continued)

The Karang Bahagia Residential Land which is still under development is located at Kp. Pulo Pisang, Karanganyar Village, Karang Bahagia District, Bekasi Regency.

Materials inventory is a supply of postal equipment such as post bags, straping bands, helmets and introductory suits.

In 2024 and 2023, Point Residence managed to sell 21 and 65 units of residences respectively.

Definitive stamp is a stock of philatelic stamps, philatelic objects and prism stamps. While definitive stamp equipment is a stock of stamps equivalent to tera stamps as reimbursement of shipping costs.

Management believes that as of December 31, 2024 and 2023 there were no indications of impairment of inventories.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	2024	2023	
Pendistribusian Bantuan Logistik	648.690.448.678	493.626.448.174	Distribution of Logistics Assistance
Penyaluran Bantuan Sosial	249.452.037.166	175.623.282.020	Distribution of Social Assistance
Paket dan Surat Pos Domestik	46.149.882.734	172.975.502.098	Domestic Mail and Parcels
Properti	23.522.322.217	14.325.109.120	Properties
Materai	21.968.947.798	24.601.648.074	Stamps
Paket dan Surat Pos Internasional	18.744.720.183	33.975.728.086	International Mail and Parcels
Layanan Pos Persepsi	7.295.095.495	15.199.822.410	Postal Service Perception
Bunga Deposito Berjangka	1.014.023.779	582.061.003	Time Deposit Interest
Jumlah	1.016.837.478.050	930.909.600.985	Total

Pendistribusian bantuan logistik merupakan bentuk kerja sama penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog untuk periode tahun 2024 dan 2023. Selain itu, Perusahaan bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terkait dengan penyaluran bantuan stunting kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, Perusahaan bekerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah yang terbagi dalam 2 tahapan pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1-2 masing-masing sebesar Rp744.128.773.620 dan Rp347.670.817.320. Realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 13.355.415 Penerima Bantuan Pangan untuk 6 alokasi di Tahap 1 dan 13.089.056 Penerima Bantuan Pangan untuk 3 alokasi di Tahap 2.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan penagihan 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dan termin 1 atau 40% dari nilai kontrak untuk tahap 2 dengan total tagihan sebesar Rp913.335.979.792.

Penyaluran bantuan sosial merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Sosial terkait dengan penyaluran bantuan yang bersifat tunai kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pendapatan yang masih harus diterima atas pendapatan paket dan surat pos merupakan akrual atas transaksi kredit atas pengiriman barang dari pelanggan.

The distribution of logistical assistance is a form of cooperation in distributing government rice reserve assistance in collaboration with Perum Bulog for the 2024 and 2023 period. In addition, the Company is collaborating with PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) regarding the distribution of stunting assistance to the community.

In 2024, the Company collaborated with Perum Bulog for the distribution of Government Rice Reserve Food Assistance which is divided into 2 distribution stages with contract values for stages 1-2 of Rp744,128,773,620 and Rp347,670,817,320 respectively. The work realization until December 31, 2024 is 13,355,415 Food Assistance Recipients for 6 allocations in Phase 1 and 13,089,056 Food Assistance Recipients for 3 allocations in Phase 2.

As of December 31, 2024, the Company has billed 95% of the contract value for phase 1 and term 1 or 40% of the contract value for phase 2 with a total bill of Rp913,335,979,792.

The distribution of social assistance is a form of cooperation with the Ministry of Social Affairs regarding the distribution of cash assistance to underprivileged communities.

The accrued revenue from parcel and postal mail revenue is an accrual for credit transactions for delivery of goods from customers.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
(Lanjutan)**

Pendapatan atas layanan pos persepsi merupakan akrual atas pendapatan penerimaan jasa layanan pembayaran pajak yang ditagihkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pekerjaan distribusi dan penjualan materai tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor PKS: PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp294.471.900.000 (termasuk pajak). Akrual atas pendapatan materai merupakan akrual untuk transaksi penjualan materai selama bulan Desember 2024.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pendapatan yang masih harus diterima sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 29.

Manajemen tidak melakukan pencadangan atas penurunan nilai pendapatan yang masih harus diterima.

9. ACCRUED REVENUES (Continued)

Revenue from postal perception services is an accrual of revenue from tax payment services billed to the Directorate General of State Treasury.

On December 29, 2023, the Company collaborated with the Directorate General of Taxes regarding the work of distributing and selling sticky stamps for the Directorate General of Taxes for the 2024 Fiscal Year with PKS Number: PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023. The agreed contract value is Rp294,471,900,000 (including tax). Accrued revenue of stamp represents accrued revenue of stamp for sales transactions during December 2024.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of accrued revenues is disclosed in Note 29.

Management does not make any provision for the impairment of accrued revenues.

10. ASET LANCAR LAINNYA

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan

	2024	2023
<i>Prefund</i>	1.327.563.072.752	467.708.900.284
Layanan Western Union	466.535.730.587	407.308.757.028
Layanan Jasa Pengiriman Uang		
Luar Negeri	209.141.839.474	-
Pembayaran PPOB	4.294.758.137	4.474.667.805
Deposit Agen Pos	3.423.911.621	667.401.089
Program Pembinaan Pelanggan		
<i>Point Reward</i>	305.506.422	305.506.422
<i>Settlement</i> Layanan Transaksi QRIS	274.456.009	274.456.009
Jumlah	2.011.539.275.002	880.739.688.637

Piutang layanan jasa keuangan merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran jasa pihak ketiga yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan. Piutang layanan jasa keuangan ini akan selesai dalam waktu 2-3 hari kerja setelah proses rekonsiliasi harian.

Prefunding merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran manfaat asuransi oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang dilakukan oleh Grup sebagai perantara.

Layanan *western union* merupakan layanan pembayaran wesel kemitraan luar negeri dimana Perusahaan memberikan layanan pembayaran kiriman uang dari luar negeri ke penerima di Indonesia. Kenaikan jumlah piutang layanan jasa keuangan atas *western union* disebabkan karena tingginya produksi transaksi pembayaran wesel *western union*.

Perusahaan telah menerima penggantian pembayaran layanan *western union* ini pada awal Januari 2025.

10. OTHER CURRENT ASSETS

a. Receivables from Financial Services

	2024	2023
<i>Prefund</i>	1.327.563.072.752	467.708.900.284
Western Union Services	466.535.730.587	407.308.757.028
Foreign Remittance Services		
Luar Negeri	209.141.839.474	-
PPOB Services	4.294.758.137	4.474.667.805
Postal Agent Deposit	3.423.911.621	667.401.089
Customer Program		
<i>Point Reward</i>	305.506.422	305.506.422
<i>Settlement of QRIS Services</i>	274.456.009	274.456.009
Total	2.011.539.275.002	880.739.688.637

Receivables from financial services represent the Group bills related to third parties payment services that have not been billed at the end of the reporting period. Receivables from financial services will be settled within 2-3 working days after the daily reconciliation process.

Prefunding is a Group bill related to insurance benefit payment services by PT Taspen (Persero) and PT Asabri (Persero) carried out by the Group as an intermediary.

The western union service is an overseas partnership remittance payment service where the Company provides remittance payment services from overseas to recipients in Indonesia. The increase in financial services receivable from western union was due to the high production of western union money order payment transactions.

The Company has received reimbursement for this western union service in early January 2025.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

10. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan (Lanjutan)

Layanan jasa pengiriman uang luar negeri merupakan proyek kemitraan atas pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, dimana Grup bekerja sama BCA, Transfast, dan BNI sebagai mitra *provider* dari luar negeri.

Deposit agenpos merupakan penerimaan dari agenpos yang belum diterima dan disetorkan pada akhir periode ke loket-loket kantor pos atas transaksi pada akhir bulan. Setoran agenpos diterima Grup pada H+1.

Settlement QRIS merupakan transaksi pembayaran non-kas atas transaksi loket yang dilakukan pelanggan melalui kode QR perbankan yang bekerjasama dengan Grup, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BNI. Penggantian atas transaksi QRIS adalah H+1 sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing *provider QRIS*.

a. Receivables from Financial Services (Continued)

The overseas money transfer service is a partnership project for sending money from overseas to Indonesia, where the Group collaborates with BCA, Transfast, and BNI as overseas *provider* partners.

Agenpos deposit is a receipt from the postal agent that has not been received and deposited at the end of the period to the post office counters for transactions at the end of the month. The postal agent deposit was received by the Group at D+1.

Settlement QRIS is a non-cash payment transaction for counter transactions by customers through banking QR codes in collaboration with the Group, including between Bank Mandiri and Bank BNI. Reimbursement of QRIS transactions is D+1 in accordance with the agreement of each QRIS *provider*.

b. Lainnya

b. Others

	2024	2023	
Piutang Karyawan			Employee Receivables
Kelalaian	4.456.672.791	5.492.158.226	Negligence
Kecurangan	30.031.608.966	11.244.728.213	Fraud
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.456.698.381)	(9.682.028.882)	Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah	15.031.583.376	7.054.857.557	Sub Total
Biaya Dibayar di Muka			Prepaid Expenses
Kompensasi Cuti Besar	287.385.480.435	234.806.998.514	Long Leave Compensation
Uang Muka Operasi	100.669.935.821	124.849.151.990	Operating Advances
Sewa Gedung	14.100.651.932	9.973.735.415	Building Rental
Sewa Rumah Pegawai	5.602.907.078	17.345.085.509	Employee Houses Rental
Premi Asuransi	4.400.905.154	2.583.384.449	Insurance Premium
Biaya Retensi Karyawan	494.758.563	916.190.475	Employee Retention Cost
Sewa Sarana Produksi			Lease of Production Facilities of
Operasi Layanan Keuangan	521.437.865	286.581.938	the Financial Services Operation
Pemasaran	98.020.400	166.370.500	Marketing
Basiswa Pendidikan	-	2.447.700.002	Education Scholarship
Lainnya	16.803.302.949	66.600.000	Others
Sub Jumlah	430.077.400.197	393.441.798.792	Sub Total
Aset Keuangan Lainnya	1.815.292.467.566	-	Other Financial Assets
Bank Garansi	78.168.505.504	77.002.299.152	Bank Guarantee
Gedung Siap Dijual	7.490.000	-	
Tanah Siap Dijual	703.177	703.177	Land Available for Sale
Persediaan Rusak	-	6.668.000	Damaged Inventory
Sub Jumlah	1.893.469.166.247	77.009.670.329	Sub Total
Jumlah	2.338.578.149.820	477.506.326.678	Total

Piutang karyawan merupakan hak tagih kepada karyawan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab yang terjadi akibat berkurangnya aset atau kekayaan Grup yang menjadi tanggung jawab karyawan, terdiri dari:

- Piutang kecurangan/kelalaian karyawan merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian karyawan berdasarkan pemeriksaan internal.

Piutang karyawan tidak digunakan sebagai jaminan utang Bank, tetapi Grup telah melakukan pencadangan penurunan nilai piutang pegawai sesuai dengan PSAK 109.

Employee receivable are amounts rightfully collectible from employees based on the statement of employee responsibility which consists of:

- *Fraud/negligence receivables* are receivables resulting from employees fraud/negligence which are determined based on internal examination.

The *employee receivables* are not used as collateral for the Bank loan, but the Group has reserved an allowance for impairment for employee receivables in accordance with PSAK 109.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Perusahaan bekerjasama dengan PT BRI Life dengan nomor PKS: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 untuk penyediaan asuransi jiwa beserta nilai investasi. Asuransi tersebut ditujukan untuk karyawan dan akan diterima manfaat setelah karyawan memasuki usia pensiun (maksimal di usia 54 tahun). Kompensasi cuti besar merupakan premi asuransi yang telah dibayarkan Perusahaan kepada PT BRI Life yang belum jatuh tempo karena karyawan Grup belum memasuki usia pensiun.

Uang muka operasi terdiri dari uang muka untuk talangan pembiayaan atas proyek dan talangan atas settlement layanan untuk transaksi *payment point*. Talangan pembiayaan atas proyek merupakan panjar kerja untuk mendanai proyek-proyek Grup seperti proyek penyaluran bantuan sosial dan proyek logistik. Sedangkan talangan atas *settlement* merupakan talangan diberikan kepada PT Arthajasa untuk melakukan *settlement* atas layanan jasa keuangan (*Payment Point*) kepada mitra *biller*. Nilai uang muka operasi tercatat merupakan nilai *net* setelah dikurangi dengan estimasi cadangan penurunan nilai.

Selain itu pada tahun 2023 Grup menempatkan dana deposit atas kerjasama pengiriman dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia untuk keperluan pengiriman kiriman barang melalui moda transportasi udara.

Sewa rumah karyawan merupakan pembayaran atas tunjangan bantuan perumahan karyawan yang diamortisasi selama masa manfaat yang diberikan.

Sewa gedung merupakan biaya sewa kantor operasional (kantor pos) di lokasi-lokasi yang tidak terdapat bangunan milik Grup dengan nilai sewa dibawah Rp100.000.000. Atas biaya tersebut dilakukan amortisasi sesuai dengan masa sewa.

Premi asuransi merupakan premi asuransi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun untuk keperluan proyek seperti proyek pengiriman surat kedinasan dengan PT Bukit Asam Tbk, pengiriman tagihan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan atas proyek pendistribusian bantuan pangan dengan Perum Bulog.

Aset keuangan lainnya terdiri dari dana pensiun bulanan dari Taspen atau Asabri yang akan dibayar pada bulan Januari 2025 senilai Rp1.018.158.509.500, panjar gagal salur Bantuan Sosial Pemerintah dari Kementerian Sosial 2024 senilai Rp655.085.809.230, dan lain-lain senilai Rp142.048.148.836.

10. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

b. Others (Continued)

The Company collaborates with PT BRI Life with PKS number: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 dated November 24, 2017 for the provision of life insurance along with investment value. The insurance is intended for employees and benefits will be received after employees enter retirement age (maximum at the age of 54 years). Long leave compensation is an insurance premium that has been paid by the Company to PT BRI Life which has not yet matured because the Company's employees have not entered retirement age.

Operating advance consists of an advance for the bailout of financing for the project and a bailout for the settlement of services for payment point transactions. The bailout of financing for the project is a working force to fund the Group's projects such as social assistance distribution project and logistics project. Meanwhile, the bailout for settlement is a bailout given to PT Arthajasa to settlement financial services (Payment Point) to biller partners. The amount of operating advances is the net value after deduction with impairment reserves.

In addition, in the year 2023 the Group placed funds deposit for the cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for the purpose of shipment of goods delivery through air transport mode.

Employee housing rent is a payment for employee housing assistance benefits that are amortized over the life of the benefit provided.

Building rent represents rental cost of operational offices (post offices) in locations where there are no buildings owned by the Group with rental value below Rp100,000,000. These costs are amortized in accordance with the lease period.

Insurance premium is an insurance premium for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Bank guarantee is cash and/or bank guaranteed to third parties within one year for project purposes such as the official letter delivery project with PT Bukit Asam Tbk, sending bills with the BPJS Ketenagakerjaan, and guarantees on food aid distribution projects with Perum Bulog.

Other financial assets consist of monthly pension funds from Taspen or Asabri which will be paid in January 2025 amounting to Rp1,018,158,509,500, advances for failed distribution of Government Social Assistance from the Ministry of Social Affairs 2024 amounting to Rp655,085,809,230, and others amounting to Rp142,048,148,836.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH

11. FIXED ASSETS – NET

	2024					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Kepemilikan Langsung:						<i>Direct Ownership:</i>
Tanah	168.016.853.317	-	-	-	168.016.853.317	<i>Land</i>
Gedung	1.247.072.082.108	6.962.383.881	-	77.810.070.460	1.331.844.536.449	<i>Buildings</i>
Kendaraan	13.142.203.672	160.183.375	-	25.717.470.805	39.019.857.852	<i>Vehicles</i>
Inventaris	1.242.914.183.677	29.694.686.979	-	1.493.409.331	1.274.102.279.987	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	2.671.145.322.774	36.817.254.235	-	105.020.950.596	2.812.983.527.605	<i>Sub Total</i>
Aset Hak-Guna:						<i>Right-of-Use Assets:</i>
Bangunan	26.227.888.264	-	(8.045.621.975)	-	18.182.266.289	<i>Buildings</i>
Kendaraan	211.192.946.902	2.778.724.210	(3.774.713.058)	(77.724.500.000)	132.472.458.054	<i>Vehicles</i>
Inventaris	81.804.618.773	139.153.968.750	-	-	220.958.587.523	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	319.225.453.939	141.932.692.960	(11.820.335.033)	(77.724.500.000)	371.613.311.866	<i>Sub Total</i>
Aset dalam Penyelesaian:						<i>Construction in Progress:</i>
Gedung	106.430.649.100	81.090.954.269	-	(27.296.450.596)	160.225.152.773	<i>Buildings</i>
Inventaris	25.278.696.119	10.032.278.599	-	-	35.310.974.718	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	131.709.345.219	91.123.232.868	-	(27.296.450.596)	195.536.127.491	<i>Sub Total</i>
Jumlah	3.122.080.121.932	269.873.180.063	(11.820.335.033)	-	3.380.132.966.962	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated Depreciation</i>
Kepemilikan Langsung:						<i>Direct Ownership:</i>
Gedung	(633.247.805.935)	(51.691.672.045)	-	-	(684.939.477.980)	<i>Buildings</i>
Kendaraan	(12.993.563.605)	(11.787.330.018)	-	(53.789.351.090)	(78.570.244.713)	<i>Vehicles</i>
Inventaris	(1.163.538.904.380)	(47.692.534.716)	-	-	(1.211.231.439.096)	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	(1.809.780.273.920)	(111.171.536.779)	-	(53.789.351.090)	(1.974.741.161.789)	<i>Sub Total</i>
Aset Hak-Guna:						<i>Right-of-Use Assets:</i>
Bangunan	(12.046.083.160)	(2.919.176.412)	2.717.019.247	-	(12.248.240.325)	<i>Buildings</i>
Kendaraan	(183.121.247.591)	(2.986.549.988)	3.701.797.404	53.789.351.090	(128.616.649.085)	<i>Vehicles</i>
Inventaris	(81.804.618.773)	(19.722.609.744)	-	-	(101.527.228.517)	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	(276.971.949.524)	(25.628.336.144)	6.418.816.651	53.789.351.090	(242.392.117.927)	<i>Sub Total</i>
Jumlah	(2.086.752.223.444)	(136.799.872.923)	6.418.816.651	-	(2.217.133.279.716)	<i>Total</i>
Nilai Buku Bersih	1.035.327.898.488				1.162.999.687.246	<i>Net Book Value</i>

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	2023					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Kepemilikan Langsung:						<i>Direct Ownership:</i>
Tanah	170.940.562.403	-	(412.290)	(2.923.296.796)	168.016.853.317	<i>Land</i>
Gedung	1.168.648.396.492	725.835.929	-	77.697.849.687	1.247.072.082.108	<i>Buildings</i>
Kendaraan	13.604.870.808	-	(462.667.136)	-	13.142.203.672	<i>Vehicles</i>
Inventaris	1.193.873.511.338	24.976.412.730	(34.207.181)	24.098.466.790	1.242.914.183.677	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	2.547.067.341.041	25.702.248.659	(497.286.607)	98.873.019.681	2.671.145.322.774	<i>Sub Total</i>
Aset Hak-Guna:						<i>Right-of-Use Assets:</i>
Bangunan	9.311.386.898	16.916.501.366	-	-	26.227.888.264	<i>Buildings</i>
Kendaraan	206.644.824.014	4.698.122.888	(150.000.000)	-	211.192.946.902	<i>Vehicles</i>
Inventaris	81.804.618.773	-	-	-	81.804.618.773	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	297.760.829.685	21.614.624.254	(150.000.000)	-	319.225.453.939	<i>Sub Total</i>
Aset dalam Penyelesaian:						<i>Construction in Progress:</i>
Gedung	20.656.672.058	123.811.792.405	(511.236.200)	(37.526.579.163)	106.430.649.100	<i>Buildings</i>
Inventaris	16.234.446.599	34.285.932.553	(406.269.199)	(24.835.413.834)	25.278.696.119	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	36.891.118.657	158.097.724.958	(917.505.399)	(62.361.992.997)	131.709.345.219	<i>Sub Total</i>
Jumlah	2.881.719.289.383	205.414.597.871	(1.564.792.006)	36.511.026.684	3.122.080.121.932	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated Depreciation</i>
Kepemilikan Langsung:						<i>Direct Ownership:</i>
Gedung	(591.097.631.395)	(45.256.092.583)	-	3.105.918.043	(633.247.805.935)	<i>Buildings</i>
Kendaraan	(12.936.590.845)	(519.639.895)	462.667.135	-	(12.993.563.605)	<i>Vehicles</i>
Inventaris	(1.113.951.704.728)	(49.617.307.428)	30.107.776	-	(1.163.538.904.380)	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	(1.717.985.926.968)	(95.393.039.906)	492.774.911	3.105.918.043	(1.809.780.273.920)	<i>Sub Total</i>
Aset Hak-Guna:						<i>Right-of-Use Assets:</i>
Bangunan	(9.311.386.898)	(2.734.696.262)	-	-	(12.046.083.160)	<i>Buildings</i>
Kendaraan	(162.441.482.713)	(20.764.764.878)	85.000.000	-	(183.121.247.591)	<i>Vehicles</i>
Inventaris	(81.804.618.773)	-	-	-	(81.804.618.773)	<i>Office Equipment</i>
Sub Jumlah	(253.557.488.384)	(23.499.461.140)	85.000.000	-	(276.971.949.524)	<i>Sub Total</i>
Jumlah	(1.971.543.415.352)	(118.892.501.046)	577.774.911	3.105.918.043	(2.086.752.223.444)	<i>Total</i>
Nilai Buku Bersih	910.175.874.031				1.035.327.898.488	<i>Net Book Value</i>

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS – NET (Continued)

Alokasi pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Beban Pokok Layanan (Catatan 23)	109.983.887.689	76.979.741.344	Cost of Services (Note 23)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	26.815.985.234	41.912.759.702	General and Administrative Expense (Note 24)
Jumlah	136.799.872.923	118.892.501.046	Total

Pengurangan atas aset sewa guna kelompok bangunan dikarenakan adanya penghentian kontrak sewa terkait dengan sewa gudang untuk operasional PT Pos Logistik Indonesia.

The reduction in lease assets of the building group was due to the termination of the lease contract related to the warehouse lease for the operations of PT Pos Logistik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 aset tetap bangunan, inventaris dan kendaraan Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta berupa asuransi *property all risk* yang memberikan perlindungan atas risiko kerusakan/kerugian gedung dan barang inventaris milik Grup akibat kebakaran, banjir, huru hara, tanah longsor dan risiko lainnya. Nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.531.161.660.926 dan Rp1.528.570.619.626. Nilai premi yang dibayarkan untuk asuransi aset tetap adalah sebesar Rp3.750.000.000 dengan metode pembayaran secara termin setiap semesternya.

As of December 31, 2024, the Group's buildings, office equipments and vehicles were insured to PT Asuransi Tri Pakarta in the form of *property all risk* insurance which provides protection against risks of damage/loss to buildings and office equipments belonging to the Group due to fire, flood, civil commotion, land landslides and other risks. As of December 31, 2024 and 2023, the insurance coverage amounted to Rp1,531,161,660,926 and Rp1,528,570,619,626, respectively. The value of the premium paid for fixed asset insurance is Rp3,750,000,000 with the payment method on a semi-annual basis.

Perusahaan asuransi yang digunakan Grup dalam mengasuransikan asetnya merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Grup.

The insurance used by the Group are third parties and are not affiliated with the Group.

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perusahaan seluruhnya berupa "Hak Guna Bangunan (HGB)". Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

The Company owned its land through land rights known as "Right to Build" (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The Management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.

Berdasarkan hasil penelaahan Manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

Based on Management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

The deduction in fixed assets is due to the sale of fixed assets with the following details:

Selain yang diungkapkan diatas, terdapat pelepasan aset tetap yang disebabkan karena disposal dan penyesuaian pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp921.604.805.

In addition to those disclosed above, there were disposals of fixed assets due to disposal and adjustments in 2024 and 2023 amounting to nil and Rp921,604,805, respectively.

Aset tetap Grup tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank ataupun utang lainnya.

The Group's fixed assets are not used as collateral for bank or other debts.

12. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (*lessee*) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional.

Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024						
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset						Assets
Tanah	6.100.990.310.000	-	-	157.730.542.000	6.258.720.852.000	Land
Bangunan	485.770.416.000	-	-	40.568.462.800	526.338.878.800	Buildings
Jumlah	6.586.760.726.000	-	-	198.299.004.800	6.785.059.730.800	Total
2023						
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset						Assets
Tanah	5.496.220.390.000	-	2.904.593.619	601.865.326.381	6.100.990.310.000	Land
Bangunan	537.620.716.700	-	(43.271.491.522)	(8.578.809.178)	485.770.416.000	Buildings
Jumlah	6.033.841.106.700	-	(40.366.897.903)	593.286.517.203	6.586.760.726.000	Total

Aset properti investasi dicatat menggunakan metode nilai wajar atau berdasarkan nilai pasar dimana pada saat penetapan awal terdapat perubahan metode pencatatan dari metode biaya menjadi metode nilai wajar, kenaikan/penurunan nilai dicatat sebagai bagian dari laba rugi.

Skema kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengelola aset properti terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan *cluster* luasan aset yaitu sewa murni (*tenant* sekolah/kampus dan perkantoran), kerja sama (*Creative Hub* dan *Shopping Center*), swakelola (*Co-living*, *Co-working* dan *Hotel/Guest House*).

Pada 31 Desember 2024 aset properti Perusahaan telah dinilai oleh KJPP Asmawi dan Rekan, laporan hasil KJPP telah diterbitkan Nomor 01081/2-0119-00/PI/11/0222/1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Tujuan penilaian aset properti investasi Grup adalah untuk penyusunan laporan keuangan bukan untuk tujuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penilaian aset properti menggunakan pendekatan biaya dan sesuai dengan tujuan aset tersebut untuk didayagunakan dan komersialisasi aset dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.103/DIR-1/1223 tanggal 10 Desember 2023, Perusahaan menetapkan kembali 16 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi.

Per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan properti investasi sebesar Rp198.299.004.800 yang dicatat dalam pendapatan lainnya setelah eliminasi (Catatan 25).

Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are controlled by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities.

Balances and movements of investment properties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Investment property assets are recorded using the fair value method or based on market value where at the time of initial determination there is a change in the recording method from the cost method to the fair value method, the increase/decrease in value is recorded as part of profit or loss.

The cooperation scheme carried out by the Company in managing property assets is divided into 3 types based on asset area clusters, namely pure rent (school/campus tenants and offices), cooperation (Creative Hub and Shopping Center), self-management (Co-living, Co-working and Hotel/Guest House).

As of December 31, 2024, the Company's property assets have been assessed by KJPP Asmawi and Partners, the KJPP results report has been issued Number 01081/2-0119-00/PI/11/0222/1/XII/2024 dated December 31, 2024.

The purpose of valuation of the Group's investment property assets is for the preparation of financial statements, not for taxation purposes. The methods used in the appraisal of property assets that have been carried out using a cost approach and in accordance with the objectives of those assets to be utilized and commercialized assets in financial reporting.

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.103/DIR-1/1223 dated December 10, 2023, the Company re-designated 16 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property.

As of December 31, 2024, there was an increase in investment properties of Rp198,299,004,800 which was recorded in other income after elimination (Note 25).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

Aset takberwujud Grup sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang proses operasional Grup, adapun batasan kapitalisasi aset takberwujud Grup adalah pembiayaan minimal Rp1.000.000 untuk aset takberwujud dan Rp10.000.000 untuk biaya yang ditangguhkan. Aset tak berwujud yang dimiliki Grup berupa aplikasi *software*, jasa konsultan bisnis, dan jasa riset.

The Group's intangible assets are fully used to support the Group's operational process, while the limitation of the Group's intangible asset capitalization is a minimum financing of Rp1,000,000 of intangible assets and Rp10,000,000 of deferred costs. Intangible assets owned by the Group in the form of software applications, business consulting services, and research services.

2024						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Perangkat Lunak						<i>Business</i>
Transformasi Bisnis						<i>Transformation</i>
dalam Penyelesaian	42.743.057.940	13.736.634.672	-	(26.237.098.730)	30.242.593.882	<i>Software in Process</i>
						<i>Business</i>
Perangkat Lunak						<i>Transformation</i>
Transformasi Bisnis	237.005.324.118	14.141.736.734	-	26.237.098.730	277.384.159.582	<i>Software</i>
Biaya yang						
Ditangguhkan	37.782.247.199	9.639.808.392	-	-	47.422.055.591	<i>Deferred Charge</i>
Sub Jumlah	317.530.629.257	37.518.179.798	-	-	355.048.809.055	<i>Sub Total</i>
Akumulasi Amortisasi						<i>Accumulated Amortization</i>
						<i>Business</i>
Perangkat Lunak						<i>Transformation</i>
Transformasi Bisnis	(176.696.364.392)	(23.443.028.679)	-	-	(200.139.393.071)	<i>Software</i>
Biaya yang						
Ditangguhkan	(28.868.713.809)	(4.265.730.849)	-	-	(33.134.444.658)	<i>Deferred Charge</i>
Sub Jumlah	(205.565.078.201)	(27.708.759.528)	-	-	(233.273.837.729)	<i>Sub Total</i>
Jumlah	111.965.551.056				121.774.971.326	<i>Total</i>
2023						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Perangkat Lunak						<i>Business</i>
Transformasi Bisnis						<i>Transformation</i>
dalam Penyelesaian	14.668.796.428	46.046.024.955	-	(17.971.763.443)	42.743.057.940	<i>Software in Process</i>
						<i>Business</i>
Perangkat Lunak						<i>Transformation</i>
Transformasi Bisnis	201.802.389.287	16.481.921.388	-	18.721.013.443	237.005.324.118	<i>Software</i>
Biaya yang						
Ditangguhkan	27.318.103.458	10.464.143.741	-	-	37.782.247.199	<i>Deferred Charge</i>
Sub Jumlah	243.789.289.173	72.992.090.084	-	749.250.000	317.530.629.257	<i>Sub Total</i>
Akumulasi Amortisasi						<i>Accumulated Amortization</i>
						<i>Business</i>
Perangkat Lunak						<i>Transformation</i>
Transformasi Bisnis	(156.252.603.921)	(20.443.760.471)	-	-	(176.696.364.392)	<i>Software</i>
Biaya yang						
Ditangguhkan	(27.016.960.254)	(1.851.753.555)	-	-	(28.868.713.809)	<i>Deferred Charge</i>
Sub Jumlah	(183.269.564.175)	(22.295.514.026)	-	-	(205.565.078.201)	<i>Sub Total</i>
Jumlah	60.519.724.998				111.965.551.056	<i>Total</i>

Aset takberwujud berupa perangkat lunak termasuk pelatihan dan implementasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha Grup, seperti sistem operasi, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Intangible assets represent software including training and implementation that are used to support business activities the Group such as operating systems, financial services, and accounting system used in financial reporting.

Biaya yang ditangguhkan merupakan pengurusan sertifikat bukan hak milik (Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha) yang diamortisasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus.

Deferred costs represent deferred maintenance of the certificates which are not property rights (Building Use Rights/Operating Use Rights) which are amortized over 4 years using the straight-line method.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Pemilikan Langsung:			<i>Direct Acquisitions:</i>
Beban Pokok Layanan (Catatan 23)	17.367.446.556	13.539.777.558	<i>Cost of Services (Note 23)</i>
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	10.341.312.972	8.755.736.468	<i>General and Administrative Expense (Note 24)</i>
Jumlah	<u>27.708.759.528</u>	<u>22.295.514.026</u>	<i>Total</i>

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON - CURRENT ASSETS

	2024	2023	
Piutang Kerugian Grup	337.162.247.521	285.768.747.682	<i>Receivable from the Group's Losses</i>
Cadangan Kerugian Penurunan atas Kerugian Grup	(323.350.438.754)	(271.956.938.915)	<i>Allowance for Impairment on Receivable from The Group's Losses</i>
Piutang Kerugian Grup - Neto	<u>13.811.808.767</u>	<u>13.811.808.767</u>	<i>Receivable from the Group's Losses - Net</i>
Klaim Lebih Bayar Pajak	-	41.848.358.590	<i>Claim for Tax Refund</i>
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	86.335.012.641	35.895.066.132	<i>Long-term Prepaid Expenses</i>
Aset Sitaan	-	14.507.000.000	<i>Confiscated Assets</i>
Bank Garansi	3.312.415.581	5.098.075.601	<i>Guarantee Bank</i>
Aset Jaminan	198.016.023	246.116.022	<i>Guarantee Assets</i>
Aset Lainnya	378	378	<i>Other Assets</i>
Sub Jumlah	<u>89.845.444.623</u>	<u>97.594.616.723</u>	<i>Sub Total</i>
Jumlah	<u>103.657.253.390</u>	<u>111.406.425.490</u>	<i>Total</i>

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang atas kerugian Grup adalah sebagai berikut :

Movement of allowance for impairment losses on receivable from the Group's losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo Awal	271.956.938.915	271.087.858.903	<i>Beginning Balance</i>
Pemulihan Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	(34.199.034.936)	(5.680.816.729)	<i>Recovery of Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses</i>
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	85.592.534.775	6.549.896.741	<i>Reclassification from Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses</i>
Jumlah	<u>323.350.438.754</u>	<u>271.956.938.915</u>	<i>Total</i>

Piutang kerugian Grup merupakan piutang yang tidak tertagih sesuai tingkat kolektibilitas untuk piutang usaha dan piutang lainnya. Nilai buku tercatat merupakan aset yang dapat dijaminan kepada Grup.

Receivable from the Group's losses represent the uncollectible of trade receivables and other receivables according to the collectibility level. Net book value is an asset that can be guaranteed to the Group.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi akun piutang kerugian Grup pada akhir periode pelaporan, Manajemen berpendapat bahwa pencadangan kerugian atas penurunan nilai piutang sudah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul apabila terdapat piutang yang tidak tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

According to examination of the receivables from the Group's losses at the end of the period, the Management believes that the allowance for impairment of receivables has been adequate to cover the losses arising from uncollectible receivables as of December 31, 2024 and 2023.

Pada tahun 2024, telah terjadi pelepasan aset sitaan dari entitas anak perusahaan (PT Pos Finansial Indonesia) ke PT Pos Properti Indonesia.

In 2024, there was a release of confiscated assets from a subsidiary entity (PT Pos Finansial Indonesia) to PT Pos Properti Indonesia.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Klaim lebih bayar pajak penghasilan merupakan jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan atas SKPLB untuk tahun 2015 (Catatan 16g). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4447/B/PK/Pjk/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari Perusahaan dan menyatakan gugatan dari Perusahaan tidak diterima. Jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dicadangkan seluruhnya.

Aset lainnya merupakan aset kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak laku terjual selama lelang tahun 2010 dan tahun 2015. Kendaraan tersebut merupakan bekas kendaraan operasional yang telah habis masa manfaatnya dan tidak dioperasionalkan kembali sebanyak 377 unit dan 1 unit aset yang belum dilelang pada tahun 2023. Mutasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	378	377
Penambahan		
Nilai Perolehan Kendaraan	-	200.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	(199.999.999)
Pengurangan	-	-
Jumlah	378	378

14. OTHER NON - CURRENT ASSETS (Continued)

Claim for overpayment of income tax is the amount of objections filed by the Company on the SKPLB for 2015 (Note 16g). Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4447/B/PK/Pjk/2024 dated October 22, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia decided to reject the application for judicial review from the of Company and stated that the lawsuit from the Company was not accepted. The amount of objections filed by the Company was reserved in full.

Other assets represent assets of 2-wheeler vehicle and 4-wheeler vehicle which are not sold during auction in 2010 and 2015. The vehicle is a secondhand operational vehicle that has expired its benefits and is not operationalized again as many as 377 units and 1 unit of assets that have not been auctioned in 2023.

Beginning Balance
Addition
Acquisition Cost of Vehicle
Accumulated Depreciation Vehicle
Deduction
Total

15. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan kewajiban Grup kepada vendor atas transaksi operasional serta kepada mitra *biller* atas transaksi *settlement biller*.

15. TRADE PAYABLES

Trade payables is the Group's obligation to vendors for operational transactions and to biller partners for settlement biller transactions.

	2024	2023
Utang Layanan Keuangan		
Weselpos		
Weselpos Kemitraan Dalam Negeri	9.409.339.778	8.638.435.352
Weselpos Remittance	3.374.362.726	3.912.021.550
Sub Jumlah	12.783.702.504	12.550.456.902
Utang Layanan Keuangan Giropos		
Giropos	79.276.578.206	52.346.984.948
Sub Jumlah	79.276.578.206	52.346.984.948
Utang Pospay		
Kemitraan Perbankan		
Tabungan E-Batara dan Setoran BTN	2.827.986.388	-
Angsuran Asuransi dan Mitra Lainnya	364.279.500	1.088.401.930
Angsuran Kredit CIMB Niaga	225.385.200	543.533.243
Sub Jumlah	3.417.651.088	1.631.935.173

Weselpos Financial Services
Payables
Weselpos Domestic Subscription
Weselpos Remittance
Sub Total

Giropos Financial Services Payable
Giropos
Sub Total

Pospay Services Payables
Banking Partner
E-Batara Saving and BTN Deposits
Installment Insurance and Other Partners
Installment Loan from CIMB Niaga
Sub Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (Lanjutan)

15. TRADE PAYABLES (Continued)

	2024	2023	
<u>Kemitraan Pembiayaan</u>			<u>Leasing Partner</u>
Angsuran Kredit Adira Finance	16.566.770.886	10.516.738.045	Installment Loan from Adira Finance
Angsuran Kredit Mega Auto Finance	7.986.733.033	1.062.753.632	Installment Loan from Mega Auto Finance
Angsuran Kredit Mandiri Tunas Finance	6.336.442.855	3.762.753.783	Installment Loan from Mandiri Tunas Finance
Angsuran Kredit Astra Credit Company	4.495.449.500	-	Installment Loan from Astra Credit Company
Angsuran Kredit Mandiri Utama Finance	3.576.990.843	3.815.719.485	Installment Loan from Mandiri Utama Finance
Angsuran Kredit Bussan Auto Finance	2.565.074.955	5.796.242.799	Installment Loan from Bussan Auto Finance
Angsuran Kredit FIF Finance	2.212.579.462	4.236.224.548	Installment Loan from FIF Finance
Angsuran Kredit Summit Oto Finance	1.290.650.850	593.416.010	Installment Loan from Summit Oto Finance
Angsuran OTO Kredit Mobil	874.733.250	1.539.574.240	Installment Loan from OTO Kredit Mobil
Angsuran Kredit Clipan Finance	836.349.646	1.241.638.942	Installment Loan from Clipan Finance
Angsuran Kredit Jaccs MPM Finance	787.507.000	883.625.500	Installment Loan from Jaccs MPM Finance
Angsuran Kredit			Installment Loan from
Indomobil Finance Indonesia	444.330.664	536.467.858	Indomobil Finance Indonesia
Angsuran Kredit Suzuki Finance	-	1.234.810.635	Installment Loan from Suzuki Finance
Nusa Surya Ciptadana (NSC)	-	585.835.023	Nusa Surya Ciptadana (NSC)
Angsuran Kredit Artha Asia Finance	-	245.779.715	Installment Loan from Artha Asia Finance
Angsuran Kredit Pembiayaan Lainnya	8.243.813.197	6.887.146.851	Installment Loan from Others
Sub Jumlah	56.217.426.141	42.938.727.066	Sub Total
<u>Kemitraan Biller</u>			<u>Biller Partnership</u>
E-Wallet	5.567.919.000	4.285.841.424	E-Wallet
Kemitraan Billers Lainnya	5.536.580.255	1.155.633.652	Other Billers Partnership
BPJS Kesehatan	4.884.558.129	576.999.996	BPJS Health
Pembayaran Gadai Pengadaian	4.239.542.176	-	Pegadaian Pawn Payment
Pembayaran Rekening Listrik	2.848.722.789	-	Electricity Payment
Setoran Telekomunikasi dan Seluler	467.304.899	291.731.715	Payment of Cellular Telecommunication
Penjualan Tiket	28.664.550	27.969.500	Sales of Ticket
Setoran PAM/PDAM	22.480.127	547.231.472	Payment of Water - PAM/PDAM
E-Commerce	-	533.457.580	E-Commerce
Setoran TV Kabel	-	60.155.072	Cable TV Deposits
Sub Jumlah	23.595.771.925	7.479.020.411	Sub Total
Utang Ritel dan Properti			Trade Retail and Property
Jasa Properti	2.284.019.968	663.654.836	Property Service
Materai	123.120.000	-	Stamp Duty
Konsinyasi Lainnya			Other Consignment
(Sampul, Percetakan)	464.758.052	597.312.833	(Cover, Printing)
Sub Jumlah	2.871.898.020	1.260.967.669	Sub Total
Utang Layanan dan Pos Internasional			International Post Service Payables
Terminal Dues	97.918.640.664	98.596.095.784	Terminal Dues
Embalance EMS	17.615.173.906	20.850.540.816	Embalance EMS
Inward Land Rate	12.512.765.858	16.768.276.104	Inward Land Rate
IACD/Service Interior	951.456.940	1.108.240.824	IACD/Service Interior
Layanan Pos Domestik	111.814.000	135.607.838	Domestic Post Service
E-Parcel	323.175.352	-	E-Parcel
Sub Jumlah	129.433.026.720	137.458.761.366	Sub Total
Utang Usaha Biaya	343.820.937.781	218.653.323.077	Cost Payables
Utang Angsuran Kredit	-	34.740.070	Bank Credit Installment Payables
Sub Jumlah	343.820.937.781	218.688.063.147	Sub Total
Jumlah	651.416.992.385	474.354.916.682	Total

Utang usaha biaya merupakan saldo utang usaha atas transaksi beban operasional yang belum dibayarkan ke vendor Grup, proses pembayaran dilakukan secara terjadwal mengikuti aturan Grup yaitu setiap Jumat untuk vendor internal dan setiap tanggal 15 dan 30 untuk vendor eksternal.

Cost payables is the balance of account payables for operational expense transactions that have not been paid to the Group's vendors, the payment process is carried out on a scheduled basis following the Group's rules, which are every Friday for internal vendors and every 15th and 30th for external vendors.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (Lanjutan)

Utang layanan jasa keuangan weselpos merupakan saldo utang kiriman uang yang belum diambil oleh penerima. Saldo utang weselpos dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu saldo wesel kemitraan yang bekerja sama dengan beberapa vendor pengiriman uang, dan weselpos yang merupakan produk wesel yang dikelola oleh Grup.

Utang layanan jasa keuangan Pospay harus diselesaikan oleh Grup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut Grup akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5% untuk setiap hari keterlambatan.

Utang layanan jasa keuangan giropos merupakan saldo mengendap dari outstanding dana virtual account pelanggan. Akun pelanggan tersebut dipotong dengan biaya pemeliharaan rekening untuk rekening yang bersifat umum, tetapi untuk rekening yang bersifat khusus seperti rekening yang digunakan untuk penyaluran dana pemerintah ataupun swasta tidak dipotong dengan biaya pemeliharaan seperti penyaluran dana bantuan sosial tunai dan pembayaran gaji pensiun.

Utang layanan jasa keuangan weselpos dan pospay akan diselesaikan pada H+0, H+1, dan H+2 sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk masing-masing mitra yang bekerjasama dengan Grup.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 29.

15. TRADE PAYABLES (Continued)

Weselpos financial service payables is a balance of remittance debt that has not been taken by the recipient of the remittance. The balance of weselpos financial service payables is grouped into 2, which are the balance of partnership money orders in collaboration with several remittance vendors and weselpos which are products managed by the Group.

Pospay financial services payables should be completed by the Group within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Group will be fined of 1 permil until 5% for each day of delay.

Giropos financial service payables is a deposited balance of outstanding customer virtual account funds. The customer account is deducted from the account maintenance fee for general purposed accounts, but for specialized bank accounts such as accounts used for the distribution of government or private funds are not deducted with maintenance costs such as disbursement of cash social assistance funds and payment of pension salaries.

Weselpos and Pospay financial service payables will be settled at H+0, H+1, and H+2 in accordance with the cooperation agreement for each partner who cooperates with the Group.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of trade payable as disclosed in Note 29.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	2024	2023
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	481.555.228	-
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	893.527.380	592.283.336
Pajak Penghasilan:		
Pasal 28a	-	-
Pajak Lainnya	131.902.353	-
Jumlah	1.506.984.961	592.283.336

The Company
Value Added Tax
Subsidiaries
Value Added Tax
Income Taxes:
Article 28a
Other Taxes
Total

b. Utang Pajak

	2024	2023
Perusahaan:		
Pajak Pertambahan Nilai	36.021.988.035	23.051.466.343
PPN WAPU	8.750.299.835	6.258.669.052
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	21.953.266.037	19.211.180.130
Pasal 22	89.696.295	230.010.636
Pasal 23	3.048.200.948	3.972.225.599
Pasal 4(2)	1.495.932.696	934.763.744
Pajak Lainnya	-	174.451.076

The Company:
Value Added Tax
Value Added Tax WAPU
Income Taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 4(2)
Other Taxes

16. TAXATION

a. Prepaid Taxes

b. Taxes Payable

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

b. Utang Pajak (Lanjutan)

b. Taxes Payable (Continued)

	2024	2023	
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Pajak Pertambahan Nilai	815.438.301	1.607.811.131	Value Added Tax
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	200.608.556	419.310.192	Article 21
Pasal 23	1.150.392.217	1.981.743.441	Article 23
Pasal 25	10.562.530	15.836.278	Article 25
Pasal 29	680.132.292	2.315.426.644	Article 29
Pasal 4(2)	2.434.823.327	357.791.944	Article 4(2)
Pajak Lainnya	241.105.099	38.760.807	Other Taxes
Jumlah	76.892.446.168	60.569.447.017	Total

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan

c. Estimated Current Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	741.155.820.060	701.891.502.784	Profit before Income Tax per Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi:			Less:
Laba Entitas Anak yang Dikonsolidasi			Profit of Consolidated Subsidiaries
Sebelum Pajak Penghasilan dan Eliminasi	23.810.893.356	31.211.824.422	Before Income Tax and Elimination
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	764.966.713.416	733.103.327.206	Profit Before Income Tax - Company
Beda Tetap:			Permanent Differences
Bantuan Pelayanan Publik LPU	(366.844.830.481)	(366.120.584.914)	Public Service of UPS
Selisih Nilai Wajar Properti			Difference in Fair Value of Investment Properties
Investasi	(198.299.004.800)	(180.908.787.300)	Tax Penalty and Final Tax
SKPKB Denda Pajak dan Pajak Final	17.343.085.246	22.416.023.429	Allowance For Meals And Pension
Tunjangan Pangan dan Duka Pensiun	55.725.312.252	55.024.775.831	Physical and Spiritual Guidance
Pembinaan Jasmani dan Rohani	5.130.191.935	1.445.705.800	Property Marketing
Pemasaran Properti	-	107.734.832.157	Donation and Disaster
Sumbangan dan Bencana Alam	45.678.930	49.540.000	Income Already Subjected to Final Income Tax
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final	(27.082.336.708)	(58.821.064.097)	Depreciation
Penyusutan	(4.760.441.396)	(298.948.783)	Others
Lainnya	57.439.998.703	(71.514.399.975)	Total Permanent Differences
Jumlah Beda Tetap	(461.302.346.319)	(490.992.907.852)	Timing Differences:
Beda Waktu:			Employee Benefit Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	20.149.190.472	(43.629.000.714)	Provision (Recovery) for Impairment of Receivables
Provisi (Pemulihan) Penurunan Nilai	224.466.814	87.847.586.791	Depreciation
Penyusutan	22.096.498.510	-	Leasing
Leasing	(13.628.071.350)	-	Total Timing Differences
Jumlah Beda Waktu	28.842.084.446	44.218.586.077	Estimated Taxable Income of the Company Current Year
Taksiran Laba Fiskal Perusahaan Tahun Berjalan	332.506.451.543	286.329.005.431	

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan (Lanjutan)

c. Estimated Current Income Tax (Continued)

	2024	2023	
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya			Tax Loss Carry Forward
Tahun 2022	(40.603.061.985)	(40.603.061.985)	Year 2022
Tahun 2021	(154.490.936.592)	(154.490.936.592)	Year 2021
Tahun 2020	(152.511.331.472)	(152.511.331.472)	Year 2020
Tahun 2019	(733.536.207.230)	(733.536.207.230)	Year 2019
Tahun 2018	-	(453.970.147.338)	Year 2018
Jumlah Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya	(1.081.141.537.279)	(1.535.111.684.617)	Total Tax Loss Carry Forward
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			Estimated Taxable Loss After Compensation of
Setelah Kompensasi Rugi Fiskal	(748.635.085.736)	(1.248.782.679.186)	Tax Loss Carry Forward
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak			Estimated Taxable Income (Loss)
Perusahaan	(748.635.085.736)	(1.248.782.679.186)	The Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Pos Logistik Indonesia	1.630.520.000	(2.377.907.000)	PT Pos Logistic Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	(2.865.969.000)	(6.826.800.000)	PT Pos Finansial Indonesia
PT Pos Properti Indonesia	1.891.301.000	576.138.000	PT Pos Properti Indonesia
Jumlah	(747.979.233.736)	(1.257.411.248.186)	Total
Beban Pajak Kini Konsolidasian			Consolidated Current Tax Expense
Perusahaan - Penyesuaian Hasil Pemeriksaan			The Company - Adjustment of
Fiskus Tahun Sebelumnya	1.776.402.789	193.336.281	Previous Year's Audit Result
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Pos Logistik Indonesia	358.714.472	1.075.185.346	PT Pos Logistic Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	-	-	PT Pos Finansial Indonesia
PT Pos Properti Indonesia	416.086.220	126.750.360	PT Pos Properti Indonesia
Jumlah Beban Pajak Kini Konsolidasian	2.551.203.481	1.395.271.987	Total Consolidated Current Tax Expense

Mengacu pada SKPLB No 00027/406/22/093/24 tanggal 20 Mei 2024 atas pemeriksaan pajak tahun 2022, hasil pemeriksaan pajak didapati kekurangan pembayaran pajak penghasilan tahun 2022 Perusahaan sebesar Rp1.776.402.789. Berdasarkan standar yang berlaku kelebihan tersebut dicatat sebagai Pajak Kini Perusahaan.

Referring to the SKPLB No. 00027/406/22/093/24 dated May 20, 2024 for the 2022 tax audit, the results of the tax audit found a shortfall in the Company's 2022 income tax payment of Rp1,776,402,789. Based on applicable standards, the excess is recorded as the Company's Current Tax.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

		Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	
	2023				2024
Aset (Liabilitas)					
Pajak Tangguhan					
Perusahaan:					
Cadangan Kerugian Penurunan					
Nilai Piutang dan Uang Muka	110.913.883.249	49.382.696	-	-	110.963.265.945
Imbalan Pasca Kerja	243.098.011.502	4.432.821.904	(25.969.924.109)	-	221.560.909.297
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(20.186.878.886)	(2.998.175.697)	-	-	(23.185.054.583)
Penyusutan Aset Hak Guna	17.370.976.893	4.861.229.672	-	-	22.232.206.565
Sub Jumlah	351.195.992.758	6.345.258.575	(25.969.924.109)	-	331.571.327.224
Entitas Anak:					
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	11.650.017.641	1.312.551.102	-	-	12.962.568.743
Imbalan Pasca Kerja	554.223.116	125.082.055	15.333.121	12.996.038	707.634.330
Penurunan Nilai Saham	-	341.893.944	-	-	341.893.944
Penyusutan Aset Tetap	175.348.117	1.222.996.069	-	-	1.398.344.186
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(6.183.293.437)	-	-	-	(6.183.293.437)
Penyisihan Piutang Usaha	12.704.141.539	(4.047.450)	-	-	12.700.094.089
Penyisihan Piutang Lain-lain	3.786.547.926	110.000.000	-	-	3.896.547.926
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	6.244.273.944	-	-	-	6.244.273.944
Aset Hak Guna	(100.263.168)	(565.158.968)	-	-	(665.422.136)
Rugi Fiskal	8.090.287.621	(358.714.472)	-	-	7.731.573.149
Sub Jumlah	36.921.283.299	2.184.602.280	15.333.121	12.996.038	39.134.214.738
Jumlah	388.117.276.057	8.529.860.855	(25.954.590.988)	12.996.038	370.705.541.962

Deferred Tax
 Assets (Liabilities)
 of the Company:
 Allowance for Impairment
 of Trade Receivables and Advance
 Employee Benefits
 Payment of Finance Leases
 Depreciation Right-of-use Assets
 Sub Total
 Deferred Tax
 Assets (Liabilities)
 Subsidiaries:
 Allowance for Impairment of Trade Receivables
 Employee Benefits
 Depreciation of Fixed Assets
 Depreciation of Leased Assets
 Allowance for Trade Receivable
 Allowance for Other Receivable
 Accrued Revenue
 Right-of-use Assets
 Fiscal Loss
 Sub Total
 Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred Tax (Continued)

		Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	
	2022				2023
Aset (Liabilitas)					
Pajak Tangguhan					
Perusahaan:					
Cadangan Kerugian Penurunan					
Nilai Piutang dan Uang Muka	91.587.414.155	19.326.469.094	-	-	110.913.883.249
Imbalan Pasca Kerja	265.403.584.218	(9.598.380.157)	(12.707.192.559)	-	243.098.011.502
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(18.506.986.958)	(1.679.891.928)	-	-	(20.186.878.886)
Penyusutan Aset Hak Guna	15.691.084.965	1.679.891.928	-	-	17.370.976.893
Sub Jumlah	354.175.096.380	9.728.088.937	(12.707.192.559)	-	351.195.992.758
Entitas Anak:					
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	897.513.358	-	-	11.650.017.641
Imbalan Pasca Kerja	477.540.412	35.536.692	41.146.012	-	554.223.116
Penyusutan Aset Tetap	370.155.791	47.747.943	-	(242.555.617)	175.348.117
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(7.088.535.580)	905.242.143	-	-	(6.183.293.437)
Penyisihan Piutang Usaha	5.811.221.351	4.681.920.448	-	2.210.999.740	12.704.141.539
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	3.740.000.000	-	-	3.786.547.926
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	2.471.149.277	-	2.354.000.000	6.244.273.944
Provisi Jangka Panjang	(294.190.100)	-	-	294.190.100	-
Aset Hak Guna	(171.703.404)	71.440.236	-	-	(100.263.168)
Rugi Fiskal	7.567.148.075	523.139.546	-	-	8.090.287.621
Sub Jumlah	18.889.813.421	13.373.689.643	41.146.012	4.616.634.223	36.921.283.299
Jumlah	373.064.909.801	23.101.778.580	(12.666.046.547)	4.616.634.223	388.117.276.057

Deferred Tax
Assets (Liabilities)
of the Company:
Allowance for Impairment
of Trade Receivables and Advance
Employee Benefits
Payment of Finance Leases
Depreciation Right-of-use Assets
Sub Total
Deferred Tax
Assets (Liabilities)
Subsidiaries:
Allowance for Impairment of Trade Receivables
Employee Benefits
Depreciation of Fixed Assets
Depreciation of Leased Assets
Allowance for Trade Receivable
Allowance for Other Receivable
Accrued Revenue
Long-term Provision
Right-of-use Assets
Fiscal Loss
Sub Total
Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

e. Manfaat Pajak

e. Income Tax Benefit

	2024	2023	
Perusahaan			The Company
Pajak Kini	-	-	Current Income Tax
Pajak Kini - Penyesuaian dari			Current Tax - Prior Year
Tahun Sebelumnya	(1.776.402.789)	(193.336.281)	Adjustment
Pajak Tangguhan	6.345.258.575	9.728.088.937	Deferred Tax
Sub Jumlah	4.568.855.786	9.534.752.656	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	774.800.692	(126.750.360)	Current Income Tax
Pajak Kini - Penyesuaian dari			Current Tax - Prior Year
Tahun Sebelumnya	-	(1.075.185.346)	Adjustment
Pajak Tangguhan	2.197.598.318	17.990.323.866	Deferred Tax
Sub Jumlah	2.972.399.010	16.788.388.160	Sub Total
Jumlah	7.541.254.796	26.323.140.816	Total

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

f. Estimated Claim for Tax Refund

Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran pajak penghasilan Grup yang menurut Manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

Estimated claims for tax refund represent the Group's over payment of income tax which in the Management's opinion can be refunded, with details as follows:

	2024	2023	
Taksiran Tagihan Pajak			Estimated Claim for
Penghasilan			Tax Refund
Perusahaan			The Company
2024	32.270.324.767	-	2024
2023	26.854.913.133	16.270.091.198	2023
2022	-	12.255.864.517	2022
Sub Jumlah Perusahaan	59.125.237.900	28.525.955.715	Sub Total the Company
Entitas Anak			Subsidiaries
2024	10.467.322.987	-	2024
2023	14.700.068.368	15.150.581.961	2023
2022	-	8.875.946.958	2022
Sub Jumlah Entitas Anak	25.167.391.355	24.026.528.919	Sub Total Subsidiaries
Jumlah	84.292.629.255	52.552.484.634	Total

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00196A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp10.697.271.653, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp282.353.588, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp10.414.918.065. Perusahaan telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 4 Mei 2023.

On April 26, 2023, the Company received an Tax Overpayment Refund Order (SPMKP) of Corporate Income Tax No.00196A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp10,697,271,653, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp282,353,588, so that the amount paid amounting to Rp10,414,918,065. The Company has received this excess tax on May 4, 2023.

Perusahaan menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp193.336.281 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

The Company wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp193,336,281 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

Pada tanggal 18 September 2024, PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.01018A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.318.160.835, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp747.318.398, sehingga dibayarkan kepada perusahaan sebesar Rp7.570.842.437.

On September 18, 2024, PLI received on Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.01018A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,318,160,835, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp747,318,398, so that it was paid to the company in the amount of Rp7,570,842,437.

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2023, Entitas anak PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00549A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp6.476.465.972, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp1.118.261.556, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp5.358.204.416. PLI telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 31 Mei 2023.

PLI menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp1.075.185.346 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

Perusahaan mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp12.255.864.517. Pada tanggal 19 Juni 2024, Perusahaan telah menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 00278A berdasarkan SKPKPP Nomor: KEP-000054/PPH/KPP.1904/2024 sebesar Rp8.453.983.295 dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp613.452.059. Pada tanggal 26 Juni 2024 Perusahaan menerima Pengembalian Pajak Penghasilan sebesar Rp7.840.531.236.

PLI mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.501.558.107. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

g. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP01018/KEB/WPJ19/2019, dalam surat tersebut Direktur Jendral Pajak sebagai Terbanding memberi tanggapan atas permohonan banding Perusahaan (pemohon banding) atas keberatan dilakukannya koreksi terhadap penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 dalam SPT Badan tahun 2016. Berdasarkan tanggapan Terbanding, dasar hukum koreksi atas penyesuaian fiskal negatif terhadap BO-LPU yang dilakukan Terbanding adalah berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pertimbangan hukumnya adalah bahwa BO-LPU yang diterima pemohon banding dari pemerintah RI (selaku pemegang saham) tersebut dianggap:

- a. Termasuk sebagai “Penghasilan” karena memenuhi unsur sebagai tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, oleh karenanya “dianggap” sebagai objek pajak (Vide, Pasal 4 ayat 1 UU PPh).

16. TAXATION (Continued)

f. Estimated Claim for Tax Refund (Continued)

On May 8, 2023, subsidiaries PLI received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp6,476,465,972, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp1,118,261,556, so that it was paid amounting to Rp5,358,204,416. PLI has received this excess tax on May 31, 2023.

PLI wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp1,075,185,346 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

The Company filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp12,255,864,517. On 19 June 2024, the Company received Tax Overpayment Refund Order (SPMKP) Number: 00278A based on SKPKPP Number: KEP-000054/PPH/KPP.1904/2024, amounted to Rp 8,453,983,295 lesstax payable compensation through deduction of Tax Assessment Letter interest on penalty of Income Tax year 2018 amounting to Rp 613,452,059. On 26 June 2024 the Company received Income Tax Return amounted to Rp7,840,531,236.

PLI filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,501,558,107. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

g. Tax Assesments

On December 6, 2019, the Director General of Taxes issued a letter Number S-3885/WPJ 19/2019 concerning Letter of Appeals on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in that letter the Director General of Taxes as Apellee responding to the Company's appeal petition (appealant) against the objection to the correction of negative fiscal adjustments in the form of Universal Post Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 in the Annual Income Tax Return fiscal year 2016. Based on Apellee's responses, the legal basis for correction of negative fiscal adjustments to the OA-UPS conducted by the Apellee is based on tax legislation. The legal consideration is that the OA-UPS received by the appealant from the Government of Republic of Indonesia (as a shareholder) is considered:

- a. Included as "Income" because it fulfills the element as an additional economic ability by name and in any form that can be used for consumption or to add to the wealth of Taxpayer, therefore "considered" as a tax object (Vide, Article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

- b. Tidak termasuk dikecualikan sebagai objek pajak, karena BO-LPU in litis, kedudukannya oleh Terbandingdipersamakan dengan “bantuan dan sumbangan” yang diterima oleh WP/Pemohon Banding (Pihak/Pihak BO-LPU) dari pemerintah RI selaku pemegang sahamnya (Pihak/WP Pemberi BO-LPU) karena antara para pihak tersebut terdapat hubungan kerja usaha dan hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan satu sama lain. Sehingga terhadap BO-LPU in litis dilakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif dalam SPT Badan tahun 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan putusan salinan pajak atas gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00024/406/17/093/19 tahun pajak 2017 tanggal 7 Mei 2019 yang membatalkan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak sebesar Rp588.551.106.

Pada tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan mengeluarkan Surat Bantahan Nomor 58/Dir-1/0120 terhadap Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, dalam suratnya Perusahaan dalam hal ini sebagai Pemohon Banding dengan berdasarkan argumentasi hukum tidak sependapat dengan seluruh dasar dan pertimbangan hukum serta alasan koreksi yang didalilkan dan ditetapkan oleh Terbanding, karena dasar yang dikonstatir, pertimbangan dan alasan hukum koreksi yang dikonstitusinya tidak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya (tidak sesuai dengan sifat usaha WP). Sehingga hasil koreksi atas penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 harus dibatalkan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp42.903.902.988. Perusahaan mengajukan kembali kelebihan pembayaran pajak atas BO-LPU tahun 2015 sebesar Rp41.848.358.688 sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan menerima memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak Nomor PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIB tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2015 tentang pajak Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

16. TAXATION (Continued)

g. Tax Assessments (Continued)

- b. Not excluded as a tax object, because OA-UPS in litis, its position by Appellee is equivalent to "assistance and donations" received by Taxpayer/Appellant (Parties/Parties of OA-UPS) from the Indonesian Government as its shareholders (Parties/Taxpayer Giving OA-UPS) because between the parties there is a business employment relationship and ownership or control relationship with each other. So that the OA-UPS in litis was corrected for the Negative Fiscal Adjustment in the Annual Tax Return fiscal year 2016.

On December 2, 2019, the Company obtained a copy of tax decision on the lawsuit against the Income Tax Assessment Letter (SKPLB) of Income Tax Number 00024/406/17/093/19 fiscal year 2017 dated May 7, 2019 which canceled all corrections made by the Director General of Taxes amounting to Rp588,551,106.

On January 16, 2020, the Company issued an Objection Letter Number 58/Dir-1/0120 to the Director General of Taxes Letter Number S-3885/WPJ19/2019 dated December 6, 2019 concerning Letter of Appeal to the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in his letter the Company in this case as an Appellant based on legal arguments does not agree with all legal basis and law considerations and the reasons for correction which are postulated and determined by the Appellee, because the basis is constrained, the legal considerations and reasons for correction whose constitution is not in accordance with the applicable tax law and does not reflect actual business activities (not in accordance with the nature of Taxpayer business). So that the correction results of the negative fiscal adjustment in the form of Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 must be canceled.

The refund for the overpayment of tax has been received by the Company in 2020 amounting to Rp42,903,902,988. The company resubmitted the overpayment of tax on OA-UPS in 2015 amounting to Rp41,848,358,688 until the date of this report, the case is still in the tax court process.

On January 4, 2023, the Company proposed a files for judicial review of tax court decisions Number PUT014103.99/2021/PP/M.VIIB of 2022 dated September 28, 2022 regarding the refund of tax overpayment on the Tax Assessment Letter (SKP) of 2015 concerning the Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) tax not an Income Tax Object.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Pada tahun 2024 dan 2023 Grup menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat 2 dan PPN dengan rincian sebagai berikut:

In 2024 and 2023, the Group received Tax Collection Letter (STP) on Income Tax Articles 21, 23, 4 (2) and VAT with the following details:

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00001/101/21/332/24	PPh Pasal 21	123.613
00001/101/24/923/24	PPh Pasal 21	13.039
00001/103/23/824/24	PPh Pasal 21	100.352
00002/101/21/332/24	PPh Pasal 21	412.196
00002/101/24/221/21	PPh Pasal 21	14.733
00002/101/24/608/24	PPh Pasal 21	104.837
00003/101/24/922/24	PPh Pasal 21	105.321
00004/101/24/119/24	PPh Pasal 21	14.154
00004/201/21/655/23	PPh Pasal 21	689.864
00005/101/24/217/24	PPh Pasal 21	194.238
00005/101/24/647/24	PPh Pasal 21	8.848
00008/101/21/327/23	PPh Pasal 21	52.205
00009/101/20/645/24	PPh Pasal 21	10.476
00009/101/21/327/23	PPh Pasal 21	272.448
00011/101/22/203/24	PPh Pasal 21	40.817
00012/101/22/203/24	PPh Pasal 21	33.607
00012/101/24/327/24	PPh Pasal 21	72.833
00013/101/22/203/24	PPh Pasal 21	12.659
00014/101/22/203/24	PPh Pasal 21	23.566
00014/101/23/656/24	PPh Pasal 21	113.478
00014/101/24/702/24	PPh Pasal 21	100.000
00014/106/23/093/24	PPh Pasal 21	1.000.000
00015/101/22/203/24	PPh Pasal 21	32.401
00015/101/23/925/23	PPh Pasal 21	21.918
00015/101/24/605/24	PPh Pasal 21	170.611
00016/101/22/203/24	PPh Pasal 21	13.763
00016/101/24/602/24	PPh Pasal 21	10.275
00017/101/22/203/24	PPh Pasal 21	12.481
00018/101/22/203/24	PPh Pasal 21	42.520
00021/101/24/211/24	PPh Pasal 21	101.614
00029/101/24/642/24	PPh Pasal 21	15.277
00042/101/20/327/23	PPh Pasal 21	100.000
00042/101/21/106/23	PPh Pasal 21	639.302
00042/101/23/951/24	PPh Pasal 21	75.521
00043/101/21/106/23	PPh Pasal 21	70.945
00049/101/23/954/24	PPh Pasal 21	60.087
00061/101/21/128/23	PPh Pasal 21	319.455
00062/101/21/128/23	PPh Pasal 21	102.138
00064/101/23/816/24	PPh Pasal 21	100.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ <i>Tax Assessment Letters</i>	Jenis Pajak/ <i>Type of Tax</i>	Total/ <i>Amounts</i>
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00071/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00083/101/23/419/23	PPh Pasal 21	100.000
00084/101/24/307/24	PPh Pasal 21	100.000
00091/101/24/423/24	PPh Pasal 21	18.136.961
00099/101/21/126/23	PPh Pasal 21	84.490
00099/101/23/922/24	PPh Pasal 21	100.684
00100/101/21/126/23	PPh Pasal 21	179.256
00100/101/21/126/23	PPh Pasal 21	85.500
00101/101/21/126/23	PPh Pasal 21	510.595
00102/101/21/126/23	PPh Pasal 21	207.360
00103/101/23/902/23	PPh Pasal 21	45.452
00113/103/20/419/23	PPh Pasal 21	217.047
00117/101/23/703/23	PPh Pasal 21	100.000
00121/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00121/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00133/101/23/404/24	PPh Pasal 21	272.203
00133/103/19/941/23	PPh Pasal 21	33.936
00134/103/20/723/23	PPh Pasal 21	100.000
00140/101/23/941/24	PPh Pasal 21	2.294
00150/101/23/401/23	PPh Pasal 21	100.000
00158/101/24/211/24	PPh Pasal 21	45.300
00159/101/23/419/23	PPh Pasal 21	100.000
00163/101/23/417/23	PPh Pasal 21	100.000
00178/103/20/626/23	PPh Pasal 21	100.000
00189/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00221/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00222/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00223/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00224/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00240/101/21/727/23	PPh Pasal 21	100.000
00242/101/20/108/23	PPh Pasal 21	185.089
00245/101/20/108/23	PPh Pasal 21	471.959
00252/101/19/723/23	PPh Pasal 21	80.103
00254/101/19/941/23	PPh Pasal 21	21.033
00256/101/23/911/23	PPh Pasal 21	96.062
00259/101/23/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00294/101/23/701/23	PPh Pasal 21	100.000
00311/101/24/426/24	PPh Pasal 21	100.000
00350/101/24/423/24	PPh Pasal 21	100.000
00355/101/23453/24	PPh Pasal 21	376.765
00377/101/22/417/23	PPh Pasal 21	2.154.579
00463/101/23/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00675/101/20/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00676/101/20/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00795/101/23/903/23	PPh Pasal 21	161.292
00796/101/23/903/23	PPh Pasal 21	227.233

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00940/101/23/404/23	PPH Pasal 21	100.000
01176/101/23/403/23	PPH Pasal 21	100.000
01276/101/23/453/23	PPH Pasal 21	100.000
0166/101/233/942/23	PPH Pasal 21	100.000
0166/101/233/942/23	PPH Pasal 21	100.000
02049/101/23/416/23	PPH Pasal 21	100.000
70000/202312/124841/49	PPH Pasal 23	100.000
00003/140/22/093/24	PPH Pasal 4 Ayat (2)	800.000
Surat Ketetapan Pajak		
00002/187/22/093/24	PPN WAPU	43.473.615
00002/243/22/093/24	PPH Pasal 21 Final	429.373.761
00016/201/22/093/24	PPH Pasal 21	1.327.558.372
00027/406/22/093/24	PPH Badan	(8.453.983.295)
00128/207/22/093/24	PPN	108.957.683
00128/207/22/093/24	PPN	123.652.052
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-534/P2DK/KPP.2606/2023	PPH Pasal 21	2.424.557
S-534/P2DK/KPP.2606/2023	PPH Pasal 21	207.000
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPH Pasal 21	1.789.046
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPH Pasal 21	530.985
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPH Pasal 21	362.250
Total		(6.382.657.189)
Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts

2023

Surat Tagihan Pajak

00002/101/22/822/23	PPH Pasal 21	100.000
00002/101/23/954/23	PPH Pasal 21	12.041
00004/101/19/832/23	PPH Pasal 21	100.353
00008/101/20/832/23	PPH Pasal 21	100.000
00009/101/20/302/23	PPH Pasal 21	100.000
00009/101/23/804/23	PPH Pasal 21	167.337
00011/101/23/804/23	PPH Pasal 21	97.597
00012/101/21/127/23	PPH Pasal 21	462.499
00012/101/21/647/23	PPH Pasal 21	316.600
00012/101/22/513/23	PPH Pasal 21	21.126
00015/201/19/655/23	PPH Pasal 21	309.785
00016/101/21/303/23	PPH Pasal 21	471.570
00016/201/19/655/23	PPH Pasal 21	401.410

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00017/201/19/655/23	PPh Pasal 21	5.072.602
00020/101/20/303/23	PPh Pasal 21	100.000
00020/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00022/101/21/629/23	PPh Pasal 21	2.092
00022/101/21/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00023/101/21/629/23	PPh Pasal 21	412.747
00023/101/21/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00027/101/21/116/23	PPh Pasal 21	541.728
000281/101/19/952/23	PPh Pasal 21	1.772
00029/101/20/313/23	PPh Pasal 21	200.000
00030/101/22/541/23	PPh Pasal 21	56.148
00031/101/21/127/23	PPh Pasal 21	23.055
00031/101/23/942/23	PPh Pasal 21	30.983
00038/101/21/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00046/101/20/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/19/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00050/101/22/101/23	PPh Pasal 21	4.789
00057/101/22/221/23	PPh Pasal 21	11.133
00059/101/22/629/23	PPh Pasal 21	222
00063/101/20/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00066/101/21/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00067/101/20/822/23	PPh Pasal 21	487.398
00068/101/20/952/23	PPh Pasal 21	100.000
00072/101/22/093/23	PPh Pasal 21	161.330
00077/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00078/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00079/101/22/517/23	PPh Pasal 21	143.345
00082/101/22/956/23	PPh Pasal 21	4.459
00089/101/22/526/23	PPh Pasal 21	52.136
00096/101/21/605/23	PPh Pasal 21	205.431
00100/101/19/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00103/101/20/332/23	PPh Pasal 21	100.000
00105/101/20/309/23	PPh Pasal 21	100.000
00109/101/20/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00116/101/11/127/22	PPh Pasal 21	17.880
00117/101/11/127/22	PPh Pasal 21	343.911
00118/101/11/127/22	PPh Pasal 21	27.362
00123/101/21/419/23	PPh Pasal 21	322.660
00125/101/21/419/23	PPh Pasal 21	720.067
00126/101/19/804/23	PPh Pasal 21	17.857
00129/101/21/307/23	PPh Pasal 21	181.400
00138/101/18/952/23	PPh Pasal 21	43.922
00149/101/22/542/23	PPh Pasal 21	14.951
00158/101/22/729/23	PPh Pasal 21	26.957
00162/101/22/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00168/101/22/642/23	PPh Pasal 21	17.363
00182/101/20/419/23	PPh Pasal 21	100.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955
00071/103/19/727/23	PPh Pasal 23	100.000
00074/103/20/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00092/103/19/093/23	PPh Pasal 23	100.000
00099/103/19/217/23	PPh Pasal 23	116.732

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00105/103/20/438/23	PPh Pasal 23	100.000
00107/103/19/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00192/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00193/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00282/101/22/727/23	PPh Pasal 23	2.706
00409/103/19/416/23	PPh Pasal 23	166.689
00410/103/19/416/23	PPh Pasal 23	133.650
00004/106/18/093/23	PPh Pasal 29	1.000.000
00019/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00020/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00021/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00022/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00031/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00032/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00033/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00035/140/19/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/187/21/093/23	PPN	673.169
00031/187/21/093/23	PPN	74.022
00032/187/21/093/23	PPN	107.683
00033/187/21/093/23	PPN	3.633.174
00034/187/21/093/23	PPN	370.065
00035/187/21/093/23	PPN	2.141.765
00036/187/21/093/23	PPN	6.869.269
00037/187/21/093/23	PPN	14.518.608
00038/187/21/093/23	PPN	6.688.365
00039/187/21/093/23	PPN	30.767.236
00053/207/21/093/23	PPN	109.627.742
00066/107/21/093/23	PPN	101.659.611
00256/107/22/955/23	PPN	500.000
01000/107/22/955/23	PPN	500.000
04071/107/22/955/23	PPN	500.000
Surat Ketetapan Pajak		
00002/243/21/093/23	PPh Pasal 21	16.090.789
00005/202/21/093/23	PPh Pasal 22	2.686.544
00007/201/21/093/23	PPh Pasal 21	2.259.871.386
00009/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	1.101.826.599
00010/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	246.930.346
00012/203/21/093/23	PPh Pasal 23	564.744.823
00015/201/19/093/21	PPh Pasal 21	226.759.840
00015/202/19/093/21	PPh Pasal 22	48.909.284
00017/240/19/093/21	PPh Pasal 4 ayat (2)	240.501.360
00035/203/19/093/21	PPh Pasal 23	406.884.280
00054/207/21/093/23	PPN	2.033.192.221
00093/207/19/093/2	PPN	884.118.952

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-1030/IMB/KPP.2706/06/2023	PPh Pasal 21	1.454.404
S-1717/P2DK/KPP.2506/2022	PPh Pasal 21	3.345.000
S-3019/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	346.644
S-577/KPP.2507/2022	PPh Pasal 21	384.000
S-620/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	1.524.001
S-765/KPP.2502/2022	PPh Pasal 21	14.793.725
S-871/KPP.0301/2022	PPh Pasal 21	2.454.271
S-99/P2DK/KPP.2505/2023	PPh Pasal 21	9.123.385
SP2DK-3/WPJ.09/KP.05/2022	PPh Pasal 21	3.989.296
SP2DK-379/WPJ.08/KP.05/2022	PPh Pasal 21	1.584.000
SP2DK-602/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	546.449
SP2DK-663/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	471.562
Laporan Hasil Penelitian		
LAP-140/LHPT/KPP.260607/2023	PPh Pasal 21	5.026.603
Total		8.418.163.697
Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>PLI</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00202/107/22/078/24	PPN	12.955.822
Surat Ketetapan Pajak		
00308/207/22/078/24	PPN	69.790
00309/207/22/078/24	PPN	199.439.038
00053/240/22/078/24	PPh Pasal 4 Ayat (2)	181.618.828
01234/201/22/078/24	PPh Pasal 21	575.768
00126/507/22/078/24	PPh Pasal 23	352.659.152
<u>PPI</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00631/101/24/441/24	PPh Pasal 21	121.653
00628/101/24/441/24	PPh Pasal 21	320.551
00629/101/24/441/24	PPh Pasal 21	327.454
00630/101/24/441/24	PPh Pasal 21	164.235
00409/106/24/441/24	PPh Pasal 25	831.983
00836/107/24/441/24	PPN	6.483.552
Total		755.567.826

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

h. Administrasi Pajak

h. Tax Administration

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the fiscal year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER PAYABLES

	2024	2023	
Utang Lain-lain			Other Payables
Utang Kpegawaian	40.272.657.054	56.652.393.250	Employee Payables
Pendapatan Diterima di Muka			
Pemanfaatan Aset	48.697.126.075	58.618.995.767	Prepaid Income on Assets Utilization
Utang atas Penyelesaian Investasi	92.952.017.906	45.324.750.466	Payable of Working Investment
Utang Uang Jaminan	9.620.980.222	6.224.087.757	Fund Guarantee Payables
Deposit Layanan Payment Point	-	4.299.165.685	Deposit Payment of Point Service
Deposit atas Penyelenggaraan			Deposits on the Operation of Foreign
Layanan Surat dan Paket:			Letter and Package Services:
Deposit Agen	17.005.312.974	17.770.194.400	Agent Deposits
Luar Negeri	17.784.047.137	7.097.813.277	International
Deposit atas Jaminan Sewa Properti	8.132.276.074	158.000.000	Deposit for Property Rental Guarantee
Jaminan Penyelenggaraan Layanan			Guaranteed Service Delivery
Wesel Langganan	274.000.000	200.000.000	Subscription
Sub Jumlah	234.738.417.442	196.345.400.602	Sub Total
Utang Lancar Lainnya	8.697.909.661	75.071.385.880	Other Current Payables
Provisi Jangka Pendek			Short-term Provision
Jasa Produksi	46.500.804.572	120.880.593.816	Production Service
Tantiem	11.771.851.338	28.672.438.082	Tantiem
Sub Jumlah	58.272.655.910	149.553.031.898	Sub Total
Biaya yang Masih Harus Dibayar			Accrued Expenses
Honorarium Petugas Agen Pos	99.922.530.868	11.089.227.095	Honorarium of Post Agents
Sewa	92.316.722.157	61.188.027.651	Lease
Angkutan Pos	89.567.789.155	166.960.257.755	Postal Delivery
Administrasi	36.165.221.392	38.067.491.347	Administration
Beban Bunga Pinjaman	12.600.013.889	10.665.097.222	Loan Interest Expense
Pengerjaan Kiriman Pos Luar Negeri	11.449.591.023	5.517.220.438	International Mailing Delivery
Konstruksi	11.316.430.273	5.704.935.518	Construction
Biaya Lembur Tenaga Kontrak			Overtime Allowance for Non-permanent
Karya	5.272.433.045	1.381.629.112	Employees
Keamanan	4.117.820.824	443.643.200	Security
Pemeliharaan	4.065.246.371	264.747.056	Maintenance
Pajak Final	1.102.034.912	1.212.650.386	Final Tax
Pengembangan Properti	957.200.000	150.105.381	Property Development
Tunjangan Karyawan Lainnya	205.975.838	57.616.155	Other Employee Allowance
Fee Konsultan	-	1.454.428.500	Consultant Fee
Sub Jumlah	369.059.009.747	304.157.076.816	Sub Total
Utang Pemegang Saham Minoritas	51.971.718.279	28.701.465.612	Debt of Minority Shareholders
Jumlah	722.739.711.039	753.828.360.808	Total

Manajemen telah mencadangkan provisi untuk pembayaran jasa produksi untuk karyawan dan tenaga kerja kontrak pembayaran tantiem untuk direksi dan komisaris.

The Management has made a provision for payment of production services for employees and payment of bonuses for directors and commissioners.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang kepegawaian merupakan utang gaji dan manfaat karyawan yang sampai dengan akhir periode pelaporan laporan keuangan belum dibayarkan kepada pegawai. Utang kepegawaian terdiri dari uang kontrak rumah pegawai, uang cuti tahunan dan uang cuti tahap akhir.

Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama dengan Grup. Tujuan uang jaminan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh Grup dalam pelaksanaan pekerjaan.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban akrual Grup dimana manfaat atas penggunaan beban tersebut telah diterima Grup pada masa periode pelaporan. Beban akrual angkutan pos merupakan beban akrual atas angkutan pengiriman barang kiriman pos baik itu menggunakan moda angkutan darat dan udara yang mana proses penagihan *invoice* dilakukan kurang lebih 2 - 3 bulan dari tanggal transaksi.

Penurunan akrual atas angkutan pos selama 2024 dikarenakan angkutan pos dikelola langsung oleh entitas anak (PT Pos Logistik Indonesia).

Kenaikan akrual atas sewa kendaraan merupakan biaya akrual dari proyek pengiriman bantuan cadangan beras pemerintah yang merupakan kerjasama Grup dengan Perum Bulog. Angka tersebut merupakan cadangan atas 3 tahap pekerjaan proyek pengiriman.

17. OTHER PAYABLES (Continued)

Employee payables is a payable of salaries and employee benefits that until the end of the reporting period has not been paid to employees. The employee payables consist of employee's housing contract money, annual leave money and final stage leave money.

Fund guarantee payable is bank or cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation agreement with the Group. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Group in the implementation of the work.

Accrued expenses are the accrual of the Group's expenses where the benefits of using expenses have been received by the Group during the reporting period. Accrued postal delivery expense is an accrued expenses on postal delivery freight transport whether by land and air transportation mode where the invoice billing process is approximately 2 - 3 months from the date of transaction.

The decrease in accruals for postal transportation during 2024 was due to postal transportation being managed directly by a subsidiary (PT Pos Logistik Indonesia).

The increase in accrual of rental of vehicles is an accrual expenses for the delivery project of government rice reserve assistance which is a collaboration between the Group and Perum Bulog. This amount is a reserve for 3 stages of delivery project work.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan pinjaman bank jangka pendek Grup dengan rincian sebagai berikut:

18. SHORT-TERM BANK LOAN

This account pertains to short-term bank loan of the Group with details are as follows:

	2024	2023	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Parties (Note 27)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	449.986.907.517	370.604.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	370.000.000.000	300.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	819.986.907.517	670.604.000.000	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	1.400.000.000.000	665.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	750.000.000.000	500.000.000.000	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk	400.000.000.000	400.000.000.000	PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	251.346.462.347	-	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	99.800.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Sub Jumlah	3.601.146.462.347	1.615.000.000.000	Sub Total
Total	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	Total

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Modal Kerja I No.CRO.KP/206/KMK/12 Addendum XII (keduabelas) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 September 2024 sampai dengan 25 September 2025
Tujuan	: Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	: 8,5% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Modal Kerja II No.WCO.KP/444/KMK/21 Addendum III (ketiga) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 September 2024 sampai dengan 25 September 2025.
Tujuan	: Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	: 8,5% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Fasilitas Non-Cash Loan No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (pertama) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 25 September 2024 sampai dengan 25 September 2025
Tujuan	: Bank Garansi untuk keperluan tender dan retensi atau pemeliharaan proyek kerja sama dengan Pemerintah dann pengiriman surat atau paket atau logistik Perusahaan
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan
Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Fasilitas Non-Cash Loan No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (pertama) tanggal 23 September 2024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Working Capital Loan Agreement I No.CRO.KP/206/KMK/12 Addendum XII (twelfth) dated September 23, 2024
Limit	: Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah)
Period	: September 26, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Working capital to meet the needs of daily transaction funds
Interest Rate	: 8.5% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Working Capital Loan Agreement II No.WCO.KP/444/KMK/21 Addendum III (third) dated September 23, 2024
Limit	: Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)
Period	: September 26, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Working capital to meet the needs of daily transaction funds
Interest Rate	: 8.5% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement of Non-Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023. Addendum I (first) dated September 23, 2024
Limit	: Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)
Period	: September 25, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Bank Guarantee for tender purposes and retention or maintenance of cooperation projects with the Government and delivery of letters or packages or Company logistics
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis
Loan Agreement	: Credit Agreement of Non-Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023. Addendum I (first) dated 23 September 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Persetujuan Kredit No. 62 tanggal 14 Maret 2024 Addendum XIII (Ketiga Belas)
Plafond	: Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 17 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Jenis Kredit	: <i>Term Loan</i>
Tingkat Bunga	: 9,75%
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Persetujuan Kredit No. 09 tanggal 14 Maret 2024 Addendum XIV (Keempat Belas)
Plafond	: Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 17 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2025
Tujuan	: Pembiayaan Belanja Modal Perusahaan
Jenis Kredit	: <i>Term Loan</i>
Tingkat Bunga	: 9,50%, sejak Oktober 2023 menjadi 9,75%
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 376/Add-KCK/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
Fasilitas Kredit	: Time loan revolving dengan limit Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) Fasilitas kredit lokal dengan limit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 28 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada Pihak Ketiga
Jenis Kredit	: <i>Time Loan Revolving</i>
Tingkat Bunga	: 8,60% per tahun

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Loan Approval No. 62, dated March 14, 2024 Addendum XIII (thirteenth)</i>
<i>Limit</i>	: <i>Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>March 17, 2024 until March 16, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Term Loan</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>9.75% per annum</i>
<i>Collateral</i>	: <i>Clean basis</i>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Loan Approval No. 09, dated March 14, 2024 Addendum XIV (Fourteenth)</i>
<i>Limit</i>	: <i>Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>March 17, 2024 until March 16, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>To Finance the Company's Capital Expenditure</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Term Loan</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>9.50%, since October 2023 to 9,75%</i>
<i>Collateral</i>	: <i>Clean basis</i>

PT Bank Central Asia Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Credit Agreement No. 376/Add-KCK/2024 dated October 28, 2024</i>
<i>Credit Facilities</i>	: <i>Time loan revolving with limit facilities Rp1,400,000,000,000 (one trillion four hundred billion rupiah) Local credit facility with limit facilities Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>October 28, 2024 until October 29, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>Operational Working Capital of the Company, especially payment to Third Parties</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Time Loan Revolving</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>8.60% per annum</i>

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 22 Februari 2024
Fasilitas Kredit	: Demand loan dengan limit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dan tambahan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,25% per tahun
Provisi	: 0,10% untuk tambahan dan 0,05% untuk perpajakan per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perjanjian Kredit	: Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 125 Tanggal 25 Juni 2024.
Fasilitas Kredit	: Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan limit Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha penyaluran bantuan Pemerintah
Tingkat Bunga	: 8,35% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Sinarmas Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 002-Corp. Banking/P-005/DL/VIII/2024-3 tanggal 22 Agustus 2024
Fasilitas Kredit	: Demand Load (Revolving – Uncommitted) dengan limit Rp350.000.000.000
Jangka Waktu	: 30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	: 9,50%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya plafon
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Loan Approval No. 03 dated February 22, 2024
Credit Facilities	: Demand loan with a limit of Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) and an additional Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah)
Period	: February 22, 2024 until February 22, 2025
Purposes	: Operational Working Capital for logistics, shipping and financial service
Interest Rate	: 8.25% per annum
Provision	: 0.10% for additional and 0.05% for extension per year of the credit limit amount
Collateral	: Clean basis

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Loan Agreement	: Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 05 dated June 25, 2024.
Credit Facilities	: Musyarakah Sharia Current Account Financing (PRKS) with limit facilities Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah)
Period	: June 29, 2024 until June 29, 2025
Purposes	: Working Capital for government aid distribution
Interest Rate	: 8.35% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank Sinarmas Tbk

Loan Agreement	: Loan Approval No. 002-Corp. Banking/P-005/DL/VIII/2024-3 dated August 22, 2024
Credit Facilities	: Demand Load (Revolving – Uncommitted) with limit facilities Rp350,000,000,000
Period	: August 30, 2024 until August 30, 2025
Purposes	: Operational Working Capital of the Company, especially payment to third parties
Interest Rate	: 9.50%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank KB Bukopin Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No LIV/128/KB BUKI/ADD-PK-REG/XI/2024 tanggal 21 November 2024
Fasilitas Kredit	: Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 7 Desember 2024 sampai dengan 7 Desember 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,10% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 26 Juni 2024
Fasilitas Kredit	: Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2025
Tujuan	: Modal Kerja
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Neo Commerce Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 29 Juli 2024
Fasilitas Kredit	: Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2025
Tujuan	: Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 29 Juli 2024
Fasilitas Kredit	: Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2025
Tujuan	: Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per pencairan
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No LIV/128/KB BUKI/ADD-PK-REG/XI/2024 dated November 21, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion Rupiah)
Period	: December 7, 2024 until December 7, 2025
Purposes	: Operational Working Capital of the Company, especially payment to third parties
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.10% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 4 dated June 26, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion rupiah)
Period	: June 26, 2024 until June 26, 2025
Purposes	: Working Capital
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank Neo Commerce Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 110 dated July 29, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion rupiah)
Period	: July 29, 2024 until July 29, 2025
Purposes	: Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 110 dated July 29, 2024
Credit Facilities	: Rp100,000,000,000 (One hundred billion rupiah)
Period	: July 29, 2024 until July 29, 2025
Purposes	: Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per disbursement
Collateral	: Clean Basis

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perjanjian Kredit : Perjanjian Kredit Nomor 83 Tanggal
30 Desember 2024
Fasilitas Kredit : Rp. 150.000.000.000 (Seratus lima
puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu : 30 Desember 2024 sampai dengan 30
Desember 2025
Tujuan : Tambahan Modal Kerja usaha jasa
logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga : 8,5%
Provisi : 0,25% per pencairan
Jaminan : Tanpa Jaminan

Berikut uraian pembatasan masing-masing fasilitas pinjaman bank:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Loan Agreement : Credit Agreement No 83 dated
December 30, 2024
Credit Facilities : Rp150,000,000,000 (One hundred and
fifty billion rupiah)
Period : December 30, 2024 until December
30, 2025
Purposes : Additional Working Capital for
logistics, shipping, and financial
services businesses
Interest Rate : 8.5%
Provision : 0.25% per disbursement
Collateral : Clean Basis

The following is a description of the restrictions on each bank loan facilities:

<u>Nama Bank/ Bank Name</u>	<u>Rasio/ Ratio</u>	<u>Batasan/ Covenants</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,2x/Maximum 2.2x Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank Central Asia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio kewajiban terhadap ekuitas/Liabilities to equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank Maspion Tbk	Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio lancar/Current ratio Rasio kewajiban terhadap ekuitas/Liabilities to equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank Sinarmas Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank IBK Indonesia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 3x/Maximum 3x
PT Bank Neo Commerce Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 3x/Minimum 3x
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 1x/Maximum 1x Minimal 2x/Minimum 2x
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2,5x Minimal 100%/Minimum 100%

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG

19. LONG-TERM LOANS

a. Liabilitas Sewa

a. Lease Liabilities

	2024	2023	
Liabilitas Sewa			Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	130.921.740.724	22.928.966.765	Lease Liabilities
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(42.139.256.365)	(7.734.098.789)	Less Current Maturities
Jumlah	88.782.484.359	15.194.867.976	Total

b. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi

b. Medium Term Notes and Bonds

	2024	2023	
Nilai Nominal			Par Value
Obligasi I Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	Obligasi I Seri A
Obligasi I Seri B	400.000.000.000	400.000.000.000	Obligasi I Seri B
MTN Posindo 03 tahap 1	-	325.000.000.000	MTN Posindo 03 stage 1
Sub Jumlah	500.000.000.000	825.000.000.000	Sub Total
Dikurangi Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi	(2.449.999.993)	(6.538.541.667)	Less unamortized Issuance Cost
Jumlah MTN & Obligasi - Bersih	497.550.000.007	818.461.458.333	Total MTN & Bonds - Net
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(99.469.166.668)	(323.361.458.333)	Less Current Portion
Jumlah Jangka Panjang	398.080.833.339	495.100.000.000	Total Long-term Portion

Pinjaman Jangka Menengah

Utang MTN merupakan surat utang berjangka menengah (*Medium Term Notes*) yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk penggantian kewajiban yang ada (kredit perbankan/KMK) dengan kewajiban utang lain (*refinancing*). Dalam melakukan penerbitan ini Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No.356/DEKOM/1218 tanggal 18 Desember 2018 dan No.278/DEKOM/0821 tanggal 16 Agustus 2021.

Medium Term Notes diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri.

MTN Posindo-03 Tahap I Tahun 2021 telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH No. 39 tanggal 29 Desember 2021 dengan cara penempatan dana terbatas (*private placement*) dengan jumlah sebesar Rp325.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 29 Desember 2021 dengan bunga 10,50%.

Berdasarkan perjanjian MTN, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Minimal 100%

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas MTN Posindo-03 Tahap I.

Medium Term Notes

MTN debt is a medium-term note issued by PT Pos Indonesia (Persero) to support the provision of funds for the obligation replacement (bank credit/KMK) with other debt obligations (*refinancing*). In conducting this issuance, the Company has received approval from the Board of Commissioners based on letter No.356/DEKOM/1218 dated December 18, 2018 and No.278/DEKOM/0821 dated August 16, 2021.

Medium Term Notes are issued in stages consisting of several series with maximum principal value amounting to Rp1,000,000,000,000.

MTN Posindo-03 Phase I of 2021 has been ratified by Notary Fathiah Helmi SH No. 39 dated December 29, 2021 by private placement of funds in the amount of Rp325,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date which is December 29, 2021 with an interest of 10.50%.

Based on the MTN agreement, the Company has an obligation to ensure and maintain financial ratios as follows:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) Maximum 5
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Minimum 100%

On December 24, 2024, the Company has made full payment of MTN Posindo-03 Phase I.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

b. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

b. Medium Term Notes and Bonds (Continued)

Obligasi

Bonds

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2022 untuk mendukung ketersediaan dana dan operasional Perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam surat No. S-596/MBU/09/2022 perihal persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Surat Berharga Lainnya PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 21 September 2022.

The Company has issued Bond in 2022 to support the availability of funds and the Company's operations. The Company has obtained approval from the Board of Commissioners in letter No. S-596/MBU/09/2022 regarding the approval of the Planned Issuance of Bond and/or Other Securities of PT Pos Indonesia (Persero) on September 21, 2022.

Obligasi I Pos Indonesia telah disahkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 tanggal 13 Desember 2022 tentang Addendum III dan pernyataan kembali perjanjian emisi obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 bahwa PT Pos Indonesia (Persero) menerbitkan Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan ketentuan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 10,90%. Obligasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000 dengan tenor selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 11,75%.

Pos Indonesia's Bond I have been certified by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 dated December 13, 2022 concerning Addendum III and restatement of the I Pos Indonesia's bond issuance agreement for 2022 that PT Pos Indonesia (Persero) issues bonds of Rp500,000,000,000 with the provisions for Series A Bonds of Rp100,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date, which is December 28, 2022 with an interest of 10.90%. Series B bonds of Rp400,000,000,000 with a tenor of 5 years from the issuance date, December 28, 2022 with an interest of 11.75%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat irA- dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) tanggal 7 Agustus 2023.

As of December 31, 2023, the Company's bond rating has been rated irA- by PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dated August 7, 2023.

Perusahaan sudah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

The Company has appointed PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as trustee.

Perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Perusahaan.

As underwriters for the issuance of Bond, the Company has appointed PT Bahana Sekuritas and PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Biaya penawaran umum adalah sebesar Rp9.690.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

The cost of the public offering is Rp9,690,000,000 and with details as follows:

No.	Uraian/ Description	Jumlah Biaya/ Total Cost
1.	Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek/Underwriting Fee	
	Biaya Jasa Manajemen/Management Fee	4.000.000.000
	Biaya Jasa Penjaminan/Underwriting Fee	1.400.000.000
	Biaya Jasa Penjualan/Selling Fee	1.400.000.000
	Sub Jumlah/Sub Total	6.800.000.000
2.	Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal/Capital Market Support Professional Fees	
	Biaya Jasa Akuntan Publik/Audit Fee	1.245.000.000
	Biaya Jasa Konsultan Hukum/Legal Fee	600.000.000
	Biaya Notaris/Notary Fee	100.000.000
		1.945.000.000
3.	Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal/Capital Market Supporting Institution Fees	450.000.000
4.	Biaya Lain-lain/Other Fees	495.000.000
Jumlah/Total		9.690.000.000

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Yang termasuk biaya lain-lain adalah biaya pernyataan pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya-biaya untuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan prospektus awal dan prospektus, formulir, biaya iklan koran dan audit penjabatan.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan pada laporan keuangan akhir tahun (Desember) *audited* sebagai berikut:

1. Rasio Lancar Minimal 1x
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memenuhi semua persyaratan *covenant* yang ditentukan dalam perjanjian.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang obligasi sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 29.

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

c. Medium Term Notes and Bonds (Continued)

Bonds (Continued)

Other costs include OJK registration statement fee, IDX listing fee, fees for KSEI, initial bidding costs, printing costs for initial prospectus and prospectus, forms, newspaper advertising fees and allotment audits.

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios on year end audited financial statements (December) as follows:

1. *Current Ratio Minimum 1x*
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%*

As of December 31, 2024, the Company has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of bonds payable as disclosed in Note 29.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan merupakan imbalan pasti sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan PSAK No. 219 (Revisi 2013) dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Penyisihan ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, sebagaimana tercantum dalam laporan No. 0081/RP-PSAK/KKA.AB/III/25 tanggal 18 Maret 2025.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pesangon		
Perusahaan	1.007.095.042.256	1.104.990.961.370
Entitas anak	4.230.019.953	3.035.817.531
Jumlah	<u>1.011.325.062.209</u>	<u>1.108.026.778.901</u>

Severance
The Company
Subsidiaries
Total

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi sebagai beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya Bunga	92.367.208.652	99.041.729.730
Biaya Jasa Kini	64.333.326.808	80.367.230.162
Biaya Jasa Lalu	-	(98.756.178.563)
Harapan Hasil Investasi	(18.605.174.828)	(15.078.071.402)
Provisi untuk Imbalan Terminasi	38.030.200	44.128.000
Jumlah	<u>138.133.390.832</u>	<u>65.618.837.927</u>

Interest Expense
Current Service Cost
Past Service Cost
Return on Plan Assets at BoP - Expected
Provision for Excess Benefit Payment
Total

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits granted to employees is a defined benefit in accordance with Law No. 06/2023.

The Company recognizes the provision for employee benefits in accordance with PSAK 219 (Revised 2013) and the Omnibus Law No. 11 of 2020. This provision is based on calculations done by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, as stated in report No. 0081/RP-PSAK/KKA.AB/III/25 dated March 18, 2025.

Details of employee benefit obligations are recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

Employee benefits expenses recognized in the profit or loss as general and administrative expenses are as follows:

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

Employee benefits expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	2024	2023	
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Kewajiban:			Actuarial (Gain) or Loss on Obligation:
Perubahan Asumsi Keuangan	(19.183.219.406)	9.534.106.273	Change in Financial Assumption
Penyesuaian Pengalaman	(395.376.032.666)	(20.110.076.057)	Experience Adjustment
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada			Actuarial (Gain)/Loss on
Nilai Wajar Aktiva Program	296.539.149.915	(46.996.969.066)	Plan Assets
Jumlah	(118.020.102.157)	(57.572.938.850)	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of the present value of defined benefit liabilities, and the reconciliation of the present value of defined benefit obligations and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:

	2024	2023	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value of Defined Benefit
Awal Periode	1.107.177.044.090	1.209.887.794.624	Obligations
Beban Tahun Berjalan	138.133.390.832	65.618.837.927	Current Year Expense
Pembayaran Manfaat	(117.356.998.095)	(109.611.722.659)	Benefit Payments
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	(118.020.102.157)	(57.572.938.850)	Actuarial (Gain)/Loss
Iuran Perusahaan Selama Periode Berjalan	1.124.809.893	(239.154.319)	Company Contribution Paid In Year
Penyesuaian	266.917.646	(56.037.822)	Adjustment
Jumlah	1.011.325.062.209	1.108.026.778.901	Total

Penyisihan imbalan kerja di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* modifikasi IFRIC berdasarkan perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Arya Bagiastra, aktuaris independen, dengan asumsi aktuarial utama sebagai berikut:

The estimated liabilities on employee benefits are computed using the *Projected Unit Credit* method IFRIC modification based on the actuarial reports as of December 31, 2024 and 2023 conducted by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, independent actuaries, with the following principal assumptions:

	2024	2023	
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%-6,50%	5,50%	Salary Increase Rate
Tingkat Bunga Diskonto	7,10%	6,67%	Interest Discount Rate
Usia Pensiun Normal	56 tahun/years old	56 tahun/years old	Normal Retirement Age
Tingkat Pengunduran Diri	10%	10%	Resignation Rate
Tingkat Cacat	1%	1%	Disability Rate
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ Indonesian Mortality Table 2019		Mortality Rate

Dasar penetapan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

The factors considered in determining the charge in discount rate are as follows:

1. Kelangsungan Usaha Perusahaan.
 2. Pengembangan terhadap aset program pada Dana Pensiun Pos Indonesia diharapkan berada di atas 10% sebagaimana tingkat bunga aktuarial yang dipergunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini adalah 10%.
 3. Informasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) tentang imbal hasil investasi yang telah dilakukan selama ini.
1. The Going Concern of the Company
 2. Development of the assets in the Pension Fund program of Pos Indonesia was expected to be over 10% as an actuarial interest rate on Pension Fund program of Pos Indonesia is 10%.
 3. Information obtained from PT Pos Indonesia (Persero) about the yield of investments that have been made so far.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Berikut adalah analisa ekspektasi jatuh tempo dari manfaat pasca kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	2024
Dalam 0 dan 2 tahun	453.895.944.272
Antara 2 dan 5 tahun	405.712.305.115
Antara 5 dan 10 tahun	399.178.908.607
Diatas 10 tahun	2.725.138.564.815

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 saldo Liabilitas Imbalan Kerja PFI adalah sebesar Rp1.293.812.359 dan Rp944.069.123.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI membuat cadangan jangka panjang untuk direksi dan karyawan pengkaryaan yang telah bekerja minimal 6 bulan di PT Pos Properti Indonesia. Tidak terdapat pendanaan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.415.908.913 dan Rp849.734.811.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan. Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan sesuai PSAK 219 (Revisi 2013) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.520.298.681 dan sebesar Rp1.242.013.597.

Analisis Sensitivitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

	2024
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto	
Jika Tingkat +1%	967.801.622.029
Jika Tingkat -1%	1.101.949.952.400
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat +1%	1.053.882.771.229
Jika Tingkat -1%	965.333.043.755

21. EKUITAS

a. Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto. SH.M.Kn.. No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000.

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit are as follow:

	2023	
515.708.561.999		Within 0 and 2 years
577.180.093.856		Between 2 and 5 years
483.451.322.322		Between 5 and 10 years
3.481.285.556.464		Above 10 years

Employee benefits liability of PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

As of December 31, 2024 and 2023, the balance of PFI'S Post-Employment Benefit Liabilities are Rp1,293,812,359 and Rp944,069,123.

Employee Benefits Liability of PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI makes long-term reserves for directors and employees who have worked for at least 6 months at PT Pos Properti Indonesia. There is no funding in relation to employee benefit liabilities. The total employee benefit liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are Rp1,415,908,913 and Rp849,734,811.

Employee Benefits Liability of PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Employee benefits for the current year are reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of financial position. The balance of the employee benefits obligation in accordance with PSAK 219 (Revised 2013) as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,520,298,681 and Rp1,242,013,597 respectively.

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-employment benefit as of December 31, 2024 and 2023 to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	2023	
1.344.517.768.767		Discount Rate Sensitivity Analysis
1.427.165.035.669		If Rate +1%
		If Rate -1%
1.428.772.681.255		Salary Increase Sensitivity Analysis
1.342.291.463.602		If Rate +1%
		If Rate -1%

21. EQUITY

a. Share Capital

Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto. SH. M.Kn. dated August 15, 2008, the shareholding of the Company is fully owned by the Republic of Indonesia with 425,000 shares or Rp425,000,000,000.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. EKUITAS (Lanjutan)

21. EQUITY (Continued)

a. Modal Saham (Lanjutan)

a. Share Capital (Continued)

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 tanggal 3 Januari 2013 para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 dated January 3, 2013, shareholders decided as follows:

- Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 30.023 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000, sehingga seluruhnya seharga Rp30.023.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan sebesar Rp30.023.000.000 dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp30.022.899.470 yang berasal dari pengalihan barang milik negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2012.
 - Sebesar Rp100.530 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011.
- Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perusahaan yang semula Rp425.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.023.000.000.

- Approving expenses/shares placement that is still in deposits consisting of 30,023 shares, with par value of Rp1,000,000, thereby the total amount will be Rp30,023,000,000 which all part taken by the Government of Republic of Indonesia.
- Increase in the Government of Republic of Indonesia capital to the Company, amounted to Rp30,023,000,000 as follows:
 - Amounted to Rp30,022,899,470 that originated from the transfer of goods owned by the state as stated in Government Regulation No. 67 year 2012.
 - Amounted to Rp100,530 that originated from part of the capitalization of the Company's allowance until book year 2011.
- Increase in the Company's paid-up capital from Rp425,000,000,000 to Rp455,023,000,000.

2024 dan/and 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Share Issued and Fully Paid</i>	Persentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Nominal per Lembar saham <i>Nominal Share</i>	Jumlah Modal Disetor/ <i>Total Paid-up Capital</i>
Negara Republik Indonesia	455.023	100%	1.000.000	455.023.000.000
Jumlah	455.023	100,00%	1.000.000	455.023.000.000

Shareholders
 Negara Republik Indonesia
 Total

b. Tambahan Modal Disetor

b. Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor berasal dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diikuti oleh entitas anak pada tahun 2016 mengacu pada surat keterangan pengampunan pajak Nomor: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 tanggal 2 November 2016 atas setoran pajak tahun 2015 senilai Rp2.344.427.566.

Additional paid-in capital arise from tax amnesty program that the Subsidiary participated in 2016 referring to the tax amnesty certificate Number: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 dated November 2, 2016 for tax payments in 2015 amounting to Rp2,344,427,566.

c. Komponen Ekuitas Lainnya

c. Other Equity Components

2024				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Keuntungan (Kerugian) tahun Berjalan/ <i>Profit (Loss) For the Year</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Pengukuran Kembali				
Imbalan Pasti	(75.065.722.660)	91.974.745.731	29.769.336	16.938.792.407
Selisih Lebih Revaluasi				
Aset Tetap	3.777.846.639.788	-	-	3.777.846.639.788
Jumlah	3.702.780.917.128	91.974.745.731	29.769.336	3.794.785.432.195

Remeasurement of
 Defined Benefit
 Surplus of Revaluation
 of Fixed Assets
 Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. EKUITAS (Lanjutan)

21. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

c. Other Equity Components (Continued)

2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Keuntungan (Kerugian) tahun Berjalan/ Profit (Loss) For the Year	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Pengukuran Kembali					Remeasurement of
Imbalan Pasti	(120.026.621.099)	44.894.930.668	65.967.771	(75.065.722.660)	Defined Benefit
Selisih Lebih Revaluasi					Surplus of Revaluation
Aset Tetap	3.365.475.909.885	412.370.729.903	-	3.777.846.639.788	of Fixed Assets
Jumlah	3.245.449.288.786	457.265.660.571	65.967.771	3.702.780.917.128	Total

d. Kepentingan Non-Pengendali

d. Non-Controlling Interest

2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ Share in Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprensif Lain/ Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance
PT Pos Finansial Indonesia	(45.460.211.440)	195.375.279	(29.809.307)	-	(45.294.645.468)
PT Pos Logistik Indonesia	432.514.147	2.250.489	39.971	21.844.672	456.649.279
Jumlah/Total	(45.027.697.293)	197.625.768	(29.769.336)	21.844.672	(44.837.996.189)

2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ Share in Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprensif Lain/ Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance
PT Pos Finansial Indonesia	(17.938.001.455)	(20.491.252.597)	11.781.505	(7.042.738.893)	(45.460.211.440)
PT Pos Logistik Indonesia	379.793.429	6.791.098	180.130	45.749.490	432.514.147
Jumlah/Total	(17.558.208.026)	(20.484.461.499)	11.961.635	(6.996.989.403)	(45.027.697.293)

e. Laba per Saham Dasar

e. Earnings Per Share

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The basic earnings per share is based on the following:

	2024	2023	
Laba yang Diatribusikan Kepada			Profit Attributable to Owners of the
Pemilik Entitas Induk	746.936.851.666	748.699.105.099	Company
Rata-rata Tertimbang Saham Biasa			Weighted Average Number of Ordinary
untuk Perhitungan			Shares for Computation of Basic
Laba Per Saham Dasar	455.023	455.023	Earning Per Share
Laba Per Saham	1.641.536,48	1.645.409,36	Earnings Per Share

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	2024	2023	
Logistik	2.061.931.398.556	2.176.037.721.479	Logistics
Paket Pos	1.254.282.573.393	1.456.773.750.070	Parcels
Jasa Keuangan	1.070.500.710.572	1.256.664.342.262	Financial Services
Surat Pos	457.650.739.942	437.098.907.316	Postal Main
Properti	173.495.586.234	152.546.415.548	Properties
Jumlah	5.017.861.008.697	5.479.121.136.675	Total

23. BEBAN POKOK LAYANAN

23. COST OF SERVICES

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of services are as follows:

	2024	2023	
Logistik	1.106.845.846.656	1.292.873.463.760	Logistics
Paket Pos	739.792.208.752	1.033.396.472.132	Parcels
Jasa Keuangan	727.653.780.368	861.135.232.956	Financial Services
Surat Pos	382.649.769.003	457.326.475.717	Postal Main
Properti	64.352.580.960	32.497.117.053	Properties
Lainnya	9.511.954.318	3.560.683.820	Others
Jumlah	3.030.806.140.057	3.680.789.445.438	Total

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis biaya sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of expenses are as follows:

	2024	2023	
Pegawai	1.519.144.818.899	1.617.844.499.098	Employees
Operasi	1.166.726.043.496	1.781.439.099.547	Operations
Administrasi	178.293.707.285	162.528.013.005	Administration
Penyusutan (Catatan 11)	109.983.887.689	76.979.741.344	Depreciations (Note 11)
Umum	39.290.236.132	28.458.314.886	General
Amortisasi (Catatan 13)	17.367.446.556	13.539.777.558	Amortizations (Note 13)
Jumlah	3.030.806.140.057	3.680.789.445.438	Total

24. BEBAN USAHA

24. OPERATING EXPENSES

	2024	2023	
Beban Pemasaran			Marketing Expenses
Jasa Keuangan	24.678.323.012	20.852.622.808	Financial Services
Surat Pos dan Paket Pos	4.468.275.731	32.948.917.992	Postal Mails and Parcels
Properti	2.869.976.674	3.061.803.960	Properties
Ritel	1.612.572.022	1.567.100.992	Retails
Logistik	1.230.793.917	11.588.025.107	Logistics
Filateli	351.292.285	241.974.213	Philately
Sub Jumlah	35.211.233.641	70.260.445.072	Subtotal
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Pegawai	798.300.058.344	766.640.619.187	Employees
Operasi	174.569.733.627	132.339.444.248	Operations
Umum	126.098.183.919	144.642.714.545	General
Penyusutan (Catatan 11)	26.815.985.234	41.912.759.702	Depreciations (Note 11)
Administrasi	23.791.748.534	16.699.132.538	Administration
Amortisasi (Catatan 13)	10.341.312.972	8.755.736.468	Amortizations (Note 13)
Sub Jumlah	1.159.917.022.630	1.110.990.406.688	Subtotal
Jumlah	1.195.128.256.271	1.181.250.851.760	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

25. OTHER INCOME (EXPENSES)

	2024	2023	
Pendapatan Lainnya			Other Income
Pendapatan Donasi LPU	366.844.830.481	366.120.584.914	UPS Donation Income
Kenaikan Nilai Wajar			Increase in Fair Value of
Properti Investasi (Catatan 12)	172.463.187.446	168.004.840.966	Investment Property (Note 12)
Pendapatan Pemulihan Kerugian			Income from
Perusahaan	54.527.828.809	59.177.796.699	Recovery Losses
Pendapatan Pelepasan Aset Tetap	-	12.283.680.595	Gain on Fixed Asset Disposal
Pendapatan QSF-Penyelenggaraan Pos	798.944.464	923.349.130	QSF Revenue - Postal Maintenance
Lainnya	23.483.496.130	22.217.834.505	Others
Sub Jumlah	618.118.287.330	628.728.086.809	Sub Total
Beban Lainnya			Other Expenses
Purna Bakti	(166.258.048.293)	(175.301.843.409)	Pension Cost
Beban yang Tidak Didistribusikan	(73.265.007.094)	(122.190.027.207)	Undistributed Cost
Denda Pajak	(20.609.212.766)	(27.935.892.177)	Penalty Tax
Kerugian Aset Tetap	(1.007.768.997)	(352.656.105)	Loss of Fixed Assets
Sumbangan Bencana Alam	(45.678.930)	(49.540.050)	Natural Disaster Donations
Sub Jumlah	(261.185.716.080)	(325.829.958.948)	Sub Total
Jumlah	356.932.571.250	302.898.127.861	Total

Beban lainnya dengan kategori purna bakti adalah beban - beban yang dikeluarkan Grup untuk pembayaran pensiunan eks karyawan Grup seperti bantuan kesehatan, bantuan pangan dan perbaikan gizi.

Other expenses in the after-service category are the burdens issued by the Group for the payment of retired ex-employees of the Groups such as health assistance, food assistance and nutritional improvements.

Beban yang tidak didistribusikan merupakan kelompok beban lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi seperti beban kesekretariatan, kegiatan hukum, lainnya.

Undistributed expenses represent other costs that are not directly related to production activities such as the secretarial cost, legal activity, and others.

26. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

26. FINANCE INCOME (COST)

	2024	2023	
Pendapatan Keuangan			Finance Income
Pendapatan Selisih Kurs	16.830.894.477	30.322.878.977	Foreign Exchange Diff Income
Pendapatan Jasa Giro	7.215.430.062	10.004.759.893	Current Account Service Income
Pendapatan Penempatan Dana di Bank	7.484.529.575	3.233.763.485	Fund Placement Income in Bank
Sub Jumlah	31.530.854.114	43.561.402.355	Sub Total
Beban Keuangan			Finance Cost
Bunga Pinjaman	(317.302.182.402)	(170.439.111.903)	Loan Interest
Bunga Kupon MTN	(92.025.000.000)	(92.025.000.000)	MTN Coupon Interest
Beban Pendanaan	(14.684.058.340)	(14.254.784.262)	Funds Expense
Pengelolaan Treasury	(2.923.118.584)	(6.429.191.554)	Treasury Management
Selisih Kurs atas Transaksi Valas	(7.872.437.428)	26.687.614.147	Exchange Difference on Forex
Beban Administrasi Bank	(4.427.420.919)	(5.188.393.337)	Bank Administration Expense
Sub Jumlah	(439.234.217.673)	(261.648.866.909)	Sub Total
Jumlah	(407.703.363.559)	(218.087.464.554)	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties who have transactions with the Group, and includes the nature of the relationship and transaction:

No	Pihak Berelasi/Related Parties	Sifat Hubungan/Nature of Relationship	Transaksi/Transaction
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ Account bank, loans bank facility, and trade receivables
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank, piutang usaha dan utang usaha/ Account bank, trade receivables and trade payables
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ Account bank and trade receivables
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ Account bank, loans bank facility, and trade receivables
5	PT Bank Mandiri Taspen	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ Account bank and trade receivables
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank Account bank
7	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
8	Perum Bulog	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
9	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
10	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
11	PT Pertamina (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
12	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
13	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
14	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
15	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
16	PT Asabri (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
17	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

As of and For the Year Ended December 31, 2024

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

The details of transactions with related parties are as follows:

			Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	Saldo/ Amount		2024	2023	
Deposito Berjangka (Catatan 6)					Time Deposits (Note 6)
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105.000.000.000	35.000.000.000	0,44%	0,26%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	49.500.000.000	0,02%	0,36%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	43.000.000.000	18.000.000.000	0,18%	0,13%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20.000.000.000	5.500.000.000	0,08%	0,04%	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	173.000.000.000	108.000.000.000	0,72%	0,79%	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) **27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)**

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Pendapatan Diterima di Muka <u>Rupiah</u>					Accrued Revenues <u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri Taspen	1.837.564.931	-	0,01%	0,00%	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.664.061.608	-	0,01%	0,00%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.563.706.982	-	0,01%	0,00%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero) Tbk	1.102.833.889	-	0,00%	0,00%	PT Bio Farma (Persero) Tbk
Perum Bulog	471.739.004.268	286.236.015.716	1,97%	2,10%	Perum Bulog
PT Rajawali Nusantara Indonesia	81.772.905.659	103.629.226.557	0,34%	0,76%	PT Rajawali Nusantara Indonesia
Jumlah	553.511.909.927	389.865.242.273	2,31%	2,86%	Total

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Aset Lancar Lainnya <u>Rupiah</u>					Other Current Assets <u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	231.971.557.450	234.806.998.514	0,97%	1,72%	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	76.428.117.631	76.383.325.096	0,32%	0,56%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.299.738.942	9.349.738.942	0,04%	0,07%	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.700.582.143	0,00%	0,01%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	15.257.262	0,00%	0,00%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	317.699.414.023	322.255.901.957	1,32%	2,36%	Total

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Utang Lainnya <u>Rupiah</u>					Other Payables <u>Rupiah</u>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.591.394.607	4.591.394.607	0,02%	0,13%	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	-	7.062.205.000	0,00%	0,08%	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk
Jumlah	4.591.394.607	11.653.599.607	0,02%	0,21%	Total

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Pinjaman Bank (Catatan 17) <u>Rupiah</u>					Bank Loans (Note 17) <u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	449.986.907.517	370.604.000.000	1,88%	6,71%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk	370.000.000.000	300.000.000.000	1,54%	5,43%	PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	819.986.907.517	670.604.000.000	3,42%	12,14%	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI
(Lanjutan)

Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp36.397.969.845 dan Rp18.120.988.959 sampai dengan 31 Desember 2024 dan Rp26.947.964.975 dan Rp16.713.310.728 periode yang sama tahun 2023.

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

The amount of compensation (income) in the form of salary, honorarium and allowances paid to the Board of Directors and Board of Commissioners is Rp36,397,969,845 and Rp18,120,988,959 until December 31, 2024 and Rp26,947,964,975 and Rp16,713,310,728 for the same period in 2023.

28. PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ Partners	Nomor Perjanjian/ Agreements Number	Perjanjian/ Agreements	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
PT Lion Express	PKS.296/DIR-3/1222	Pendistribusian Kirimanpos Udara Dalam Negeri/Domestic Air Mail Distribution	30 Desember/ December 2022	29 Desember/ December 2024
	06/LE-PKS/SLS/I/2022			
PT Stefany Jaya Sentosa (Agen dari Asiana Air)	PKS 117/DIR-3/0523	Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengangkutan Kirimanpos Internasional/ Cooperation Agreement on the Transportation Service of International Mail	26 Mei/ May 2023	25 Mei/ May 2025
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	6/3.4/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2024/ Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program for the Year 2024	26 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	01/5.4/PKS/HK.01/01/2024	Penyaluran Program Sembako Tahun 2024/Distribution of Basic Food Program for the Year 2024	19 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Kementerian Sosial	PKS012/DIR-4/0124			
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023	Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024/ Distribution and Sales Work of Directorate General of Taxes Stamps for Fiscal Year 2024	1 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-02/DP303/PG.04/01/2024	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024/Transportation Services Agreement for the Distribution of Government Rice Reserve Food Assistance in 2024	1 Januari/ January 2024	30 Juni/ June 2024
	PKS001/DIRUT/0124			
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-652/DP303/PG.04/07/2024	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024/Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2024	1 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2024
	PKS209/DIRUT/0724			
PT Taspen (Persero)	JAN-116/DIR/2024	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening/Payment of Pension Time Savings, Pension, Work Accident Benefit and Death Benefit through an account	21 Juni/ June 2024	20 Juni/ June 2026
	PKS.174/DIR-4/0624			

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

Mitra/ Partners	Nomor Perjanjian/ Agreements Number	Perjanjian/ Agreements	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2375/DJPPI.2/HK.04.02/09/2024	Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal/ Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services	1 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PKS 238/SVP Finance Operation/1222	Layanan Cash Management/ Cash Management Services	1 Januari/ January 2023	31 Desember/ December 2024
	WHS/052/01122022			
Emudhra Pte Limited	45/DIR-POSFIN/PKS/2019	Pemasangan Fasilitas Certifying Authority dan Kegiatan Lain yang Terkait/ Installation of Certifying Authority Facilities and Other Related Activities	03 Desember/ December 2019	02 Desember/ December 2024
PT Asuransi Tri Pakarta	PKS.364/DIR-1/1223	Jasa Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Serta Asuransi Kas Tahun 2024/Building And Inventory Insurance Services And Cash Insurance For 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2024
	128/DIR/PKS.2023			
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	5/S.Pj-UP/RNI.01/VIII/2024	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2024/Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2024	5 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2024
	PKS231/DIRUT/0824			
PT Eka Jaya Agung	54	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT. Pos Indonesia (Persero) di Jalan Teuku Umar Denpasar/ Cooperation Agreement Regarding the Utilization of Land Owned by PT. Pos Indonesia (Persero) on Teuku Umar Street, Denpasar	23 Agustus/ August 2004	Sampai dengan berakhirnya masa laku/ Until the expiration of the validity period
PT Arkan Global Utama	211/Penj/Korp/1023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Mid Miles Penyediaan Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ Cooperation Agreement on Mid Miles Process for Providing Transportation Services for the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid by Perum Bulog Phase II East Java 2023	11 September/ September 2023	31 Desember/ December 2023
	001/ARKAN-POS/PKSCBP BAPANG/IX/2023			
PT Yasa Artha Trimanunggal	212/Penj/Korp/1023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Last Miles Penyaluran Bantuan Bapang CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ Cooperation Agreement on the Last-Mile Process for the Distribution of Government Rice Reserve Aid (CBP) by Perum Bulog Phase II East Java 2023	8 September/ September 2023	30 November/ November 2023
	002/PKS/YASA-POS/CBP BAPANG/IX/2023			
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	82/4.4/PR.07.00/1/2024	Penyaluran Bantuan Permakanaan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024/ Distribution of Food Assistance for People with Disabilities in 2024	12 Januari/ January 2024	30 Juni/ June 2024
	PKS015/DIR-4/0124			

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

Mitra/ <i>Partners</i>	Nomor Perjanjian/ <i>Agreements Number</i>	Perjanjian/ <i>Agreements</i>	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	124/4.3/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2024/ <i>Distribution of Food Assistance for Elderly Single Families in 2024</i>	22 Januari/ <i>January</i> 2024	31 Desember/ <i>December</i> 2024
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2024/ <i>Distribution of Social Assistance for the National Economic Heroes Program for the Year 2024</i>	29 Januari/ <i>January</i> 2024	31 Desember/ <i>December</i> 2024
PT Bank BTPN Tbk	PKS.227/DIR-4/0824	Pembayaran Manfaat Pensiun Di Kantor Pos Secara Host to Host/ <i>Host to Host Pension Benefit Payment at Post Office</i>	3 Juli/ <i>July</i> 2024	2 Juli/ <i>July</i> 2026
Koperasi Simpan Pinjam Nusantara	026/PKS-KSP-Nusantara/LGL/VII/2020	Kerja Sama Operasi Pelayanan Jasa Keuangan Bagi Pensiunan secara Terintegrasi/ <i>Operation Cooperation for Integrated Financial Services for Pensioners</i>	29 Juli/ <i>July</i> 2020	28 Juli/ <i>July</i> 2024
PT Dapensi Dwikarya	1015/SVP-Financial-Service/0423481/IV/2023	Distribusi Kiriman Pos Rute Tersier Berbasis Chargeable Weight Di Wilayah Kerja Regional 1 Medan (Eks Regional Palembang)/ <i>Chargeable Weight Based Tertiary Route Postal Shipment Distribution in Regional Working Area 1 Medan (Former Palembang Regional)</i>	1 Maret/ <i>March</i> 2024	31 Mei/ <i>May</i> 2024
China Airlines	3/Subdit IPS/0124	Pengangkutan Kirimanpos International ke Luar Negeri/ <i>Transportation of International Postage to Overseas</i>	1 Januari/ <i>January</i> 2024	30 Juni/ <i>June</i> 2024

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko keuangan Grup bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas portofolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko keuangan, Grup mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai tukar), risiko likuiditas, dan risiko kredit. Masing-masing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

The Group's financial risk management is dynamic with the purpose to identify, measure, map, and developed alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of financial risk management, the Group identify the risks faced relating to financial instruments, namely market risk (interest rate and exchange rate), liquidity risk, and credit risk, each of these risks can be explained as follows:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos untuk dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut. Kesulitan likuiditas (permintaan penjadwalan ulang pembayaran) dan tidak dikenal alamat terakhir.

a. Credit Risk

Credit risk in receivables is due to the uncertainty of postal customers to pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy. Difficulty in liquidity (request for rescheduling of payment), and no last known address.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit mendekati nilai tercatat bersih dari aset keuangan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the maximum Group exposure of the credit risk approximates the net carrying amounts of the outstanding financial assets with details as follows:

	2024	2023	
Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	-	
Piutang Usaha	336.931.275.934	385.402.397.127	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	880.739.688.637	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	2.338.569.956.643	477.506.326.678	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	930.909.600.985	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam			Receivable Losses include in
Aset Tidak Lancar Lainnya	13.811.808.767	13.811.808.767	Other Non-Current Assets
Jumlah	7.814.126.551.263	5.342.288.243.937	Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan sesuai dengan peringkat kredit debitur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table provides the credit quality and age analysis of financial assets according to credit ratings of debtors as of December 31, 2024 and 2023:

2024				
Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ Past Due But Not Impaired <i><1 Tahun/Year</i>	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ Past Due and Impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	-	2.063.363.227.142	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	-	33.073.529.725	Restricted Bank
Piutang Usaha	-	-	336.931.275.934	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	-	2.011.539.275.002	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	-	-	2.338.569.956.643	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	-	1.016.837.478.050	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam				Receivable Losses include in
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	13.811.808.767	Other Non-Current Assets
Jumlah	5.124.813.509.919	-	2.689.313.041.344	Total

2023				
Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ Past Due But Not Impaired <i><1 Tahun/Year</i>	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ Past Due and Impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan Setara Kas	2.653.918.421.743	-	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	-	-	385.402.397.127	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	-	880.739.688.637	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	-	-	477.506.326.678	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	-	930.909.600.985	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam				Receivable Losses include in
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	13.811.808.767	Other Non-Current Assets
Jumlah	4.465.567.711.365	-	876.720.532.572	Total

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "tidak jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai" termasuk instrumen dengan kualitas kredit yang tinggi karena hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat riwayat gagal bayar atas persyaratan yang dijaminan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*.

"*Past due but not impaired*" adalah barang-barang dengan sejarah *default* sering namun jumlahnya masih tertagih. Terakhir, "*past due and impaired*" adalah mereka yang lama beredar dan telah dilengkapi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

Manajemen yakin akan kemampuan Grup untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada (Catatan 7).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup menghadapi risiko pasar, risiko pertukaran mata uang asing tertentu.

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar Rupiah sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, terutama USD, EUR, GBP, SGD dan CHF.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing merupakan kontribusi secara tunai dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD dan CHF pada kas di bank.

Grup memantau fluktuasi nilai tukar asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan paling diuntungkan kepada Grup pada waktunya. Manajemen saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk masuk ke dalam setiap mata uang *forward/swaps*.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk (Continued)

The credit quality of financial instruments is managed by the Group using internal credit ratings. Financial instruments classified as "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note.

"Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Group with set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss (Note 7).

b. Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market price. The Group are exposed to market risks, particularly interest rate risk and foreign currency exchange risk.

Foreign Exchange Risk

The Group are exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk.

Foreign currency exchange risk is the risk that arises from the changes of exchange rate of Rupiah as the reporting currency against foreign currencies, especially USD, EUR, GBP, SGD and CHF currencies.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

The significant portion of the foreign currency exchange risk is contributed by USD, EUR, GBP, SGD and CHF denominated cash in banks.

The Group monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The Management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

b. Market Risk (Continued)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Foreign Exchange Risk (Continued)

Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban karena Grup melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional ataupun dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan counterpart negara masing-masing.

Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Group use transactions using foreign currency. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal international either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange rates are used in connection with their respective state counterparts.

Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portofolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.

But in general, exchange rate risk begins at recognition of international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company and Subsidiaries income before tax for the period ended December 31, 2024 and 2023:

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) Foreign Currencies	Pengaruh pada Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2024	USD	2,64%	3.153.598.338	December 31, 2024
		-2,64%	(3.153.598.338)	
	EUR	6,18%	-	
		-6,18%	-	
	SGD	0,00%	-	
		0,00%	-	
	GBP	0,00%	-	
		0,00%	-	
	CHF Swiss	4,74%	-	
		-4,74%	-	
	JPY	7,75%	-	
		-7,75%	-	
	SAR	2,73%	-	
		-2,73%	-	
		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) Foreign Currencies	Pengaruh pada Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2023	USD	0,0119%	83.311.205	December 31, 2023
		-0,0119%	(83.311.205)	
	EUR	0,0552%	387.136.609	
		-0,0552%	(387.136.609)	
	SGD	0,2102%	1.475.179.950	
		-0,2102%	(1.475.179.950)	
	GBP	0,8622%	6.051.744.102	
		-0,8622%	(6.051.744.102)	
	CHF Swiss	0,1312%	921.095.908	
		-0,1312%	(921.095.908)	
	JPY	0,0471%	330.930.151	
		-0,0471%	(330.930.151)	

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Tabel dibawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Liquidity risk is the risk that the Group are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. The tables below summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2024 and 2023:

	2024			
	Dibawah 1 tahun/ <i>Below 1 year</i>	Past due but >1 tahun <i>>1 year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang Usaha	651.416.992.385	-	651.416.992.385	Trade Payable
Utang Lainnya	612.179.209.903	-	612.179.209.903	Other Payables
Obligasi	99.469.166.668	398.080.833.339	497.550.000.007	Bond
Pinjaman Bank	4.421.133.369.864	-	4.421.133.369.864	Bank Loans
Liabilitas Sewa	42.139.256.365	-	42.139.256.365	Lease Liabilities
Jumlah	5.826.337.995.185	398.080.833.339	6.224.418.828.524	Total

	2023			
	Dibawah 1 tahun/ <i>Below 1 year</i>	Past due but >1 tahun <i>>1 year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang Usaha	474.354.916.682	-	474.354.916.682	Trade Payable
Utang Lainnya	753.828.360.808	-	753.828.360.808	Other Payables
MTN dan Obligasi	323.361.458.333	495.100.000.000	818.461.458.333	MTN & Bond
Pinjaman Bank	2.285.604.000.000	-	2.285.604.000.000	Bank Loans
Liabilitas Sewa	7.734.098.789	15.194.867.976	22.928.966.765	Lease Liabilities
Jumlah	3.844.882.834.612	510.294.867.976	4.355.177.702.588	Total

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is an analysis of the maturity of the Group's financial liabilities based on contractual payments that are not discounted:

	2024					
	Nilai Buku Tercatat/ <i>Book Value</i>	Arus Kas Wajib/ <i>Cash Flow</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2025/ <i>Obligation to be Paid 2025</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2026/ <i>Obligation to be Paid 2026</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2027/ <i>Obligation to be Paid 2027</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2028/ <i>Obligation to be Paid 2028</i>
Pinjaman Bank/ <i>Bank Loan</i>	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	-	-	-
Obligasi/ <i>Bonds</i>	500.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	-	400.000.000.000	-
Jumlah/Total	500.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	-	400.000.000.000	-

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Pengelolaan Modal

Capital Management

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The main objective of the Group's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize rewards for shareholders.

Kebijakan Grup adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.

The Group policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to finance at a reasonable cost.

Tabel dibawah merupakan ringkasan jumlah modal Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the total capital of the Group as of December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Modal	455.023.000.000	455.023.000.000	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	2.344.427.566	2.344.427.566	
Saldo Laba	4.746.859.678.196	4.019.944.671.201	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya	3.794.785.432.195	3.702.780.917.128	Other Equity Component
Jumlah	8.999.012.537.957	8.180.093.015.895	Total

Perjanjian Bank

Bank Covenant

Kreditur/Creditors

Syarat Kredit/Covenant

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Current Asset/Current Liabilities

Rasio Lancar (kali)

*** Total Utang : Total Ekuitas**

Rasio Utang ke Ekuitas (kali)

(Total utang = Total utang dikurangi dengan Kas)

Rasio Debt Service Coverage (kali)

EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Current Asset : Current Liabilities

Rasio Lancar (kali)

(EBITDA + Pendapatan Donasi LPU) : (Total Utang jatuh tempo + Biaya Bunga)

Rasio Debt Service Coverage (kali)

PT Bank Sinarmas Tbk

Current Asset : Current Liabilities

Rasio Lancar (kali)

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

Rasio Debt Service Coverage (kali)

PT Bank Central Asia Tbk

Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar

Rasio Lancar (kali)

Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas

Rasio Utang ke Ekuitas (kali)

PT Bank KB Bukopin Tbk

Cash + Account Receivable + Inventory : Utang Usaha

Current Ratio

+ Utang Pajak

Debt Service Coverage Ratio

EBITDA : (Pokok + Bunga)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Current Asset : Current Liabilities

Current Ratio

*** Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas**

Liabilities to Equity Ratio

***Utang Bank + Utang Usaha + MTN + Obligasi**

Debt Service Coverage Ratio

EBITDA disetahunkan /Utang Berbunga + Beban Bunga

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Current Asset : Current Liabilities

Current Ratio

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

Debt to Equity Ratio

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

Debt Service Coverage Ratio

PT Bank Neo Commerce Tbk

Current Asset : Current Liabilities

Current Ratio

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

Debt to Equity Ratio

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

Debt Service Coverage Ratio

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Perjanjian Bank (Lanjutan)

Bank Covenant (Continued)

Kreditur/Creditors

Syarat Kredit/Covenant

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

Obligasi

Current Ratio

Debt Service Coverage

Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar

EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

Kreditur	Syarat Kredit/Covenant	Hasil/ Result	Creditors
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,2x/Maximum 2.2x	0,84	<i>Debt to Equity Ratio (times)</i>
<i>Rasio Debt Service Coverage (kali)</i>	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	<i>Debt Service Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,27	<i>Debt Service Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank Sinarmas Tbk			PT Bank Sinarmas Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	<i>Debt Service Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank Central Asia Tbk			PT Bank Central Asia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x	0,84	<i>Debt to Equity Ratio (times)</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk			PT Bank KB Bukopin Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	3,34	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1,25x/Minimum 1.25x	0,19	<i>Debt Service Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank Maspion Indonesia Tbk			PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2,5x	0,62	<i>Debt to Equity Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,39	<i>Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank IBK Indonesia Tbk			PT Bank IBK Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 3x/Maximum 3x	0,84	<i>Debt to Equity Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	<i>Coverage Ratio (times)</i>
PT Bank Neo Commerce Tbk			PT Bank Neo Commerce Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	<i>Current Ratio (times)</i>
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 3x/Maximum 3x	0,84	<i>Debt to Equity Ratio (times)</i>
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	<i>Coverage Ratio (times)</i>

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Perjanjian Bank (Lanjutan)

Bank Covenant (Continued)

Kreditur	Syarat Kredit/Covenant	Hasil/ Result	Creditors
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk			PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2x/Maximum 2x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)
Obligasi			Bond
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 5x/Maximum 5x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

30. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value.

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang layanan usaha, piutang pegawai, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan pinjaman bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, trade receivable from business services, employee receivables, trade payable, accrued expenses, other payable and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these financial instruments.

Nilai wajar dari pinjaman bank, utang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya diasumsikan mendekati tingkat diskonto pasar.

Fair value of bank loans, consumer financing, and lease payable approximately at their carrying values largely due to their interest rates assuming close to the market discount rate.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrument keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

The table below presents comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group financial instrument that are carried in the consolidated financial statements.

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>					<u>Financial assets</u>
Kas dan setara kas	2.063.363.227.142	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	33.073.529.725	-	-	Restricted Bank
Piutang usaha - Bersih	336.931.275.934	336.931.275.934	385.402.397.127	385.402.397.127	Trade Receivables - Net
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	1.016.837.478.050	930.909.600.985	930.909.600.985	Accrued Income
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	2.011.539.275.002	880.739.688.637	880.739.688.637	Financial Services Receivable
Piutang Karyawan	15.031.583.376	15.031.583.376	7.054.857.557	7.054.857.557	Receivable to Employee
Piutang Kerugian Perusahaan	13.811.808.767	13.811.808.767	13.811.808.767	13.811.808.767	Company Loss Receivables

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

30. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas Keuangan Dicatat					Financial Liabilities
Berdasarkan Biaya Perolehan					Measured at
Diamortisasi					Amortized Cost
Utang Usaha	651.416.992.385	651.416.992.385	474.354.916.682	474.354.916.682	Trade Payables
Pinjaman Bank Jangka Pendek	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	2.285.604.000.000	Short-term Bank loan
Utang Lain-lain	612.179.209.903	612.179.209.903	753.828.360.808	753.828.360.808	Other Payables
Liabilitas Sewa	130.921.740.724	130.921.740.724	22.928.966.765	22.928.966.765	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka					Medium Term Note
Menengah dan Obligasi	497.550.000.007	497.550.000.007	818.461.458.333	818.461.458.333	and Bond

31. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

31. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2024		2023		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
<u>Aset</u>					<u>Assets</u>
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
EUR	580.868,83	9.788.400.724	205.190,03	3.516.858.623	EUR
USD	1.585.446,00	25.623.978.252	550.605,07	8.488.127.759	USD
CHF	113.486,72	2.033.788.700	61.740,06	1.134.429.150	CHF
SGD	-	-	56.351,73	659.970.893	SGD
GBP	-	-	28.531,33	563.786.071	GBP
SAR	3.740,41	16.099.248	-	-	SAR
JPY	876.740.000,00	89.743.106.400	1.107.563.000,00	121.333.526.650	JPY
Piutang Usaha					Account Receivables
USD	7.009.925,85	113.294.421.588	8.000.101,85	123.329.570.120	USD
Jumlah Aset		<u>240.499.794.912</u>		<u>259.026.269.266</u>	Total Assets
<u>Liabilitas</u>					<u>Liabilities</u>
Utang Usaha					Trade Payables
USD	8.001.560,00	129.321.212.720	8.907.833,00	137.323.153.528	USD
Utang Lainnya					Other Payables
USD	986.699,00	15.947.029.238	588.389,00	9.070.604.824	USD
Jumlah Liabilitas		<u>145.268.241.958</u>		<u>146.393.758.352</u>	Total Liabilities
Aset Bersih		<u>95.231.552.954</u>		<u>112.632.510.914</u>	Net Assets

32. KONTINJENSI

32. CONTINGENCIES

Perseroan memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak penyidik yang telah memberikan estimasi kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp34.488.281.757 dan Rp17.523.102.627 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

The Company has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Currently some cases are still under inspection, investigation, inquiry, and prosecution on courts, being performed by prosecutors, who has given the estimated losses of at least Rp34,488,281,757 and Rp17,523,102,627 as of December 31, 2024 and 2023 with details as follows:

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KONTINJENSI (Lanjutan)

32. CONTINGENCIES (Continued)

	2024	2023	Company
Perseroan			Regional 1 Medan
Regional 1 Medan	9.557.004.888	2.485.900.378	Regional 2 Jakarta
Regional 2 Jakarta	1.742.608.404	281.722.094	Regional 3 Bandung
Regional 3 Bandung	4.716.188.938	4.518.103.349	Regional 4 Semarang
Regional 4 Semarang	4.128.100	267.617.210	Regional 5 Surabaya
Regional 5 Surabaya	1.036.533.793	757.714.865	Regional 6 Makassar
Regional 6 Makassar	16.119.313.878	7.233.352.766	Regional HO
Regional HO	618.378.965	618.378.965	Subsidiary
Entitas Anak			PT Pos Properti Indonesia
PT Pos Properti Indonesia	-	1.360.313.000	PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Logistik Indonesia	441.815.123	-	PT Pos Finansial Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	252.309.668	-	
Jumlah	34.488.281.757	17.523.102.627	Total

33. PERENCANAAN MANAJEMEN

33. MANAGEMENT PLAN

Dengan mempertimbangkan Aspirasi Pemegang Saham, pencapaian tahun 2023, dan berbagai pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja tahun 2023, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 mengangkat tema: "Mewujudkan Pos Indonesia sebagai Orkestrator Logistik yang Terpercaya dan Terkemuka dalam Ekosistem BUMN" dengan strategi pengembangan masing-masing bisnis sebagai berikut.

Taking into account Shareholder Aspirations, 2023 achievements, and various lessons learned from the results of the 2023 performance evaluation, in 2024 PT Pos Indonesia (Persero) Corporate Budget Work Plan ("RKAP") raises the theme: "Realizing Pos Indonesia as a Trusted and Leading Logistics Orchestrator in the BUMN Ecosystem" with the development strategy of each business as follows.

Strategi Usaha

Business Strategy

Strategi Pengembangan Bisnis Logistik

Logistics Business Development Strategy

- 1) Memperkuat posisi strategis (*reinforce strategic positioning*) PT Pos Indonesia (Persero) dalam ekosistem logistik, dengan model bisnis *3rd Party Logistic* (3PL) atau *4th Party Logistic* (4PL), fokus segmen pelanggan pada Pemerintah dan BUMN, serta fokus jenis kargo pada *general cargo dan dry bulk*, dengan harapan dapat memberikan solusi layanan logistik secara *end-to-end* sebagai *logistic orchestrator* melalui pembangunan platform logistik terintegrasi.
- 2) Menyelaraskan strategi bisnis grup (*group strategic business alignment*) dengan menjadikan anak usaha sebagai *operating business* dari logistik untuk menghindari *double presence* atau *overlapping business* antara induk dan anak perusahaan.
- 3) Memulai kerja sama strategis dengan Logistics Service Provider (LSP) BUMN (*operatorship* atau *partnership*) dan LSP Global (*strategic alliance*).

- 1) Reinforce the strategic positioning of PT Pos Indonesia (Persero) in the logistics ecosystem, with a 3rd Party Logistic (3PL) or 4th Party Logistic (4PL) business model, customer segment focus on the Government and BUMN, and cargo type focus on general cargo and dry bulk, with the hope of providing end-to-end logistics service solutions as a logistics orchestrator through the development of an integrated logistics platform.
- 2) Aligning group strategic business alignment by making subsidiaries the operating business of logistics to avoid double presence or overlapping business between parent and subsidiaries.
- 3) Initiate strategic cooperation with state-owned Logistics Service Providers (LSP) (operatorship or partnership) and global LSP (strategic alliance).

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Kurir

Courier Business Development Strategy

- 1) Membangun integrated channel sebagai saluran distribusi barang dan informasi yang terintegrasi pada rantai suplai hulu ke hilir.
- 2) Menyediakan layanan kurir yang fleksibel dan terpercaya (reliable) melalui omnichannel logistik yang memberikan *fulfillment* yang fleksibel, pengiriman yang cepat, dan memiliki fitur *track and trace*.

- 1) Building an integrated channel as a distribution channel for goods and information that is integrated in the upstream to downstream supply chain.
- 2) Provide flexible and reliable courier services through omnichannel logistics that provide flexible fulfillment, fast delivery, and have track and trace features.

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Strategi Usaha (Lanjutan)

Strategi Pengembangan Bisnis Kurir (Lanjutan)

- Menyediakan layanan retur mencakup *supply chain end-to-end* hingga layanan retur dari pengguna kembali ke *manufacturer*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan

- Membangun ekosistem jasa keuangan secara *end-to-end* yang lengkap dan mudah diakses oleh konsumen.
- Memperkuat sub-bisnis *Payment* dan *Saving* sebagai produk jangka yang kuat, di mana Pos dapat menyelenggarakan secara mandiri atau memiliki peran yang ekstensif dan kolaboratif.
- Memperkuat keterikatan masing-masing produk jasa keuangan sehingga memperbesar potensi *upselling* atau *cross-selling*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Properti

- Mengembangkan aset properti melalui adanya pembangunan properti, utamanya perumahan dengan biaya rendah (*low cost housing*), dan bangunan medium & *high-rise* atau apartemen serta bangunan perkantoran.
- Mengelola aset yang dimiliki melalui utilisasi kotak ruang ataupun bangunan kepemilikan menetap dalam rangka *generating income* dari *leasing* aset terhadap pihak ketiga.
- Memelihara serta menjaga kebersihan dan keamanan pada aset-aset tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi *end-customer*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian pendapatan dan *brand image* Perusahaan yang semakin tinggi.

Kebijakan

Adapun kebijakan-kebijakan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan antara lain sebagai berikut:

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Business Strategy (Continued)

Courier Business Development Strategy (Continued)

- Provides return services covering the *end-to-end supply chain* to return services from the user back to the *manufacturer*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Financial Services Business Development Strategy

- Building a complete *end-to-end financial services ecosystem* that is easily accessible to consumers.
- Strengthen the *Payment* and *Saving sub-business* as a strong anchor product, which Pos can deliver independently or have an extensive and collaborative role.
- Strengthen the attachment of each financial services product so as to increase the potential for *upselling* or *cross-selling*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Property Business Development Strategy

- Develop property assets through property development, mainly low cost housing, and medium & high-rise buildings or apartments and office buildings.
- Managing assets owned through the utilization of space boxes or buildings of settled ownership in order to generate income from leasing assets to third parties.
- Maintaining and safeguarding the cleanliness and security of these assets to provide comfort for *end-customers*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to have a significant impact on the achievement of higher revenue and *brand image* of the Company.

Policy

The policies that are used as a guideline in carrying out the Company's business activities include the following:

Jenis Kegiatan/ <i>Type of Activity</i>	Nama Kebijakan/ <i>Policy Name</i>
Pengelolaan Aset/ <i>Asset Management</i>	- Kebijakan Pengelolaan Aset/<i>Asset Management Policy</i> - Kebijakan Investasi/<i>Investment Policy</i>
RR BUMN	- PER-01/MBU/03/2023 - PER-05/MBU/04/2021 - Kebijakan RR, Kebijakan Pemberian Jasa Konsultasi, Kebijakan Pengelolaan Aset dan Kebijakan Investasi/<i>RR Policy, Consulting Services Policy, Asset Management Policy and Investment Policy</i>

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Kebijakan (Lanjutan)

Policy (Continued)

Jenis Kegiatan/Type of Activity	Nama Kebijakan/Policy Name
Investasi/ <i>Investment</i>	• Kebijakan Investasi/<i>Investment Policy</i> • Kebijakan Kerjasama/<i>Cooperation Policy</i> • Pedoman Investasi/<i>Investment Guide</i> • Komite Investasi dan Manajemen Risiko/<i>Investment and Risk Management Committee</i>
Jasa Konsultasi/ <i>Consulting Services</i>	• Kebijakan Pemberian Jasa Konsultasi/<i>Consulting Services Provision Policy</i> • Kebijakan Pengelolaan Aset/<i>Asset Management Policy</i>
Pengelolaan Anak Perusahaan/ <i>Subsidiary Management</i>	• Kebijakan Penanganan Anak Perusahaan/<i>Subsidiary Handling Policy</i> • Kebijakan Investasi Anak Perusahaan/<i>Subsidiary Investment Policy</i> • Kebijakan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan/<i>Income Determination Policy for Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Subsidiary Companies</i>
Pengelolaan NPL Perbankan/ <i>Banking NPL Management</i>	• Kebijakan Pengelolaan NPL Perbankan/<i>Banking NPL Management Policy</i>
Pendanaan atau Sumber Pembiayaan/ <i>Funding or Financing Sources</i>	• Kebijakan Pendanaan/<i>Funding Policy</i>

Program Kerja

Work Program

Terdapat 48 (empat puluh delapan) Program Kerja RKAP 2024 yang diturunkan dari 13 *Strategic Initiatives* dan dibagi ke dalam 8 (delapan) grup.

There are 48 (forty eight) RKAP 2024 Work Programs derived from 13 *Strategic Initiatives* and divided into 8 (eight) groups.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik (7 Program Kerja)

Director of Courier and Logistics Business (7 Work Programs)

- 1) SVP Retail Business (2 Program Kerja)
 - a. Kolaborasi PosAja dengan UMKM dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis Kurir dan Ekosistem Digital melalui Peningkatan Jejaring Touchpoint dan Strategic Partnership dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp1,280 Miliar, Opex Rp59 Miliar, dan Capex Rp10 Miliar.
 - b. Meningkatkan Layanan Digital Channel PosAja dan Brand Engagement di Kota Besar dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp10 Miliar dan Opex Rp20 Miliar.
- 2) SVP Enterprise Business (2 Program Kerja)
 - a. Mengembangkan Enterprise Logistics Solution dengan prioritas Segmen Pemerintah & BUMN dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp1.000 Miliar dan Opex Rp48 Miliar.
 - b. Mengembangkan Enterprise CEP Solution pada Segmen Korporat/ B2B dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp500 Miliar dan Opex Rp22 Miliar.

- 1) SVP Retail Business (2 Work Programs)
 - a. PosAja Collaboration with MSMEs and E-Commerce to Drive Courier Business Growth and Digital Ecosystem through Increased Touchpoint Network and Strategic Partnerships with an Operating Revenue Budget of Rp1.280 Billion, Opex of Rp59 Billion, and Capex of Rp10 Billion.
 - b. Improving PosAja Digital Channel Services and Brand Engagement in Big Cities with an Operating Revenue Budget of Rp10 billion and Opex of Rp20 billion.
- 2) SVP Retail Business (2 Work Programs)
 - a. Develop Enterprise Logistics Solution with prioritization of Government & State-Owned Enterprise Segments with an Operating Revenue Budget of Rp1,000 Billion and Opex of Rp48 Billion.
 - b. Developed Enterprise CEP Solution in the Corporate/ B2B Segment with an Operating Revenue Budget of Rp500 Billion and Opex of Rp22 Billion.

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik (7 Program Kerja)
(Lanjutan)

- 3) *SVP Wholesale and International Business* (3 Program Kerja)
- Eksekusi Pengembangan Produk Internasional Baru (Non UPU Platform) dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp155 Miliar dan Opex Rp1.6 Miliar.
 - Percepatan Skalabilitas dan Operational Excellence dengan Anggaran Opex sebesar Rp1.1 Miliar dan Capex Rp4.4 Miliar.
 - Mengembangkan Kurir Internasional dan Wholesale melalui Strategic Partnership dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp470 Miliar dan Opex Rp4.02 Miliar.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan (6 Program Kerja)

- 1) *SVP Wholesale and International Business* (3 Program Kerja)
- Memperluas Penetrasi Layanan melalui Peningkatan Biller dan Soft-selling Campaign dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp592 Miliar dan Opex Rp76,2 Miliar.
 - Meningkatkan Pendapatan Penyaluran Dana dari Sektor Pemerintahan dan Korporasi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp250 Miliar dan Opex Rp150 Miliar.
 - Memperluas Penetrasi Layanan Tabungan dan Kredit Pensiun Pos melalui Percepatan Digitalisasi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp185 Miliar, Opex Rp33,35 Miliar, dan Capex Rp27 Miliar.
- 2) *SVP Consumer Business* (3 Program Kerja)
- Enhancement* Layanan Jasa Keuangan Digital Pos pada Aplikasi Pospay dengan Anggaran Opex sebesar Rp0,85 Miliar.
 - Enhancement* Layanan Jasa Keuangan pada Ekosistem *Consumer Business* dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp160 Miliar dan Opex Rp31,1 Miliar.
 - Menjamin Terlaksananya Layanan Jasa Keuangan Sesuai dengan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Anggaran Opex Rp0,83 Miliar.

Direktur Human Capital Management (7 Program Kerja)

- 1) *SVP Human Capital Policy and Strategy* (3 Program Kerja)
- Mengembangkan Organisasi dan SDM yang Mendorong Budaya Kolaborasi dan Memperkuat Kapabilitas Logistik dengan Anggaran Opex Rp1,4 Miliar.
 - Menyusun Strategi HC yang Menyeluruh, Berfokus kepada Penguatan Kapabilitas SDM dalam Rangka Menjawab Tuntutan Bisnis Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp3,4 Miliar.
 - Productivity Enhancement melalui Program Rightsizing sebagai Exit Strategy dengan Anggaran Opex Rp800 Miliar.

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Director of Courier and Logistics Business (7 Work Programs) (Continued)

- 3) *SVP Wholesale and International Business* (3 Work Programs)
- Execution of New International Product Development (Non UPU Platform) with an Operating Revenue Budget of Rp 155 Billion and Opex of Rp1,6 Billion.*
 - Acceleration of Scalability and Operational Excellence with an Opex Budget of Rp1,1 billion and Capex of Rp 4,4 billion.*
 - Developed International Courier and Wholesale through Strategic Partnership with an Operating Revenue Budget of Rp470 Billion and Opex of Rp4,02 Billion.*

Director of Financial Service Business (6 Work Programs)

- 1) *SVP Wholesale and International Business* (3 Work Programs)
- Expanding Service Penetration through Increased Biller and Soft-selling Campaign with an Operating Revenue Budget of Rp592 Billion and Opex of Rp76.2 Billion.*
 - Increase Fund Disbursement Revenue from Government and Corporate Sectors with an Operating Revenue Budget of Rp250 Billion and Opex of Rp150 Billion.*
 - Expanding Penetration of Postal Savings and Pension Credit Services through Accelerating Digitalization with an Operating Income Budget of Rp185 Billion, Opex of Rp33.35 Billion, and Capex of Rp27 Billion.*
- 2) *SVP Consumer Business* (3 Work Programs)
- Enhancement of Postal Digital Financial Services on the Pospay Application with an Opex Budget of Rp 0.85 . Billion.*
 - Enhancement of Financial Services in the Consumer Business Ecosystem with an Operating Revenue Budget of Rp160 Billion and Opex of Rp31.1 Billion.*
 - Ensure the Implementation of Financial Services in accordance with the Principles of Good Corporate Governance (GCG) with an Opex Budget of Rp 0.83 Billion.*

Director of Human Capital Management (7 Work Programs)

- 1) *SVP Human Capital Policy and Strategy* (3 Work Programs)
- Develop Organization and People that Encourage a Culture of Collaboration and Strengthen Logistics Capabilities with an Opex Budget of Rp1.4 Billion.*
 - Developing a Comprehensive HC Strategy, Focusing on Strengthening HR Capabilities to Respond to the Company's Business Demands with an Opex Budget of Rp3.4 Billion.*
 - Productivity Enhancement through Rightsizing Program as Exit Strategy with Opex Budget of Rp800 Billion.*

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Direktur Human Capital Management (7 Program Kerja)
(Lanjutan)

- 2) SVP Human Capital Service and Business Partner (3 Program Kerja)
 - a. Mengembangkan Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat, Tepat, dan Akurat dengan Anggaran Opex Rp3 Miliar.
 - b. Mengembangkan Kompetensi Karyawan sesuai dengan Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp22,1 Miliar.
 - c. Memenuhi Ketersediaan Talent sesuai Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp40,45 Miliar.
- 3) VP General Support (1 Program Kerja)
 - a. Digitalisasi Updating Aplikasi E-Procurement dengan Anggaran Opex Rp0,15 Miliar.

Direktur Business Development and Portfolio Management
(3 Program Kerja)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Program Kerja)
 - a. Mengoptimalkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis untuk Aksi Korporasi Pos Indonesia Group Tahun 2024-2025 dengan Anggaran Opex Rp16 Miliar dan Capex Rp 131 Miliar.
 - b. Mengembangkan Customer Experience Layanan Pos Indonesia dengan Anggaran Opex Rp4 Miliar.
- 2) SVP Portfolio Management (1 Program Kerja)
 - a. Akselerasi Implementasi Paradigma Baru Pengelolaan LPU, Pengawasan Regulasi, dan INDI 4.0 dengan Anggaran Pendapatan LPU Rp369 Miliar dan Opex Rp134,3 Miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (5 Program Kerja)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Program Kerja)
 - a. Akselerasi Implementasi Paradigma Baru Pengelolaan LPU, Pengawasan Regulasi, dan INDI 4.0 dengan Anggaran Pendapatan LPU Rp369 Miliar dan Opex Rp134,3 Miliar.
- 2) SVP Risk Management and Financial Policy (2 Program Kerja)
 - a. Peningkatan Peran GCG dan Penguatan Implementasi GRC untuk Meminimalkan Potensi Kerugian dengan Anggaran Opex Rp4,41 Miliar dan Capex Rp0,782 Miliar
 - b. Digitalisasi Bidang Keuangan dan Akuntansi serta Akselerasi Pencapaian Realisasi Capex dengan Anggaran Opex Rp1,05 Miliar dan Capex Rp1 Miliar.

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Director of Human Capital Management (7 Work Programs)
(Continued)

- 2) SVP Human Capital Service and Business Partner (3 Work Programs)
 - a. Developing an Information System to Support Faster, More Precise, and Accurate Decision Making with an Opex Budget of IDR 3 Billion.
 - b. Developing Employee Competencies in accordance with Business Needs with an Opex Budget of Rp22.1 Billion.
 - c. Fulfill Talent Availability as per Business Needs with Opex Budget of IDR 40.45 Billion.
- 3) VP General Support (1 Work Program)
 - a. Digitalization of E-Procurement Application Updating with an Opex Budget of Rp0.15 Billion.

Director of Business Development and Portfolio Management
(3 Work Programs)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Work . Programs)
 - a. Optimizing Data, Information, and Analysis Results for Pos Indonesia Group Corporate Actions in 2024-2025 with an Opex Budget of Rp16 Billion and Capex of Rp. 131 Billion.
 - b. Developing Pos Indonesia's Customer Experience Services with an Opex Budget of IDR 4 Billion.
- 2) SVP Portfolio Management (1 Work Program)
 - a. Acceleration of the Implementation of the New Paradigm of LPU Management, Regulatory Oversight, and INDI 4.0 with an LPU Revenue Budget of Rp369 billion and Opex of Rp134.3 billion.

Director of Finance and Risk Management (5 Work Programs)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Work . Programs)
 - a. Acceleration of the Implementation of the New Paradigm of LPU Management, Regulatory Oversight, and INDI 4.0 with an LPU Revenue Budget of Rp369 billion and Opex of Rp134.3 billion.
- 2) SVP Risk Management and Financial Policy (2 Work Programs)
 - a. Improving the Role of GCG and Strengthening the Implementation of GRC to Minimize Potential Losses with an Opex Budget of Rp4.41 Billion and Capex of Rp0.782 Billion.
 - b. Digitalization of Finance and Accounting and Acceleration of Capex Realization Achievement with Opex Budget of Rp1.05 Billion and Capex of Rp 1 Billion.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (5 Program Kerja)
(Lanjutan)

- 3) VP *Asset Management* (2 Program Kerja)
 - a. Optimalisasi dan Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp35 Miliar dan Opex Rp4 Miliar.
 - b. Pembaharuan Brand Attribute pada *Physical Assets* melalui Standardisasi Tampilan Gedung dan Sarana Kerja serta Pengembangan SIM Aset Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp157,96 Miliar dan Capex Rp161,86 Miliar.

Direktur Operasi dan Digital Services (10 Program Kerja)

- 1) SVP Digital Services (5 Program Kerja)
 - a. Program Kerja 12.1 – Mengembangkan Core System & Platform untuk Menunjang Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp32 Miliar dan Capex Rp31,53 Miliar.
 - b. Mengembangkan Kompetensi dan Pemenuhan Syarat Compliance IT dengan Anggaran Opex Rp10,65 Miliar dan Capex Rp11,05 Miliar.
 - c. Modernisasi Infrastruktur Supporting IT dengan Anggaran Opex Rp21,02 Miliar dan Capex Rp15,05 Miliar.
 - d. Manage Service Infrastructure IT dengan Anggaran Opex Rp203,2 Miliar.
 - e. Integrasi Sistem Support dan Digitalisasi Proses Bisnis dengan Anggaran Capex Rp11,91 Miliar.
- 2) SVP International Post Service (3 Program Kerja)
 - a. Meningkatkan Kapabilitas Operasi dan Kepatuhan untuk Mendorong Terciptanya Kolaborasi Berskala Internasional dengan Anggaran Opex Rp299 Miliar dan Capex Rp12,95 Miliar.
 - b. Membenahi End-to-End dan Value Added Services, termasuk Aplikasi dan IT Pendukung dengan Anggaran Opex Rp1,3 Miliar dan Capex Rp0,15 Miliar.
 - c. Mendorong Utilisasi Mitra Global dalam Meningkatkan Penetrasi Pasar Internasional dengan Anggaran Opex Rp143,88 Miliar.
- 3) SVP Courier and Logistics Operation (1 Program Kerja)
 - a. Memperkuat Kapasitas Operasi & Standarisasi War Room dengan Anggaran Opex Rp0,1 Miliar dan Capex Rp21,2 Miliar.
- 4) SVP Fronting Management and Financial Transaction Service (1 Program Kerja)
 - a. Modernisasi Peralatan Pendukung Operasional untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Anggaran Capex Rp12,2 Miliar.

Non Direktorat (2 Program Kerja)

- 1) *Corporate Secretary* (1 Program Kerja)
 - a. Meningkatkan *Brand Awareness* Masyarakat tentang Identitas Baru Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp5 Miliar.

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Director of Finance and Risk Management (5 Work Programs) (Continued)

- 3) VP *Asset Management* (2 Work Programs)
 - a. Optimization and Settlement of Troubled Assets with an Operating Income Budget of Rp35 billion and Opex of Rp4 billion.
 - b. Renewal of Brand Attribute on Physical Assets through Standardization of Building Display and Work Facilities and Development of Company Asset SIM with Opex Budget of Rp157.96 Billion and Capex of Rp161.86 Billion.

Director Operation and Digital Services (10 Work Programs)

- 1) SVP Digital Services (5 Work Programs)
 - a. Work Program 12.1 - Develop Core System & Platform to Support Business Needs with Opex Budget of Rp32 Billion and Capex of Rp31.53 Billion.
 - b. Developing Competencies and Fulfilling IT Compliance Requirements with an Opex Budget of Rp 10.65 Billion and Capex of Rp11.05 Billion.
 - c. Modernization of IT Supporting Infrastructure with an Opex budget of Rp21.02 billion and Capex of Rp 15.05 billion.
 - d. Manage IT Service Infrastructure with an Opex Budget of Rp203.2 Billion.
 - e. Support System Integration and Business Process Digitalization with Capex Budget of Rp11.91 Billion.
- 2) SVP International Post Service (3 Work Programs)
 - a. Enhancing Operations and Compliance Capabilities to Drive International Collaboration with an Opex Budget of Rp299 Billion and Capex of Rp 12.95 Billion.
 - b. Improving End-to-End and Value Added Services, including Applications and IT Support with an Opex Budget of Rp1.3 Billion and Capex of Rp0.15 Billion.
 - c. Encourage Utilization of Global Partners in Increasing International Market Penetration with an Opex Budget of Rp143.88 Billion.
- 3) SVP Courier and Logistics Operation (1 Work Program)
 - a. Strengthening War Room Operation Capacity & Standardization with Opex Budget of Rp0.1 Billion and Capex of Rp21.2 Billion.
- 4) SVP Fronting Management and Financial Transaction Service (1 Work Program)
 - a. Modernization of Operational Support Equipment to Improve Service Quality with a Capex Budget of Rp12.2 Billion.

Non Directorate (2 Work Programs)

- 1) *Corporate Secretary* (1 Work Program)
 - a. Increasing Public Brand Awareness of the Company's New Identity with an Opex Budget of Rp5 Billion.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Non Direktorat (2 Program Kerja) (Lanjutan)

- 2) *Internal Auditor* (1 Program Kerja)
a. Implementasi Audit Berbasis Manajemen Risiko dengan Anggaran Opex Rp6,2 Miliar.

Anak Perusahaan (8 Program Kerja)

- 1) Direktur PT Pos Logistik Indonesia (3 Program Kerja)
a. Peningkatan Pendapatan Bisnis pada Sektor Logistik Pemerintah/ Perusahaan Swasta, Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas & Kompetensi SDM, Pencapaian *Operasional Excellence* dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp707 Miliar, Opex Rp1,2 Miliar, dan Capex Rp3,33 Miliar.
b. Peningkatan Pendapatan Bisnis pada Sektor Logistik BUMN, dan Penetrasi Market BUMN dengan Kerjasama Strategis Pos Indonesia Grup dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp450 Miliar dan Capex Rp1,8 Miliar.
c. Peningkatan pendapatan bisnis dengan strategi *blue ocean* dan penguatan Infrastruktur Platform Digital Logistik dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp56 Miliar, Opex Rp0,4 Miliar, dan Capex Rp0,8 Miliar.
- 2) Direktur PT Pos Properti Indonesia (2 Program Kerja)
a. Optimalisasi Aset dan Pengembangan Bisnis dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp76,6 Miliar, Opex Rp59,6 Miliar, dan Capex Rp42,3 Miliar.
b. Pengelolaan Aset melalui *Building Management* dan Manajemen Konstruksi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp104,1 Miliar, Opex Rp91,6 Miliar, dan Capex Rp51,7 Miliar.
- 3) Direktur PT Pos Finansial Indonesia (3 Program Kerja)
a. Peningkatan Daya Saing Pospay Agen dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp30,3 Miliar dan Opex Rp23,9 Miliar.
b. Mengembangkan Bisnis Agregator untuk Memperkuat Perusahaan sebagai *Single Aggregator* dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp7,6 Miliar dan Opex Rp3 Miliar.
c. Menjadi Penyedia Aplikasi dan Barang IT dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp71,2 Miliar, Opex Rp49,7 Miliar, dan Capex Rp0,392 Miliar.

34. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Informasi transaksi non kas yang signifikan yang tidak mempengaruhi aktivitas arus kas sebagai berikut:

	2024	2023
Penambahan Aset Hak Guna melalui Liabilitas Sewa	-	(21.614.624.254)
Pembayaran Bunga melalui Akun Bunga	-	(10.665.097.222)
Penambahan Aset Tetap dengan Mendebitkan (Mengkreditkan) Utang Usaha	-	30.183.414.172
Pelepasan Aset Tetap melalui Penggantian (Ruislag)	-	1.458.913.692
Penempatan Bank Garansi melalui Non Cash Loan	-	(20.604.000.000)

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Non Directorate (2 Work Programs)

- 2) *Internal Auditor* (1 Work Program)
a. *Implementation of Risk Management-Based Audit with Opex Budget of Rp6.2 Billion.*

Subsidiaries (8 Work Programs)

- 1) *Director PT Pos Logistik Indonesia (3 Work Programs)*
a. *Increased Business Revenue in the Government/ Private Company Logistics Sector, Increased Capacity, Capability & Competence of Human Resources, Achievement of Operational Excellence with a Business Revenue Budget of Rp707 Billion, Opex Rp1.2 Billion, and Capex Rp 3.33 Billion.*
b. *Increased Business Revenue in the SOE Logistics Sector, and SOE Market Penetration with Strategic Cooperation with the Pos Indonesia Group with a Business Revenue Budget of Rp450 Billion and Capex of Rp 1.8 Billion.*
c. *Increased business revenue with a blue ocean strategy and strengthened Digital Logistics Platform Infrastructure with an Operating Revenue Budget of Rp56 billion, Opex of Rp0.4 billion, and Capex of Rp 0.8 billion.*
- 2) *Director PT Pos Properti Indonesia (2 Work Programs)*
a. *Asset Optimization and Business Development with an Operating Income Budget of Rp76.6 billion, Opex of Rp59.6 billion, and Capex of Rp42.3 billion.*
b. *Asset Management through Building Management and Construction Management with an Operating Revenue Budget of Rp104.1 billion, Opex of Rp91.6 billion, and Capex of Rp51.7 billion.*
- 3) *Director PT Pos Finansial Indonesia (3 Work Programs)*
a. *Increased Competitiveness of Pospay Agents with an Operating Revenue Budget of Rp30.3 Billion and Opex of Rp 23.9 Billion.*
b. *Develop Aggregator Business to Strengthen the Company as a Single Aggregator with an Operating Income Budget of Rp7.6 Billion and Opex of Rp 3 Billion.*
c. *Become an Application and IT Goods Provider with an Operating Revenue Budget of Rp71.2 Billion, Opex of Rp49.7 Billion, and Capex of Rp 0.392 Billion.*

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

Significant non-cash transactions that do not affect the cash flows activities are as follows:

	2024	2023
Penambahan Aset Hak Guna melalui Liabilitas Sewa	-	(21.614.624.254)
Pembayaran Bunga melalui Akun Bunga	-	(10.665.097.222)
Penambahan Aset Tetap dengan Mendebitkan (Mengkreditkan) Utang Usaha	-	30.183.414.172
Pelepasan Aset Tetap melalui Penggantian (Ruislag)	-	1.458.913.692
Penempatan Bank Garansi melalui Non Cash Loan	-	(20.604.000.000)

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (Continued)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities:

	Arus Kas Pendanaan Financing Cash Flows		Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2024
	31 Desember/ December 31, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Pergerakan Valuta Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others
Utang Pembiayaan Konsumen/ Customer Financing Payable	22.928.966.765	-	(10.719.707.191)	-	118.712.481.150
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	2.285.604.000.000	15.503.800.000.000	(13.709.587.821.338)	-	341.317.191.202
Utang Bank Jangka Panjang/ Long-Term Bank Loan	-	-	-	-	-
Utang Obligasi/Bonds Payable	323.361.458.333	-	(323.361.458.333)	-	-
Pinjaman Jangka Menengah/ Medium Term Notes	492.650.000.000	-	-	-	4.900.000.007
Utang Bunga/Interest Payable	10.665.097.222	-	-	-	54.609.969
					10.719.707.191

	Arus Kas Pendanaan Financing Cash Flows		Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2023
	31 Desember/ December 31, 2022	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Tetap/ Additional in Fixed Assets	Pergerakan Valuta Asing/ Foreign Exchange Movement
Utang Pembiayaan Konsumen/ Customer Financing Payable	44.480.045.870	-	(26.249.201.993)	-	4.698.122.888
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	770.000.000.000	10.024.000.000.000	(8.529.000.000.000)	-	20.604.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ Long-Term Bank Loan	87.500.000.000	-	(87.500.000.000)	-	-
Utang Obligasi/Bonds Payable	321.573.958.333	-	-	-	1.787.500.000
Pinjaman Jangka Menengah/ Medium Term Notes	492.650.000.000	-	-	-	-
Utang Bunga/Interest Payable	2.057.782.444	-	(251.090.088.514)	-	259.697.403.292
					10.665.097.222

35. REKLASIFIKASI AKUN

35. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated financial statements for 2023 have been reclassified to conform with the consolidated financial statements presentation as of December 31, 2024 as follows:

	31 Desember 2023/December 31, 2023			STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET REVENUE COST OF SERVICES GROSS PROFIT OPERATING EXPENSES Marketing General and Administrative Other Income Other Expenses OPERATIONS PROFIT Finance Income Finance Costs INCOME BEFORE INCOME TAX INCOME TAX (EXPENSES) BENEFITS PROFIT FOR THE YEAR
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Direklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	5.479.121.136.675	-	5.479.121.136.675	
PENDAPATAN BERSIH	(3.879.740.711.952)	198.951.266.514	(3.680.789.445.438)	
BEBAN POKOK LAYANAN	1.599.380.424.723		1.798.331.691.237	
LABA KOTOR				
BEBAN USAHA				
Pemasaran	(70.260.445.072)	-	(70.260.445.072)	
Umum dan Administrasi	(911.643.322.302)	(199.347.084.386)	(1.110.990.406.688)	
Pendapatan Lain-lain	628.728.086.809	-	628.728.086.809	
Beban Lain-lain	(326.225.776.820)	395.817.872	(325.829.958.948)	
LABA USAHA	919.978.967.338		919.978.967.338	
Pendapatan Keuangan	43.561.402.355	-	43.561.402.355	
Beban Keuangan	(261.648.866.909)	-	(261.648.866.909)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	701.891.502.784		701.891.502.784	
(BEBAN) MANFAAT				
PAJAK PENGHASILAN	26.323.140.816	-	26.323.140.816	
LABA TAHUN BERJALAN	728.214.643.600		728.214.643.600	

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI SEGMENT

36. SEGMENT INFORMATION

	2024													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ Total Parent	Pos Finansial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ Parent & Subsidiaries	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan/Revenues														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ Revenue from Post Mail and Parcel	203.995	429.744	148.456	296.101	378.928	254.710	-	1.711.934	-	-	-	1.711.934	-	1.711.934
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ Revenue from Financial Service and Retail	220.129	153.509	124.757	129.358	198.055	234.719	-	1.060.527	24.433	-	-	1.084.960	(89.542)	995.418
Pendapatan Properti/ Revenue from Property	814	539	330	977	4.601	153.675	10.164	171.100	-	-	207.679	378.779	(52.605)	326.174
Pendapatan Logistik/ Revenue from Logistic	436.125	206.265	498.535	366.589	159.590	139.254	-	1.806.358	-	544.533	-	2.350.891	(254.562)	2.096.329
Pendapatan Teknologi Informasi/ Revenue from Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	74.025	-	-	74.025	-	74.025
Jumlah Pendapatan/ Total Revenue	861.063	790.057	772.078	793.025	741.174	782.358	10.164	4.749.919	98.458	544.533	207.679	5.600.589	(396.709)	5.203.880
Pendapatan Lainnya/ Other Revenue	120.282	14.435	33.069	65.191	103.145	(48.185)	198.136	486.073	1.370	1.575	1.688	490.706	(25.836)	464.870
Jumlah Pendapatan Keuangan/ Total Financial Revenue	12.513	13.083	10.545	13.270	14.011	8.355	-	71.777	47	515	5.190	77.529	(45.997)	31.532
Jumlah/Total	993.858	817.575	815.692	871.486	858.330	742.528	208.300	5.307.769	99.875	546.623	214.557	6.168.824	(468.542)	5.700.282
Beban Pegawai/ Employee Expense	(435.118)	(594.557)	(269.001)	(282.366)	(417.495)	(346.838)	-	(2.345.375)	(10.029)	(67.071)	(62.365)	(2.484.840)	-	(2.484.840)
Beban Operasi/ Operating Expense	(213.692)	(242.730)	(129.228)	(167.060)	(236.873)	(224.132)	(1)	(1.213.716)	(59.909)	(441.728)	(79.319)	(1.794.672)	349.920	(1.444.752)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(26.685)	(5.294)	(6.741)	(6.042)	(9.402)	(7.656)	-	(61.820)	(41)	(538)	(683)	(63.082)	-	(63.082)
Beban Umum/ General Expense	(51.320)	(56.009)	(40.016)	(44.527)	(69.295)	(62.939)	-	(324.106)	(1.990)	(15.907)	(10.589)	(352.592)	19.734	(332.858)
Beban Penurunan Nilai Aset Tetap/ Impairment of Fixed Asset Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.279)	-	-	(4.279)	-	(4.279)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ Depreciation and Amortization Expenses	(29.686)	(26.233)	(20.038)	(21.187)	(23.418)	(20.802)	-	(141.364)	(22.272)	(17.451)	(12.995)	(194.082)	20.518	(173.564)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.376)	(3.728)	(3.174)	(3.375)	(2.854)	(1.890)	-	(18.397)	(898)	(3.421)	(2.839)	(25.555)	9.056	(16.499)
Beban Keuangan/ Finance Cost	(83.694)	(76.909)	(58.998)	(62.894)	(111.651)	(43.878)	-	(438.024)	(22)	(1.325)	(53)	(439.424)	176	(439.248)
Jumlah Beban/ Total Expense	(843.571)	(1.005.460)	(527.196)	(587.451)	(870.988)	(708.135)	(1)	(4.542.802)	(99.440)	(547.441)	(168.843)	(5.358.526)	399.404	(4.959.122)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	150.287	(187.885)	288.496	284.035	(12.658)	34.393	208.299	764.967	435	(818)	45.714	810.298	(69.138)	741.160

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

36. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2023													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ Total Parent	Pos Finansial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ Parent & Subsidiaries	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan/Revenues														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ Revenue from Post Mail and Parcel	205.118	541.391	158.321	301.876	438.343	248.824	-	1.893.873	-	-	-	1.893.873	-	1.893.873
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ Revenue from Financial Service and Retail	265.108	170.771	153.869	165.372	232.210	250.922	-	1.238.252	23.325	-	-	1.261.577	(5.042)	1.256.535
Pendapatan Properti/ Revenue from Property	2.339	3.085	934	1.863	4.786	2.572	39.842	55.421	-	-	136.297	191.718	(40.174)	151.544
Pendapatan Logistik/ Revenue from Logistic	266.521	191.230	351.338	73.411	479.000	397.698	-	1.759.198	-	926.624	-	2.685.822	(509.785)	2.176.037
Pendapatan Teknologi Informasi/ Revenue from Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	44.602	-	-	44.602	(44.474)	128
Jumlah Pendapatan/ Total Revenue	739.086	906.477	664.462	542.522	1.154.339	900.016	39.842	4.946.744	67.927	926.624	136.297	6.077.592	(599.475)	5.478.117
Pendapatan Lainnya/ Other Revenue	116.496	20.062	49.004	78.830	109.305	86.203	168.092	627.992	2.240	8.329	4	638.565	(9.749)	628.816
Jumlah Pendapatan Keuangan/ Total Financial Revenue	7.986	9.873	4.798	8.065	13.291	7.792	-	51.805	16	325	3.280	55.426	(11.865)	43.561
Jumlah/Total	863.568	936.412	718.264	629.417	1.276.935	994.011	207.934	5.626.541	70.183	935.278	139.581	6.771.583	(621.089)	6.150.494
Beban Pegawai/ Employee Expense	(469.960)	(494.101)	(283.710)	(317.642)	(492.962)	(387.751)	-	(2.446.126)	(8.284)	(71.325)	(33.094)	(2.558.829)	-	(2.558.829)
Beban Operasi/ Operating Expense	(263.420)	(290.800)	(197.168)	(203.689)	(379.123)	(313.581)	-	(1.647.781)	(59.482)	(816.614)	(40.294)	(2.564.171)	591.526	(1.972.645)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(16.633)	(3.896)	(5.991)	(4.134)	(9.729)	(7.942)	-	(48.325)	(30)	(639)	(912)	(49.906)	-	(49.906)
Beban Umum/ General Expense	(61.699)	(66.393)	(50.733)	(30.644)	(80.824)	(58.583)	-	(348.876)	(50.708)	(20.590)	(8.680)	(428.854)	258	(428.596)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ Depreciation and Amortization Expenses	(22.894)	(16.022)	(12.592)	(13.971)	(25.821)	(22.836)	-	(114.136)	(6.352)	(17.364)	(10.016)	(147.868)	7.481	(140.387)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.006)	(5.558)	(2.729)	(2.384)	(4.997)	(3.943)	-	(22.617)	(5.278)	(848)	(1.407)	(30.150)	-	(30.150)
Beban Keuangan/ Finance Cost	(43.687)	(50.915)	(45.216)	(10.577)	(65.878)	(37.441)	-	(253.714)	(844)	(5.923)	(11.428)	(271.909)	3.819	(268.090)
Jumlah Beban/ Total Expense	(881.299)	(927.685)	(598.139)	(583.041)	(1.059.334)	(832.077)	-	(4.881.575)	(130.978)	(933.303)	(105.831)	(6.051.687)	603.084	(5.448.603)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	(17.731)	8.727	120.125	46.376	217.601	161.934	207.934	744.966	(60.795)	1.975	33.750	719.896	(18.005)	701.891

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. LITIGASI

PT Pos Properti Indonesia

- Perusahaan menggugat Sdr Widodo Iswanto, SH., MH dan Dr. H. Fahmi, SH., MH berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya dalam pengembalian uang sebesar Rp3.190.000.000 ditambah bunga 2% setiap bulannya. Hal ini terdaftar dalam register perkara No.62/PDT.G/2023/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung. Pada tanggal laporan keuangan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Perusahaan menggugat PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian materiil dalam pengembalian atas sisa lahan seluas 5.232 m2 atau senilai Rp1.360.313.000. Hal ini terdaftar dalam register perkara No.80/PDT.G/2023/PN.CKR di Pengadilan Negeri Cikarang. Pada tanggal laporan keuangan, atas perkara ini majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan PT Pos Properti Indonesia untuk sebagian;
 - Menyatakan Marta Jaya melakukan perbuatan wanprestasi;
 - Menghukum Marta Jaya untuk membayar ganti rugi kepada PT Pos Properti Indonesia sejumlah 3 Milyar.
- Pada tanggal 20 Februari 2024, PT Berkah Aslin Mandiri/ Marta Jaya melakukan upaya banding melalui sistem e-court, sehingga pada saat ini Putusan Pengadilan Negeri belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Pada tahun 2024, terdapat lanjutan penanganan perkara perdata tingkat banding dengan nomor 188/PDT/2024/PT BDG.
- Pada tanggal 16 Desember 2024 sudah diterima Amar Putusan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon (Marta Jaya) Ditolak / yang berarti pada pokoknya kembali pada Putusan Tingkat Banding, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Marta Jaya melakukan wanprestasi.
 2. Menghukum Marta Jaya membayar ganti rugi sebesar Rp1.360.313.000,- secara tunai dan sekaligus pada Pospro.
- Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Salinan Putusan Kasasi secara resmi belum diterima oleh Para Pihak, tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Kasasi (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) baru dapat diajukan permohonan ke Pengadilan oleh Pospro setelah Relaas pemberitahuan putusan kasasi diterima oleh para pihak.
- Sampai dengan tanggal terbit laporan, penanganan perkara masih dalam proses minutasasi oleh Majelis.

37. LITIGATION

PT Pos Properti Indonesia

- *The Company sued Mr. Widodo Iswanto, S.H., M.H. and Dr. H. Fahmi, S.H., M.H. in connection with the act of default for not fulfilling its obligation to refund Rp3,190,000,000 plus 2% interest per month. This is registered in case register No.62/PDT.G/2023/PN.BDG at the Bandung District Court. At reporting date the case is still in process examined by the Panel of Judges at the Bandung High Court.*
- *The Company sued PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya regarding the payment of material compensation in return for the remaining land area of 5,232 m2 or worth Rp1,360,313,000. This is registered in case register No.80/PDT.G/2023/PN.CKR at the Cikarang District Court. At reporting date the case is still in process submitting conclusions from the parties in E-litigation.*
 - *Granting PT Pos Properti Indonesia's lawsuit in part;*
 - *Declare Marta Jaya to have committed an act of default;*
 - *Punish Marta Jaya to pay compensation to PT Pos Properti Indonesia in the amount of 3 billion.*
- *On February 20, 2024, PT Berkah Aslin Mandiri / Marta Jaya filed an appeal through the e-court system, so that at this time the District Court Decision does not yet have permanent legal force (inkracht).*
- *In 2024, there was continued handling of civil cases at the appellate level with number 188/PDT/2024/PT BDG.*
- *On December 16, 2024, the Decision on the Cassation Petition filed by the Applicant (Marta Jaya) was received, which means that it basically returns to the Appeal Level Decision, as follows:*
 1. *Declare Marta Jaya in default.*
 2. *Punish Marta Jaya to pay compensation of Rp1,360,313,000, - in cash and at once to Pospro.*
- *As additional information that currently the official copy of the Cassation Decision has not been received by the Parties, the follow-up to the implementation of the Cassation Decision (has been legally binding/inkracht) can only be submitted to the Court by Pospro after the notification of the cassation decision is received by the parties.*
- *As of the date of publication of the report, the handling of the case is still in the process of being minuted by the Tribunal.*

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan RKAP 2024 untuk program kerja 13.1 penerbitan obligasi sebesar maksimal Rp1.500.000.000.000, telah dilakukan penerbitan instrumen utang dalam bentuk Sukuk. Bentuk penawaran instrumen utang dalam bentuk PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) yang terbagi menjadi PUB I tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|---|--|
| a. | Penerbit/ <i>Issuer</i> | : | PT Pos Indonesia (Persero) |
| b. | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah/ <i>Amount of Remaining Ijarah Reward</i> | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)/ <i>The remaining amount of Ijarah Rewards that will be offered is a maximum of Rp1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), which is divided into 3 (three) series that will be guaranteed with Full Commitment:</i> |
| | | | i. Seri A: Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah/ <i>one billion rupiah</i>) |
| | | | ii. Seri B: Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah/ <i>seven hundred and fifty billion rupiah</i>) |
| | | | iii. Seri C: Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah/ <i>one hundred and fifty billion rupiah</i>) |
| c. | Jangka Waktu/ <i>Time Period</i> | : | Seri A : 3 (tiga/ <i>three</i>) tahun/ <i>years</i>
Seri B : 5 (lima/ <i>five</i>) tahun/ <i>years</i>
Seri C : 7 (tujuh/ <i>seven</i>) tahun/ <i>years</i> |
| d. | Cicilan Imbalan Ijarah/ <i>Ijarah Reward Installments</i> | : | Seri A :Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah/ <i>eight billion five hundred million rupiah</i>)
Seri B : Rp73.125.000.000 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah/ <i>seventy three billion one hundred twenty five million rupiah</i>)
Seri C : Rp14.850.000.000 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah/ <i>fourteen billion eight hundred and fifty million rupiah</i>) |
| e. | Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah/ <i>Ijarah Reward Installment Payment</i> | : | Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan/ <i>Ijarah Reward Installments will be paid every 3 (three) months.</i> |
| f. | Hasil Pemeringkatan/ <i>Ranking Results</i> | : | A(idn) (Single A) dari PT Fitch Ratings Indonesia/ <i>A(idn) (Single A) from PT Fitch Ratings Indonesia</i> |

Penjatahan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025, *good fund* diterima pada tanggal 8 Januari 2025 pencatatan di BEI tanggal 9 Januari 2025.

Allotment was made on January 6, 2025, good funds were received on January 8, 2025, listing on the IDX on January 9, 2025.

2. Berdasarkan Akta Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 16 Tanggal 20 Maret 2025 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan untuk menetapkan perubahan jenis saham pada PT Pos Indonesia (Persero) yang semula tanpa Seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000; dan
- b. 455.022 (empat ratus lima puluh lima ribu dua puluh dua) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp455.022.000.000 (empat ratus lima puluh lima miliar dua puluh dua juta).

2. *Based on the Deed of Notification of Amendment to the Articles of Association No. 16 dated March 20, 2025 by Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn in South Jakarta, the shareholders decided to determine the change in the type of shares in PT Pos Indonesia (Persero) which were originally without a Series to consist of Series A Dwiwarna shares and Series B shares with the following details:*

- a. *1 (one) Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000; and*
- b. *455,022 (four hundred fifty five thousand twenty two) series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total nominal value of Rp455,022,000,000 (four hundred fifty five billion twenty two million).*

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

***PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)***

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui pada tanggal 8 April 2025.

**39. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL
OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that have been completed and approved on April 8, 2025.